

**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2023**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya jua, Laporan Kinerja Bappeda Tahun Anggaran 2023 ini dapat kami selesaikan secara tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa kami haturkan ke haribaan junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, karena dengan hadirnya beliau ke dunia ini membawa cahaya yang dapat menerangi kegelapan di alam semesta.

Laporan kinerja yang disusun ini merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Bappeda di tahun 2023. Tahun yang penuh dengan dinamika sehingga semua SKPD harus melakukan penyesuaian terkait dengan kondisi pandemi dan terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019, serta Kepmendagri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 yang merubah kodifikasi dan nomenklatur program dan kegiatan yang berimbas pada penyesuaian yang memakan energi yang luar biasa banyaknya dari semua SKPD. Sebuah fenomena yang secara kasat mata menyebabkan menurunnya intensitas kegiatan pada semua sektor. Dengan kondisi yang demikian maka penggambaran terhadap bagaimana kinerja Bappeda Tanah Laut pada tahun 2023 kami harapkan dapat tergambar pada laporan kinerja ini.

Tentunya banyak kekurangan yang terdapat dalam Laporan Kinerja ini sehingga tegur sapa, saran dan masukan kami perlukan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja yang kami sampaikan ini dapat memenuhi kriteria sebagai Laporan Kinerja yang diharapkan oleh pemerintah.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Bappeda



Ismail Fahmi, SE, MT
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut menyajikan capaian kinerja baik keberhasilan maupun kegagalan sasaran strategis selama tahun 2023 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategik Tahun 2018 – 2023 dan berbagai capaian strategis tercermin juga dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023 telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang harus dicapai oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Capaian kinerja sasaran berdasarkan indikator yang ditetapkan menunjukkan persentase capaian kinerja berikut :

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian(%)	Kriteria Kinerja
	Meningkatnya Kesesuaian perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)	Sangat tinggi
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)	Sangat tinggi

Berdasarkan table di atas terdapat 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dari 2 indikator kinerja sasaran strategis tersebut telah memenuhi target dan termasuk kedalam kategori sangat tinggi.

Total APBD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan APBD Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebesar **Rp. 12.706.990.988** sedangkan realisasi anggarannya mencapai **Rp. 10.345.550.664** atau **81,42 %** dari total anggaran, dengan demikian anggaran silpa diketahui sebesar **Rp. 2.361.440.324** atau sebesar **19 %**. Sedangkan hasil realisasi fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2023 adalah sebesar 100%, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi anggaran di tahun anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	1
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis.....	11
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran	16
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya	21
I. Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	25
A.. Visi RPJMD	25
B.. Misi RPJMD	25
C.. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	26
D.. Indikator Kinerja Utama	31
E.. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	32
F.. Program dan Kegiatan	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	44
A.. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	44
1. Tujuan RPJMD	44
2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan.....	46
3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan.....	82
1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian	94
2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan	103
3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan	109
4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro.....	114
5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan	

Wilayah.....	128
6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA.....	135
7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya	143
8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan .	154
B.. AKUNTABILITAS KEUANGAN	168
1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023.....	168
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	175
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023	178
BAB IV PENUTUP.....	183
A.. Kesimpulan	183
B.. Strategi Peningkatan Kinerja	183
LAMPIRAN	
1.. IKU	
2. . Pernyataan Hasil Reviu	
3. . Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
4. . Cascading/Pohon Kinerja	
5. . Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)	
6. . Monev Renstra	
7. . Matrik Keselarasan	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis kepada Bupati Tanah Laut atas pencapaian kinerja Bappeda selama tahun anggaran 2023.

Tahun Anggaran 2023 ini dapat dikatakan masih adanya dinamika eksternal seperti terbitnya Permendagri 90 Tahun 2019 menjadi Permendagri 50-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sistem aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian oleh semua SKPD termasuk Bappeda. Penyesuaian-penyesuaian tersebut membuat kinerja Bappeda mau tidak mau mengalami penurunan akselerasi karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan aturan-aturan baru.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam satu tahun kepada Bupati

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

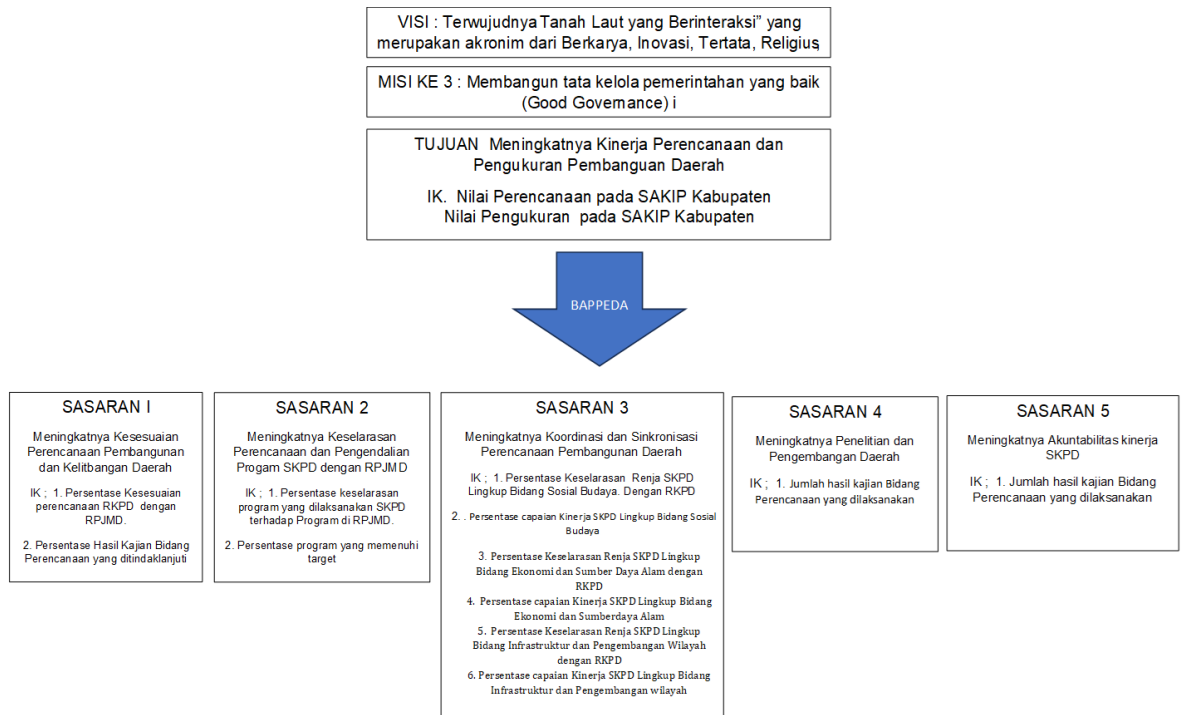
- Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;

- Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
- Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya
- Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
- Sebagai media dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sistem aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah)
8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

D. Cascading Kinerja



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Proses Bisnis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, Badan Perencanaan Pembangunan Wilayah Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

b. Tugas Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melaksanakan tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.

- b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan.
- d. Pelaksanaan administrasi Badan.
- e. Pembinaan UPT Badan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara detil, setiap jabatan yang ada di Bappeda mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :
 - a) pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c) pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - e) penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
 - f) pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan program kegiatan serta penataan barang;
 - g) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - h) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan

analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- i) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
 - j) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
 - k) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sekretariat membawahi :
- a) Sub Bagian Perencanaan
Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.
 - b) Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan.
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

2. Bidang Sosial Budaya

Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang sosial budaya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 2) memverifikasi Rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya;
- 3) pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten serta Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Sosial Budaya;
- 6) pelaksanaan Pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Sosial Budaya;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas untuk menyiapkan perumusan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi dan sumber daya alam.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah, pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 2) memverifikasi rancangan Renstra dan Renja Perangkat Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 3) pengkoordinasian, penyusunan materi dan substansi dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;

- 4) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dalam perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang Ekonomi dan Sumber daya alam;
- 5) pengoordinasian dan penyusunan materi dan substansi untuk pelaksanaan Perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 6) pengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 7) pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di KabupatenTanah Laut pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 8) pelaksanaan pengendalian/monitoring, pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- 9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang - undangan; dan
- 10) memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Inrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :

- 1) pengkoordinasian Penyusunan Rancangan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 2) pemverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 3) pengkoordinasianpelaksanaan Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- 4) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Perencanaan Pembangunan lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 5) pengkoordinasian Sinergitas dan Harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 6) pengkoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga Provinsi di Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 7) pengkoordinasian Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- 8) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 9) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 10) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 11) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

5. Bidang Perencanaan Makro

Bidang Perencanaan Makro mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kegiatan dalam rangka integrasi (keterpaduan perencanaan) dan sinkronisasi (penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku) perencanaan makro pembangunan, perencanaan pembiayaan dan pengendalian pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Makro menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- 2) pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 3) penyusunan rencana Pembangunan daerah dan rencana pendanaannya dalam jangka panjang, menengah dan tahunan;
- 4) pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- 5) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- 6) pemantauan, evaluasi, analisis dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3) perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan sumber daya alam, teknologi dan inovasi, infrastruktur dan pengembangan wilayah, bidang sosial dan budaya;
- 4) perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 5) pengoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di Bidang

Penelitian dan Pengembangan;

- 6) pengoordinasian Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi di Kabupaten Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 7) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

7. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis Badan bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan.

Kepala UPT bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

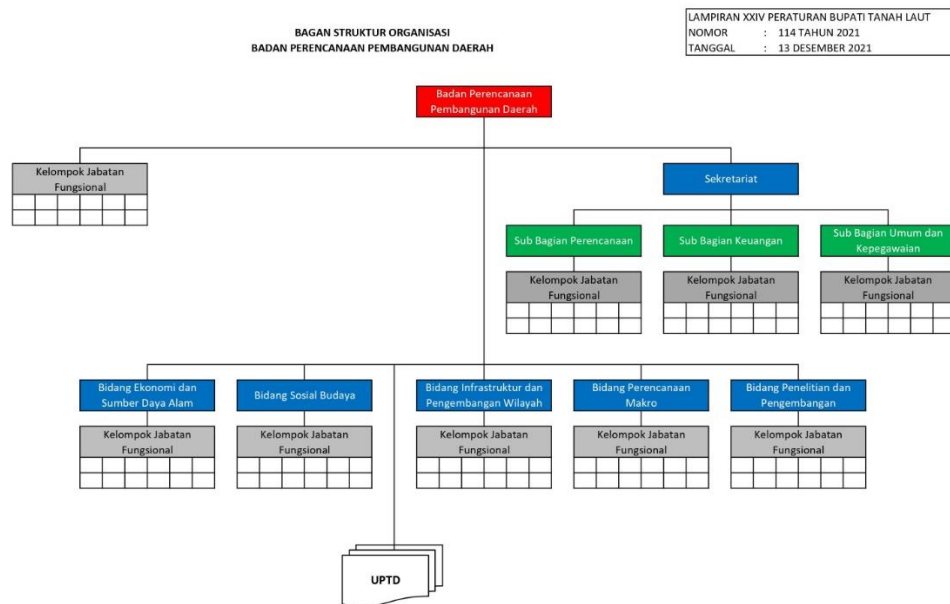
Terkait Kelompok Jabatan Fungsional ini terdapat ketentuan sebagai berikut :

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- 5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- 6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, SOTK BAPPEDA dapat dilihat pada bagan berikut :



Dari bagan diatas dapat diketahui bahwa Bappeda Tanah Laut dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang kasubbag dan dibantu pula oleh 5 (lima) orang Kepala Bidang yang masing-masing membawahi Jabatan Fungsional dan staf. Selain itu, Bappeda dilengkapi dengan kelompok Jabatan Fungsional.

F. Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan

karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi / permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Terdapat ada 5 (Lima) akar masalah yang sampai saat ini masih ditemukan, yaitu:

1. Belum optimalnya Kualitas SDM perencana.

Kualitas Sumber Daya Manusia yang menyusun sebuah perencanaan akan sangat menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Untuk menjadi seorang perencana tidaklah mudah. Diperlukan pemahaman terhadap agenda besar yang diinginkan oleh Pemerintah daerah. Agenda besar tersebut adalah RPJMD. Didalamnya telah dituangkan seluruh target capaian yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 Tahun. Adanya tujuan, sasaran, indikator dan target harus betul betul difahami oleh para perencana baik pada SKPD Bappeda sendiri ataupun oleh para perencana yang ada di SKPD. Secara mendasar Bappeda memiliki cukup ketergantungan dengan para perencana di SKPD karena semua arahan dan pengendalian yang disampaikan harus diejawantahkan oleh para perencana SKPD kedalam indikator-indikator sasaran yang termuat dalam Renstra dan Renja. Sinkronisasi antara Bappeda dan para perencana SKPD inilah yang diperlukan untuk melahirkan sebuah perencanaan yang berkualitas, yaitu perencanaan yang selaras dengan RPJMD.

Sudah menjadi masalah klasik bahwa penempatan para ASN perencana di SKPD seringkali berubah dari waktu ke waktu. Perencana yang awalnya sudah mulai memahami tugas dan kewajibannya seringkali kemudian mengalami perpindahan tugas apakah karena mutasi ataupun promosi jabatan sehingga akan datang para perencana

baru yang belum memiliki kemampuan dan pemahaman sebagaimana perencana sebelumnya. Hal ini salah satu sebab mengapa pembinaan perencanaan Bappeda kepada para perencana di SKPD senantiasa mengalami pasang surut. Kondisi ini menyebabkan penyusunan perencanaan setiap tahun seringkali pula terpengaruh dengan penggantian posisi seorang perencana di SKPD, disamping memang secara alami selalu ada perbedaan kualitas keterampilan dari setiap perencana.

2. Belum dijadikannya Musrenbang sebagai pintu masuk utama penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Musrenbang semestinya merupakan sarana yang sangat tepat untuk langkah awal menyusun perencanaan setiap tahunnya. Dalam mekanisme musrenbang ini sebenarnya sudah terakomodasi berbagai pendekatan yang memungkinkan disusunnya perencanaan secara matang. Dalam musrenbang terdapat mekanisme perencanaan dari bawah (bottom up planing), mekanisme perencanaan dari atas (top down planning), mekanisme perencanaan teknokratis, dan mekanisme politis. Pada mekanisme bottom up, masyarakat mempunyai jalur untuk menyampaikan aspirasinya, keinginannya yang memang telah dibicarakan pada tingkat desa saat dilaksanakan musyawarah desa dan musyawarah kecamatan. Pada mekanisme top down, Pemerintah dan SKPD mempunyai jalur untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah dan pemerintah di atasnya. Pada mekanisme teknokratis, Para cendekiawan dan publik dapat menyampaikan usulan yang relatif telah matang dipandang dari sudut pandang teknis perencanaannya. Pada Mekanisme politis, para wakil rakyat memiliki pintu masuk untuk menyampaikan keinginan para konstituennya. Semua sudah memiliki pintu masuk melalui musrenbang pada beberapa tingkatannya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa banyak usulan masyarakat yang hilang entah kemana padahal telah tersaring secara baik di level desa dan kecamatan. Padahal sebenarnya masyarakatlah yang tahu dengan kondisi di level akar rumput. Kadang terjadi ego sektoral sehingga justru perencanaan top planning lebih dominan dan

mekanisme politik juga tak kalah meramaikan riuhnya pembahasan usulan kegiatan. Adanya usulan masyarakat yang langsung ke SKPD, langsung ke pimpinan daerah, atau ke wakil rakyat menambah rumitnya penyusunan perencanaan. Bappeda menjadi pihak yang disalahkan masyarakat karena dinilai tak mampu menjaga kontinuitas usulan masyarakat sehingga pameo bahwa “Musrenbang hanya formalitas dan tidak ada gunanya” dimata masyarakat menjadi sangat sulit untuk dihilangkan. Ketika ini terjadi, kembali Bappeda yang harus babak belur menerima semua yang dikeluhkan semua pihak.

3. Belum optimalnya pengendalian dalam penyusunan perencanaan.

Dalam prakteknya, penyusunan perencanaan melalui berbagai tahap, dari perencanaan awal dimana SKPD diasistensi renjaya dan kemudian diminta untuk menyampaikan usulan kegiatan. Setelah pagu disampaikan maka kembali dilakukan rasionalisasi usulan oleh masing-masing SKPD. Hasil rasionalisasi tadi kemudian diinput kedalam SIPD. Sayangnya setelah proses input selesai seringkali terjadi pengendalian menjadi sulit dilakukan karena biasanya batas waktu penginputan yang sangat terbatas dan terkesan kejar tayang. Ada beberapa titik krusial dimana pengendalian sebenarnya bisa dilakukan tetapi menjadi tidak dapat dilakukan oleh Bappeda. Titik pertama berada pada saat renja sudah diasistensi dan perencanaan awal berupa kegiatan disusun. Bappeda tidak dapat menjamin bahwa hasil asistensi dipatuhi oleh SKPD. Titik kedua terjadi pada saat kegiatan sudah disusun oleh SKPD sesuai pagu tentatif. Saat inipun Bappeda tidak memiliki mekanisme pengendalian untuk menjamin bahwa usulan kegiatan berdasarkan pagu masih sesuai dengan renja yang sudah diasistensi Bappeda. Titik ketiga terjadi pada saat penginputan. Kembali Bappeda tidak memiliki mekanisme bahwa apa yang diinput oleh SKPD adalah sesuai kesepakatan saat asistensi. Mungkin tidak semua titik krusial bisa terbaca oleh Bappeda, tetapi pada kenyataannya masih banyak ditemui ketidakpatuhan terhadap hasil asistensi. Salah satunya dengan mengusulkan kegiatan yang kurang penting dan kemudian mengusulkan penambahan anggaran melalui Telaahan Staf yang kemudian

berkembang secara liar hingga pembengkakan anggaran melambung melebihi proyeksi anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Fenomena yang nampak kemudian adalah RKPD tidak sesuai lagi dengan KUPA-PPAS. Ada banyak tambahan kegiatan yang tidak diketahui asal muasalnya dan SKPD terkesan menjadikan Telaahan Staf kepada Pimpinan Daerah sebagai jalan keluar untuk mewujudkan keinginan. Keinginan yang sebenarnya bukan kebutuhan.

4. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.

Hal mendasar yang menyebabkan perencanaan menjadi tidak berkualitas karena tidak selaras dengan Agenda Besar 5 Tahunan Pemerintah Daerah yaitu RPJMD. Masih terdapat belasan SKPD yang belum sinkron Renstranya dengan RPJMD dan masih terdapat 17 sasaran RPJMD yang masih belum tercapai hingga memasuki tahun empat RPJMD 2018-2023. Apabila hal ini tidak segera diluruskan maka dampak yang muncul adalah tidak sinkronnya kegiatan SKPD dengan Tujuan dan Target Pemerintah Daerah yang secara jelas telah dituangkan dalam RPJMD. Anggaran menjadi percuma digelontorkan karena membiayai berbagai kegiatan yang kontennya tidak selaras dengan keinginan RPJMD. Menselaraskan renstra dan Renja SKPD dengan Sasaran-sasaran dan target RPJMD menjadi hal yang harus segera dilakukan oleh Bappeda Tanah Laut.

5. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan waktu, kabupaten Tanah Laut yang dulu pernah jaya dengan kayu ulinnya, kemudian terganti dengan batubara dan biji besi kini terasa belum terpetakan kemana akan terbawa arahnya apabila sawit dan karet dan jagung dan komoditi lainnya juga akan mengalami penurunan produksi. Pemerintah perlu segera mencari alternatif pendapatan untuk mempersiapkan perkembangan di masa mendatang. Tidak hanya terkait dengan alternatif potensi, kondisi alam yang seringkali tak bersahabat di musim hujan juga memiliki potensi untuk menurunkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, adanya pemikiran, penelitian dan

pengembangan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi sesuatu ancaman ataupun memanfaatkan sebuah peluang. Dengan penelitian dan pengembangan maka kesalahan langkah akan dapat dihindarkan. Dengan penelitian dan pengembangan akan membuka peluang yang bisa jadi belum terpikirkan. Selain apa yang dikemukakan diatas, tupoksi Bappeda dalam melaksanakan urusan perencanaan dan penelitian pengembangan menghajatkan peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan mesti diberikan porsi yang besar. Saat ini masih dirasakan bahwa peran penelitian dan pengembangan belum tergalai secara optimal. Untuk itu perhatian terhadap rogram penelitian dan pengembangan perlu lebih dioptimalkan lagi. Dengan kualitas penelitian yang baik akan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di di Tanah Laut di masa yang akan datang.

Dari beberapa permasalahan diatas, Bappeda memandang perlu untuk mengangkat 2 (dua) isu strategis saat ini, yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan.
2. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

a. Sumberdaya Manusia

Jumlah PNS Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang dan PPPK 1 (satu) Orang yang terdiri dari :

1.	Kepala Bappeda	1	Orang
2.	Sekretaris Bappeda	1	Orang
3.	Kepala Bidang	5	Orang
4.	Kepala Sub Bagian	3	Orang
5.	Fungsional Perencana	6	Orang
6.	Fungsional Pranata Komputer	2	Orang
7.	Staf/Pelaksana	14	Orang
8.	PPPK	1	Orang
	Jumlah	32	Orang

Kualifikasi Pendidikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PPPK	
1.	SD	0	0	0
2.	SMP	0	0	0
3.	SMA	2	0	2
4.	D3	4	0	4
5.	S1	19	1	20
6.	S2	6	0	6
	Jumlah	31	1	32

Jumlah Pangkat dan Golongan Pegawai Bappeda Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina TK. I	IV/b	2 Orang
2.	Pembina	IV/a	6 Orang
3.	Penata TK. I	III/d	6 Orang
4.	Penata	III/c	3 Orang
5.	Penata Muda TK. I	III/b	3 Orang
6.	Penata Muda	III/a	8 Orang
7.	Pengatur TK. I	II/d	3 Orang
8.	Golongan IX		1 Orang
	Jumlah	-	32 Orang

b. Sarana Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2022

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Tanah	6753 M ²	B		
2.	Gedung	651 M ²	13		
3.	Kendaraan Roda 2	13 Buah	4		
4.	Kendaraan Roda 4	4 Buah	7		
5.	GPS	7 Buah	1		
6.	Mesin Ketik Manual	1 Buah	12		
7.	Lemari Besi	12 Buah	11		
8.	Rak Besi/Metal	11 Buah	18		
9.	Filling Besi/Metal	18 Buah	1		
10.	Brand Kas	1 Buah	21		
11.	Lemari Kayu	21 Buah	1		
12.	Papan Visuil	1 Buah	6		
13.	Alat Penghancur Kertas	6 Buah	1		
14.	Papan Pengumuman	1 Buah	1		
15.	White Board	1 Buah	2		
16.	Genset	2 Buah	7		
17.	Rak Kayu	7 Buah	56		
18.	Meja Kayu	56 Buah	2		
19.	Kursi Besi/Metal	2 Buah	40		
20.	Meja Rapat	40 Buah	1		
21.	Meja Podium	1 Buah	33		
22.	Kursi Rapat	33 Buah	2		
23.	Kursi Tamu	2 Set	107		
24.	Kursi Putar	107 Buah	21		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
25.	Meja Komputer	21 Buah	5		
26.	Kursi Kerja	5 Buah	1		
27.	Rak TV	1 Buah	12		
28.	Karpet	12 Meter	2		
29.	Meja Kerja	2 Buah	1		
30.	Mesin Potong Rumput	1 Buah	1		
31.	Lemari es	1 Buah	8		
32.	AC Unit	8 Buah	22		
33.	AC Split	22 Buah	2		
34.	Televisi	2 Buah	1		
35.	Wireless	1 Buah	3		
36.	Microphone Table Stand	3 Set	1		
37.	Camera Film	1 Buah	5		
38.	Handy Cam	5 Buah	1		
39.	Tandon Air	1 Buah	2		
40.	Tong Sampah	2 Buah	2		
41.	Mainframe	2 Buah	28		
42.	P.C Unit/ Komputer PC	28 Unit	14		
43.	Laptop	14 Buah	21		
44.	Notebook	21 Buah	44		
45.	Printer	44 Buah	7		
46.	Scanner	7 Buah	1		
47.	Ipad	1 Buah	7		
48.	Monitor	7 Buah	1		
49.		1 Buah	13		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
50.	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	13 Buah	2		
51.	UPS	2 Buah	6		
52.	Stabilizer/ Stavolt	6 Buah	35		
53.	Harddisk Internal	35 Buah	2		
54.	Harddisk Eksternal	2 Buah	1		
55.	DVD-Rom Drive	1 Buah	1		
56.	Memory	1 Unit	5		
57.	Server	5 Buah	7		
58.	Router	7 Buah	1		
59.	Proyektor + Attachment	1 Buah	1		
60.	Audio Amplifier	1 Unit	5		
61.	Microphone/Wireless Mic	5 Buah	2		
62.	Layar Proyektor	2 unit	2		
63.	Loudspeaker	2 Unit	2		
64.	Mixer Amplifier	2 Buah	4		
65.	Voice Recorder	4 Buah	1		
66.	Camera Electronic	1 Buah	4		
67.	Kompas	4 Buah	3		
68.	Handy Talky	3 Unit	9		
69.	Wireless Portable (Sound System)	9 Buah	2		
70.	CCTV	2 Buah	28		
71.	Gerobak Dorong	28 Buah	1		
72.	Kursi Lipat	1 Buah	1		
73.	Tangga Alumunium	1 Set	1		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
74.	Peralatan Jaringan Lain-lain	1 Buah	1		
75.	automatic Volatge Regulator (AVR) Tripod Camera	1 Buah	1		

c. Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2023, dengan jumlah pagu murni sebesar Rp. 11.379.488.744,- dan setelah berjalannya waktu ada perubahan anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 12.706.990.988,-.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
1	Agar dapat dilakukan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja yang masih belum spesifik sehingga memudahkan pengukuran dan pencapaian atas target kinerja	Telah di lakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang berdasarkan PK, dan dalam pengembangannya Kabupaten melalui Aplikasi Si Monev yang merupakan pengembangan dari E-Monev, pengukuran kinerja sampai kepada individu terendah yakni pelaksana. Pengukuran kinerja didasarkan pada kinerja SKP	https://drive.google.com/drive/folders/1u4xaAKiqifJvemMDCw-TvE6jKpEe7FjV?usp=sharing	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
2	Agar Pelaksanaan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja dilaksanakan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Telah di lakukan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja berjenjang dibawahnya sehingga diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1DSj0uuY18m4Qaf6Z7-wipAPklyR58JMW?usp=sharing	
3	Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati	Telah di buat SK Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada ASN Teladan / Berprestasi Bappeda tahun 2023 dan penyampaian usulan asn teladan lingkup Bappeda ke bkpsdm	https://drive.google.com/drive/folders/1Mh3IHsIQgOZHbK2DGld87940m-wkA2Iom?usp=sharing	
4	Agar laporan atas pencapaian kinerja dapat menyajikan data dan analisa yang andal dan memadai, dapat ditelusuri penyajian sumber datanya, diperoleh dari dasar perhitungan yang valid (sah) dan sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya	Telah di lakukan perbaikan terhadap Dokumen Lakip 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1kHRXylEwh4EaaxJ3OjEDfZjKAGdw6r_1?usp=sharing	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
5	Agar dapat meningkatkan kompetensi tim AKIP internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan, sebagai sarana dalam meningkatkan nilai SAKIP	Mengikuti Bimtek Peningkatan Implementasi Sakip dan RB	https://drive.google.com/drive/folders/1CWG2NatsV3Zq2_KZqdTwWF6LmN9pkMru?usp=sharing	

I. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD

- C. Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

- 1. Sasaran RPJMD
- 2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan
- 3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan
 - 1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - 2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan
 - 3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan
- 4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro
- 5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
- 6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA
- 7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Bidang Sosial Budaya
- 8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

- 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
- 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
- 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

- 1. IKU
- 2. Pernyataan Hasil Reviu
- 3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- 4. Cascading/Pohon Kinerja
- 5. Capaian Kinerja Per Triwulan (1-4)
- 6. Monev Renstra
- 7. Matrik Keselarasan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Visi RPJMD

Visi dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut periode 2018 – 2023 adalah :

“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi” yang merupakan akronim dari Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi”.

B. Misi RPJMD

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah dirancanglah 5 buah Misi yaitu:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, social dan budaya
2. Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Bappeda, maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan pencapaian misi ke-3 yaitu : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)”.

Tata kelola pemerintahan yang baik berawal dari penyusunan perencanaan yang baik pula. Perencanaan yang baik dapat diukur dari beberapa aspek yang seringkali disingkat “SMART” yaitu Specific (khusus/focus), Measurable (terukur), Achievable (dapat dicapai), Relevant (sesuai) dan Timebound (Batas Waktu).

Sejauh mana Bappeda mampu menjadi SKPD koordinator sektor perencanaan semua SKPD yang ada di Kabupaten Tanah Laut akan menentukan kualitas perencanaan yang akan tersusun. Tersusunnya perencanaan yang berkualitas akan menentukan kualitas tata kelola pemerintahan karena dalam prosesnya, tata kelola pemerintahan memerlukan perencanaan yang baik pula.

C. Tujuan dan Sasaran Strategis

1. Tujuan

Rumusan tujuan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Tanah Laut adalah :

Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.

Kualitas perencanaan yang baik akan sangat menentukan kualitas pembangunan yang dihasilkan. Kualitas perencanaan dan pembangunan yang baik ini akan dapat didorong secara optimal apabila didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula. Untuk itu, guna mewujudkan pembangunan yang baik sesuai arahan RPJMD diperlukan kualitas perencanaan yang baik yang didukung dengan kualitas kelitbangan yang baik pula.

2. Sasaran Strategis

- 1) Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan pengendalian program yang dilaksanakan SKPD dengan sasaran-sasaran yang ada di dalam RPJMD. Sasaran ini juga mengarah pada kesesuaian program RKPD dengan RPJMD. Indikatornya dilihat dari jumlah program yang ada di RKPD yang dilaksanakan oleh Bappeda dengan program perencanaan dan kelitbangan yang ada di RPJMD.

- 2) Meningkatkan Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD. Sasaran strategis ini ditujukan

untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup bidang Sosial Budaya dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Sosial Budaya dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi bidang Sosial Budaya.

- 3) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan. Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Ekonomi dan SDA dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Ekonomi dan SDA dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Ekonomi dan SDA.
- 4) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD. Sasaran strategis ini ditujukan untuk meningkatkan keselarasan perencanaan SKPD dalam lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD. Untuk mencapai sasaran ini dengan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antara Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan SKPD-SKPD yang ada dalam lingkup koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- 5) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui sumbangsih hasil kajian-kajian yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam penyempurnaan penyusunan perencanaan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah.
- 6) Meningkatnya Inovasi Daerah
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan daerah melalui sumbangsih hasil inovasi daerah yang dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan dalam penyempurnaan penyusunan perencanaan dan peningkatan kualitas pembangunan daerah
- 7) Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.
Sasaran ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan SKPD

baik secara administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan serta penyusunan perencanaan dan pelaporan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku sehingga mencapai akuntabilitas yang baik yang diukur dengan Nilai SAKIP SKPD.

Penjabaran tujuan, sasaran serta strategi dan kebijakan disajikan dalam tabel berikut :

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tran sisi 2018	Target Kinerja					
							Tahun ke - (%)					
							1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
							Target Tujuan					
	Meningkatnya kinerja Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan daerah.	Nilai Perencanaan Pada SAKIP Kabupaten										22.5
		Nilai Pengukuran Pada SAKIP Kabupaten										17.5
							Target Sasaran					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tran sisi 2018	Target Kinerja				
							Tahun ke - (%)				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	100	100	100	100	100
					Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	60	60	70	80	90	100
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	100	100	100	100	100	100
					Persentase kinerja SKPD yang memenuhi target	100	100	100	100	100	100
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD	100	100	100	100	100	100
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	70	80	80	90	90	90

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tran sisi 2018	Target Kinerja				
							Tahun ke - (%)				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100	100	100	100	100	100
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	70	80	80	90	90	90
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Progam SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD	100	100	100	100	100	100
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	70	80	80	90	90	90
				Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan yang dilaksanakan		5	6	7	8	9

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tran sisi 2018	Target Kinerja				
							Tahun ke - (%)				
							1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
				Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan / diterapkan	60	60	70	80	90	100
				Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100	100	100	100	100	100
					Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100	100	100	100	100	100
					Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100	100	100	100	100	100
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	74 (BB)	74 (BB)	75 (BB)	76 (BB)	76 (BB)	77 (BB)

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan order dari pimpinan daerah kepada sebuah SKPD. IKU merupakan locator dimana SKPD tersebut harus berkiprah dan memberikan andilnya dalam mendukung pencapaian visi dan misi. Dari IKU ini pula dapat diketahui core bussines sebuah SKPD. Berdasarkan analisa terhadap tuntutan kinerja yang dikaitkan dengan produk layanan Bappeda maka untuk tahun 2023 telah ditetapkan adanya 1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Tanah Laut yaitu :

“Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah”.

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sebagai instansi pemerintah kabupaten Tanah Laut maka Bappeda juga membuat perjanjian kinerja untuk tahun anggaran 2023. Perjanjian Kinerja ditanda tangani oleh para pihak terkait. Ketentuan penandatanganan Perjanjian Kinerja ini diatur sebagai berikut :

1. Perjanjian Kinerja Pimpinan Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD) dengan tingkat Eselon II, disusun oleh pimpinan SKPD yang kemudian ditandatangani oleh Bupati (Terlampir).
2. Selain antara pimpinan SKPD dengan Bupati, Bappeda juga melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) dengan Pimpinan SKPD, serta Kepala Sub bagian (Eselon IV) dengan Sekretaris/ Kepala Bidang (Eselon III) untuk menyajikan indikator kinerja utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Rincian perjanjian kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV sesuai dengan format pada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagaimana terlampir. Perjanjian Kinerja SKPD BAPPEDA adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator kinerja program dan kegiatan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.	Persentase Kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD.	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM
				Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD.
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD
		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti.	100	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian. 2. Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan. 3. Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan. 4. Nilai Akuntabilitas 	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	IKM.
			100	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase capaian kegiatan perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun
			100	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah.
			77	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

		Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian
				Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas & fungsi yg mengikuti Pendidikan & Pelatihan
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase capaian kegiatan administrasi umum perangkat daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yg disediakan
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi & konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara.

3	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.	1. Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD 2. Persentase kinerja SKPD yang memenuhi target	100	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKP D
			100	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pendanaan.
				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah (semua perencanaan pembangunan daerah)
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah
4	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKP D.

	Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.	Sosial Budaya dengan RKPD. 2. Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	90	Pembangunan Daerah	
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan Manusia
5	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian	1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD.

	Program SKPD dengan RPJMD	<p>Alam dengan RKPD.</p> <p>2. Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam.</p>	90	<p>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</p>	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
				Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
6.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	<p>1. Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD.</p> <p>2. Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup</p>	100	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kesesuaian antara pagu RPJMD dan RKPD.
			90	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase capaian kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan wilayah		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang infrastruktur
				Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan
7.	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan yang dilaksanakan.	9	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil kelitbang yang ditindaklanjuti.
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase capaian hasil kajian Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
				Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan fasilitasi, pelaksanaan & evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi

				Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang dikelola dengan baik
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil kajian bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan/diterapkan	100	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase capaian hasil kajian pengembangan inovasi dan teknologi.
				Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi

F. Program dan Kegiatan

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.896.001.348,-	10.770.003.149,-
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.994.758,-	34.594.758,-
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.995.878,-	9.995.878,-
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.998.880,-	24.598.880,-
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.765.092.339,-	7.459.592.339,-
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.750.092.919,-	7.444.592.919,-
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD"	14.999.420,-	14.999.420,-
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.189.000,-	118.651.500,-
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	33.189.000,-	70.651.500,-
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30.000.000,-	48.000.000,-
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.331.214.040,-	2.397.533.807,-
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.976.799,-	14.976.799,-
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307.450.139,-	713.769.906,-
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.787.102,-	55.787.102,-
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,-	3.000.000,-
	5. Penyediaan Bahan/Material	0,-	10.000.000,-
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950.000.000,-	1.600.000.000,-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447.261.211,-	480.630.745,-
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123.000.000,-	119.000.000,-
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324.261.211,-	361.630.745,-
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269.250.000,-	279.000.000,-
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-	30.000.000,-
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.900.000,-	135.900.000,-
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103.350.000,-	113.100.000,-
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.149.415.083,-	1.340.718.103,-
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	941.659.717,-	1.062.732.737,-

	1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	941.659.717,-	1.062.732.737,-
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	100.000.000,-
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107.755.366,-	177.985.366,-
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	107.755.366,-	177.985.366,-
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	152.636.463,-	270.601.215,-
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	59.907.463,-	49.182.463,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11.386.731,-	7.786.731,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	17.310.650,-	10.185.650,-
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8.012.333,-	8.012.333,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23.197.749,-	23.197.749,-
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38.249.000,-	164.469.000,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.674.000,-	78.524.000,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.060.000,-	24.500.000,-
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6.900.000,-	56.950.000,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	10.615.000,-	4.495.000,-
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	54.480.000,-	56.949.752,-
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.740.000,-	5.644.876,-
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.920.000,-	10.764.876,-

	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24.700.000,-	31.420.000,-
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9.120.000,-	9.120.000,-
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	181.435.850,-	325.668.521,-
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	56.744.900,-	124.612.048,-
	1. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	28.372.450,-	124.612.048,-
	2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	28.372.450,-	0,-
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	26.260.000,-	89.965.523,-
	1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	26.260.000,-	89.965.523,-
2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	98.430.950,-	111.090.950,-
	1. Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	98.430.950,-	111.090.950,-

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 Bappeda Tanah Laut melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan dengan anggaran yang dikelola sebesar Rp. 11.379.488.744,-, dan pada APBD Perubahan mengalami perubahan menjadi Rp. 12.706.990.988,-.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

1. Tujuan RPJMD

RPJMD merupakan dokumen yang sangat penting dari semua SKPD yang didalamnya terdapat indikator-indikator yang harus diwujudkan oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya. Tujuan RPJMD yang menjadi *core bussines* BAPPEDA sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah, dengan dua indikator tujuan Nilai Perencanaan pada SAKIP Kabupaten dan Nilai Pengukuran pada SAKIP Kabupaten

Tahun 2023, untuk mencapai tujuan RPJMD ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program yaitu 129 Program dengan anggaran sebesar Rp. 2.257.492.963.463,- pada APBD Murni dan 129 program Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.502.266.740.528,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.243.823.705.319,- dengan persentase 89.67%

Tahun 2022, untuk mencapai tujuan RPJMD ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program yaitu 129 Program dengan anggaran sebesar Rp. 1.614.659.137.899,- Pada APBD Murni dan 129 program Perubahan dengan anggaran sebesar Rp. 2.122.153.778.445,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.863.861.922.192,92 dengan persentase 87.83 %

Pada RPJMD dengan anggaran APBD Murni tahun 2023 sebesar Rp. 2.257.492.963.463,- dan Anggaran Perubahan sebesar Rp. 2.502.266.740.528,- mengalami kenaikan sekitar 10.84%, bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 38.011.296.208 atau 15.19 %

Dilihat dari capaian tujuan, maka secara umum kinerja pada Indikator Tujuan RPJMD pada Bappeda telah tercapai 42.09% (Perencanaan dan Pengukuran) dengan realisasi keuangan sebesar

Rp. 2.243.823.705.319,- dengan persentase 89.67%. pada tahun 2023 dan capaian pada tahun 2019 s/d 2022 indikator tujuan RPJMD rata-rata di atas 42% (Perencanaan dan Pengukuran) setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target kinerja dapat tercapai meskipun anggaran yang direalisasikan atau yang terserap berkisar 87.83 % lebih kecil dibanding Fisik ini sebagian besar disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Program.

Berikut capaian indikator tujuan RPJMD;

No.	Tujuan strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Kinerja Perencanaan dan Pengukuran Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Pada SAKIP Kabupaten	2019	21.97	21.99	Persentase capaian (Perencanaan) diatas target
2020			21.98	22.14		
2021			21.98	22.25		
2022			22	22.43		
2023			22.5	22.59		
		Nilai Pengukuran Pada SAKIP Kabupaten	2019	16.03	16.05	Persentase capaian (Pengukuran) diatas target
2020			16.05	16.18		
2021			16.06	16.22		
2022			17	19.46		
2023			17.5	19.50		

Jika dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Nilai SAKIP Kabupaten Tanah Laut masih jauh berada di bawah, dimana nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah A (81,21).

Sebelum memasuki pada uraian secara detil tentang akuntabilitas kinerja personil Bappeda dari Eselon II hingga eselon III perlu disepakati terlebih dahulu tentang katagori penilaian berdasarkan skala yang dapat dipertanggungjawabkan. Skala penilaian yang digunakan untuk menilai akuntabilitas kinerja personil menggunakan skala yang diambil dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50	Sangat Rendah

Dengan menggunakan skala ini diharapkan penilaian mandiri yang dilakukan menjadi lebih objektif dan lebih jelas pengklasifikasiannya.

2. Akuntabilitas Kinerja Kepala Badan.

a. Analisis

Bappeda Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Laut dan mempunyai tugas melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan. Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) Indikator Kinerja akan dijelaskan secara lebih rinci pada tabel di bawah ini ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Kesesuaian perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD.	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	2020	70	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			80	100		
2022			90	100		

			2023	100	100	
--	--	--	------	-----	-----	--

Sasaran eselon II : Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator 1 : Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 3 (tiga) Program, 12 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan sesuai table dibawah ini, dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 11.198.052.894,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 12.381.322.467,- dengan realisasi sebesar Rp 10.047.990.664,- atau 81.15 %.

No	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.770.003.149,-	8.930.508.607,-	100	82.92
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.594.758,-	29.745.100,-	100	85.98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.995.878,-	9.137.500,-	100	91.41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.598.880,-	20.607.600,-	100	83.77
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.459.592.339,-	5.921.430.154,-	100	79.38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.592.919,-	5.906.752.254,-	100	79.34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.999.420,-	14.677.900,-	100	97.86
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.651.500,-	73.025.000,-	100	61.55

	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70.651.500,-	63.650.000,-	100	90.09
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000,-	9.375.000,-	100	19.53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.397.533.807,-	2.249.370.945,-	100	93.82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.976.799,-	13.270.200,-	100	88.61
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.769.906,-	644.565.025,-	100	90.30
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.787.102,-	47.447.200,-	100	85.05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,-	1.800.000,-	100	60.00
	Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-	10.000.000,-	100	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.600.000.00,-	1.532.288.520,-	100	95.77
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.630.745,-	459.945.756,-	100	95.70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.000.000,-	106.816.866,-	100	89.76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.630.745,-	353.128.890,-	100	97.65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.000.000,-	196.991.652,-	100	70.61

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-	15.102.500,-	100	50.34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.900.000,-	81.783.600,-	100	60.18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.100.000,-	100.105.552,-	100	88.51
2.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.340.718.103,-	866.993.957,-	100	64.67
	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	1.062.732.737,-	646.533.957,-	100	60.84
	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota	1.062.732.737,-	646.533.957,-	100	60.84
	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	99.010.000,-	100	99.01
	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	99.010.000,-	100	99.01
1	Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah	177.985.366,-	121.450.000,-	100	68.24

	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	177.985.366,-	121.450.000,-	100	68.24
3.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	270.601.215,-	250.488.100,-	100	92.57
	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	49.182.463,-	46.338.100,-	100	94.22
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	7.786.731,-	7.108.000,-	100	91.28
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	10.185.650,-	9.563.500,-	100	93.89
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	8.012.333,-	7.742.500,-	100	96.63
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan	23.197.749,-	21.924.100,-	100	94.51

	manusia				
	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.469.000,-	152.114.000,-	100	92.49
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	78.524.000,-	76.949.000,-	100	97.99
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	24.500.000,-	16.570.000,-	100	67.63
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	56.950.000,-	54.475.000,-	100	95.65
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.495.000,-	4.120.000,-	100	91.66
	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	56.949.752,-	52.036.000,-	100	91.37
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD,	5.644.876,-	5.582.000,-		98.89

	RPJMD & RKPD)				
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	10.764.876,-	10.594.000,-		98.41
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	31.420.000,-	26.740.000,-		85.11
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	9.120.000,-	9.120.000,-		100.00

Untuk mencapai program didukung dengan jumlah SDM sebanyak 27 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang Eselon III, 3 orang Eselon IV, 8 orang Pejabat Fungsional dan 10 orang pelaksana dan 14 orang PTT.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 3 Program, 13 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sesuai tabel dibawah ini, dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 7.893.014.256,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 9.207.822.041,- dengan realisasi sebesar Rp 8.411.997.185,- atau 91.35 %.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.976.937.090,-	8.411.218.290,-	93,79	95,24
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	9.999.501,-	89,91	100

	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,-	4.999.501,-	83,45	100
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	5.000.000,-	96,38	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.809.154.465,-	6.290.154.465,-	95,62	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.799.156.390,-	6.279.156.390,-	95,62	100
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	9.998.075,-	10.998.075,-	96,65	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	15.000.000,-	4,00	66,67
	1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15.000.000,-	15.000.000,-	4,00	66,67
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	622.061.246,-	1.140.021.316,-	89,52	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.655.959,-	24.655.959,-	92,46	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	119.434.449,-	103.286.519,-	85,72	100
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	54.500.838,-	55.608.838,-	90,57	100
	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	3.480.000,-	10,34	100
	5. Penyediaan Bahan/Material	0,-	13.000.000,-	100	100
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.990.000,-	939.990.000,-	89,95	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.524.698,-	324.880.141,-	93,26	100
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	66.524.698,-	324.880.141,-	93,26	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.277.417,-	469.277.417,-	92,54	100
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	120.352.500,-	118.352.500,-	71,53	100
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	350.924.917,-	99,62	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	104.943.647,-	161.885.450,-	66,04	100
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	11.998.152,-	14.048.716,-	97,22	100

	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	68.195.495,-	102.236.734,-	59,39	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.750.000,-	45.600.000,-	71,32	100
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	677.911.641,-	650.126.753,-	65,20	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	495.391.641,-	476.606.753,-	57,69	100
	1. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	495.391.641,-	476.606.753,-	57,69	100
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	98,65	100
	1. Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	98,65	100
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	82.520.000,-	73.520.000,-	68,39	100
	1. Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	82.520.000,-	73.520.000,-	68,39	100
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	116.141.641,-	146.476.998,-	67,52	100
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	39.999.289,-	29.085.036,-	70,85	100
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.900,-	4.121.889,-	82,09	100
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	14.999.775,-	7.439.775,-	67,03	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.954,-	4.999.954,-	78,47	100
	4. Pelaksanaan Monitoring dan	14.999.660,-	12.523.418,-	66,39	100

Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				
2 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38.755.096,-	80.373.231,-	58,20	100
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4.999.846,-	52.711.600,-	70,35	100
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14.999.432,-	8.905.813,-	78,66	100
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.764.611,-	3.764.611,-	53,79	53
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.991.207,-	14.991.207,-	4,40	100
3 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	37.387.256,-	37.018.731,-	85,15	100
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9.900.988,-	1.999.472,-	90,02	100
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.050.988,-	13.879.472,-	67,83	100
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3.565.140,-	16.389.647,-	96,91	100
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	13.870.140,-	4.750.140,-	93,14	100

Untuk mencapai program didukung dengan jumlah SDM sebanyak 27 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 5 orang Eselon III, 3 orang Eselon IV, 8 orang Pejabat Fungsional dan 10 orang pelaksana dan 13 orang PTT

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 11.198.052.894,- Anggaran perubahan Rp. 12.381.322.467,- kenaikan sekitar 10.57 %. Bila dibanding tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 34.47 %.

Dilihat dari capaian kinerja maka secara umum kinerja pada Indikator 1 Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 10.047.990.664,- atau mencapai 81.15 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target kinerja dapat tercapai meskipun anggaran yang direalisasikan atau yang terserap hanya berkisar 81.15 % lebih kecil dibanding capaian kinerja ini sebagian besar disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, proses rician capaian kinerja akan dibahas pada setiap indikator dibawah ini

Pencapaian indikator I yakni persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD pada tahun 2023 realisasinya sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2017 pada pasal 75 ayat 2 berbunyi Rencana awal RKPD Kabupaten/ Kota disusun berpedoman Pada RPJMD Kabupaten/ Kota, rancangan awal RKPD Provinsi, RKP, Program strategis nasional dan pedoman penyusunan RKPD, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{jumlah program pada RKPD tahun 2023}}{\text{jumlah program RPJMD tahun 2023}} \times 100\% \\ &= \frac{129}{129} \times 100 \% \\ &= 100 \% \end{aligned}$$

Pada indikator Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD, capaiannya masih stabil di angka 100% baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Sebagai data dukung yang menunjukkan

angka ini 100% terlampir daftar program yang ada di RKPD maupun RPJMD pada tabel berikut.

PROGRAM RPJMD				PROGRAM RKPD
No	PROGRAM PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006	No	PROGRAM KEPMENDAGRI 900.1.15.5.13.17 TAHUN 2023 PEMUTAKHIRAN	PROGRAM
1	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
2	PROGRAM PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN DAN PROMOSI KESEHATAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN	3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
4	PROGRAM PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR	7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

5	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PENGATURAN JASA KONSTRUKSI	12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
6	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN, PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
7	PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERALATAN LABORATORIUM	14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
8	PROGRAM PERENCANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN TATA RUANG	15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
9	PROGRAM PENANGANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
	PROGRAM PENANGANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
	PROGRAM PENANGANAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA

				DAN UTILITAS UMUM (PSU)
10	PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
11	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA	20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
12	PROGRAM PEMBINAAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN PEMADAMAN KEBAKARAN	21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
13	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
14	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA	24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
16	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL DAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
17	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	27	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

18	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
19	PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA	29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
20	PROGRAM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DAN HARMONISASI HUBUNGAN INDUSTRIAL	30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
21	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG DAN ANAK	31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
22	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK	33	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
23	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN.	34	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
24	PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	35	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
		36	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		37	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

		38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		39	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
		40	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
25	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	41	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	42	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
26	PROGRAM TATA KOTA DAN KEBERSIHAN	43	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
		44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
27	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	45	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
28	PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP	46	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN

				LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENATAAN DAN PENINGKATAN LINGKUNGAN HIDUP	47	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	48	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
	PROGRAM TATA KOTA DAN KEBERSIHAN	49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
29	PROGRAM PENDATAAN DAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	50	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
30	PROGRAM PENDATAAN DAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIIL	51	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL
31	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
32	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	53	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
33	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
34	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	55	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
35	PROGRAM ADVOKASI DAN PENGENDALIAN PENDUDUK	56	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

36	PROGRAM KELUARGA BERENCANA DAN PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA	57	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
		58	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
37	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	59	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
38	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	60	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
		61	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
39	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	62	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
40	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM	63	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM	64	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM	65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
		66	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI DAN UMKM	67	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
41	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DAERAH	68	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENGEMBANGAN INVESTASI DARAH	69	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
42	PROGRAM PENINGKATAN REALISASAI PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PELAKU JENIS USAHA	70	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENINGKATAN REALISASAI PERIJINAN DAN NON PERIJINAN PELAKU JENIS NON USAHA	71	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIJINAN PELAKU JENIS NON USAHA	72	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
43	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEPEMUDAAN	73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA	74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
		75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
45	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	76	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
46	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	77	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

47	PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN TENAGA KEBUDAYAAN	78	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
48	PROGRAM PENGEMBANGAN PELESTARIAN ADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH	79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN PELESTARIAN ADAT DAN KEBUDAYAAN DAERAH	80	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
49	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN TATA KELOLA LAYANAN PERPUSTAKAAN	81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
50	PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIAN DOKUMEN / ARSIP DAERAH	82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
		83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
		84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
		85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
51	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
52	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
		89	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

			PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
53	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
54	PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PANGAN	91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
55	PROGRAM PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	92	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
56	PROGRAM KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	93	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
		94	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
		95	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
57	PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN	96	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		97	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
58	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	98	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN,	99	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG

	PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN		KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	101	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
	PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	102	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
59	PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBERDAYA INDUSTRI, PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI, PROGRAM PEMBERDAYAAN INDUSTRI UNGGUAN DAERAH	103	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
60	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	104	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI	105	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
61	PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAHAN	106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
62	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN FASILITASI PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAERAH	107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

63	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
64	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
65	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
66	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN PBB DAN BPHTB	113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
		114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
67	PROGRAM PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN FORMASI APARATUR	115	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
68	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
69	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
70	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN	118	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,

	SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN		PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
71	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
72	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	120	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
		121	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
73	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
74	PROGRAM PEMBINAAN IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	124	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
75	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENYULUHAN PENDIDIKAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT	125	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
76	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	126	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA, KEMASYARAKATAN DAN EKONOMI	127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

77	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWASPADAAN NASIONAL	128	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
78	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sumber : RKPD 2023 dan RPJMD 2018-2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat pemutahiran program dari Permendagri 13 tahun 2006 menjadi program berdasarkan Kepmendagri 900.1.15.5.13.17 tahun 2023, dapat dilihat jumlah program pada Permendagri 13 tahun 2006 berjumlah 78 program dan pada pemutahiran terakhir Kepmendagri 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023 berjumlah 129. Bisa kami informasikan tahun 2023 untuk pemutahiran pada permendagri 90 tahun 2020 ada pemutahiran pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 dan terakhir pemutahiran pada Kemendagri pemutahiran terakhir Kepmendagri 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023 tidak ada lagi perubahan program, hanya terdapat pada kegiatan dan sub kegiatan pemutahiran, jadi pada program tidak berpengaruh secara keseluruhan, masih keselarasan program sesuai dengan target 129 program.

Secara umum pencapaian kinerja indikator Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan, meskipun dalam prosesnya ada berbagai permasalahan yang dihadapi seperti tidak meratanya kapasitas aparatur perencana pada SKPD. Sedangkan faktor pendukung dari tercapainya target antara lain adanya aplikasi SIPD yang membantu daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan walaupun masih ada kendala dalam implementasinya. Kedepannya diharapkan

perlu komitmen pimpinan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur yang menangani perencanaan di SKPD.

Keberhasilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kinerja tahun 2023 ditunjukkan dengan tercapainya target-target indikator yang telah ditetapkan, Persentase perencanaan RKPD dengan RPJMD terdiri atas: Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Bidang Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, dan Bidang Perencanaan Makro dimana indikator ini untuk melihat apakah antara Program RKPD sesuai dengan Program RPJMD yang akan disusun. Adapun jadwal tentatif penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD)



Kegiatan FGD penentuan tema dan skala prioritas

JADWAL TENTATIF PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2023

NO	Uraian kegiatan/tahapan	Nov-22				Dec-22				Jan-23				Feb-23				Mar-23				Apr-23				May-23				Jun-23				Jul-23			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan dan Kompilasi Bahan untuk Draf Ranwal RKPD 2024/ FGD :		■																																		
2	Identifikasi Masalah dan RKBMD SKPD dan Kecamatan		■	■	■	■																															
3	FGD Penentuan Tema dan Skala Prioritas Tahun 2024						■																														
4	Entry Hasil Musrenbang Desa/ Kelurahan ke SIPD										■	■																									
5	Data Sementara Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2024											■	■																								
6	Verifikasi usulan Desa/ Kelurahan Oleh Pokja Bappeda										■	■																									
7	Surat Permintaan Data Pokir DPRD										■	■																									
8	Penyampaian Surat Edaran Bupati tentang Rancangan Awal Renja sekaligus Perencanaan DAK Fisik dan Non Fisik 2024 ke SKPD										■	■																									
9	Forum Konsultasi Publik											■																									

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan 100 % capaian terhadap target yang mana masih ada penyebab beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :
 1. Lambatnya SKPD dalam melakukan penginputan ke Sistem;
 2. Permasalahan bidang-bidang yang kurang terhadap koordinasi SKPD binaan masing-masing.
 3. kurangnya operator dalam melakukan
- b. Solusi :
 1. Lebih cermat lagi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran disesuaikan dengan kondisi yang ada;
 2. Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan SKPD;
 3. Agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab.
- c. Rencana aksi

Dalam hal ini rencana aksi yang diterapkan seperti dilakukan survey dan rapat dengan SKPD terkait terlebih dahulu untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, untuk penganggaran makan

minum dipusatkan ke sekretariat dan untuk kegiatan yang memang belum dapat dilaksanakan dikarenakan masih kurang stabilnya proses pendemik. Selain itu permasalahan Sumber Daya Manusia khususnya SDM perencana yang dirasa masih kurang baik dalam hal pelatihan untuk menambah wawasan dibidang perencanaan, diharapkan kedepannya permasalahan ini dapat segera terselesaikan.

Sasaran eselon II : Meningkatnya Kesesuaian perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.

Indikator II : Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sesuai table dibawah ini, dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 181.435.850,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 325.668.521,- dengan realisasi sebesar Rp 297.560.000,- atau 91.37 %.

No	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Target (%)	Realisasi (%)
1.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	325.668.521,-	297.560.000,-	100	91,37
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	24.612.048 ,-	109.275.000,-	100	87,69
	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	124.612.048,-	109.275.000,-	100	87,69
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	89.965.523,-	84.050.000,-	100	93,42
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	89.965.523,-	84.050.000,-	100	93,42
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	111.090.950,-	104.235.000,-	100	93,83
	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	111.090.950,-	104.235.000,-	100	93,83

Untuk mencapai program didukung dengan jumlah SDM sebanyak 5 orang terdiri dari 1 orang Eselon III, 1 orang Pejabat Fungsional dan 2 orang pelaksana dan 1 orang PTT.

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan 1 (satu) Program, 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan sesuai table dibawah ini, dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 135.905.488,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 44.236.413,- dengan realisasi sebesar Rp 32.210.600,- atau 72.81 %.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi	
				Keuangan (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	135.905.488,-	44.236.413,-	72,81	100
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	40.586.701,-	0,-	0	0
	1. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	40.586.701,-	0,-	0	0
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	45.320.000,-	15.010.000,-	35,22	100
	1. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	45.320.000,-	15.010.000,-	35,22	100
3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	49.998.787,-	29.226.413,-	92,12	100
	1. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	49.998.787,-	29.226.413,-	92,12	100

Untuk mencapai program didukung dengan jumlah SDM sebanyak 4 orang terdiri dari 1 orang Eselon III, 2 Orang Peneliti dan 1 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 181.435.850,- Anggaran perubahan Rp. 325.668.521,- Kenaikan sekitar 79.5%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami Kenaikan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 44.236.413 atau diatas 100 %.

Dilihat dari capaian kinerja maka secara umum kinerja pada Indikator 2 Persentase hasil kajian bidang perencanaan yang ditindaklanjuti telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 297.560.000,- atau mencapai 91.37 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target kinerja dapat tercapai meskipun anggaran yang direalisasikan atau yang terserap hanya berkisar 91.37 % lebih kecil dibanding capaian kinerja ini sebagian besar disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, proses rician capaian kinerja akan dibahas pada setiap indikator dibawah ini

Pencapaian indikator 2 yakni persentase hasil kajian bidang perencanaan yang ditindaklanjuti pada tahun 2023 realisasinya sebesar 100% dan mencapai target yang ditetapkan sebesar 100% berdasarkan hasil kajian yang ditindaklanjuti oleh SKPD seluruh Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan hasil kajian SKPD tahun 2023 sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Dari table hasil kajian bidang perencanaan SKPD Tahun 2023 yang berjumlah 9 kajian, telah ditindaklanjuti oleh SKPD sebanyak 9 kajian pada table dibawah ini ;

Tabel Penelitian dan Kajian Tahun 2023

NO	URAIAN	NAMA PELAKSANA	TAHUN
1	KAJIAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN POTENSI UMKM, PARIWISATA, PERTANIAN, dan PERIKANAN di DESA PANDAHAN dan BANYU IRANG KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023	LPPM UNISKA	2023
2	KAJIAN PERMASALAHAN IRIGASI DAN SAWAH DI LOKSERAPANG PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023	LPPM UNISKA	2023
3	KAJIAN POTENSI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT	LPPM ULM	2023
4	KAJIAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN TANAH LAUT	POLITALA	2023
5	DOKUMEN KLHS RDTR WP TAMBANG ULANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2023
6	RANCANAGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) REVISI RTRW KABUPATEN TANAH LAUT	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2023
7	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KAB. TANAH LAUT TENTANG KERJASAMA DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	BIRO HUKUM PROV. KALSEL	2023

	SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
8	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KAB. TANAH LAUT TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	BIRO HUKUM PROV. KALSEL	2023
9	DOKUMEN KAJIAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA BANJIR KABUPATEN TANAH LAUT	LPPM ULM BANJARMASIN	2023

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	2020	70	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			80	80		
2022			90	100		
2023			100	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan peningkatan capaian terhadap target yang mana masih disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. Kesulitan dalam pengumpulan/permintaan data kepada SKPD;
 2. Kurangnya pemahaman kepada SKPD pentingnya kajian/penelitian yang sebenarnya sangat berpengaruh pada pembangunan.
- b. Solusi :
 1. Senantiasa memberikan himbauan pada setiap kesempatan bertemu dengan SKPD akan pentingnya kajian yang akan dilakukan oleh Bappeda.
 2. Mengalokasikan waktu lebih banyak untuk mengumpulkan data dalam arti meminta data jauh-jauh hari ke SKPD sehingga SKPD mempunyai waktu untuk menyiapkan data yang diminta.
- c. Rencana aksi
 1. Melaksanakan rapat Internal dengan seluruh bidang-bidang di BAPPEDA.
 2. Melibatkan unsur pimpinan tertinggi dalam penandatanganan surat undangan.

3. Rapat koordinasi dengan konsultan Terkait data yang diperlukan.

4. Menyusun jadwal follow-up perkembangan hasil kajian.

Kepala Bappeda mengampu 4 Program untuk mewujudkan sasaran strategis Bappeda yaitu Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah. Adapun Program-program yang diampu oleh Kepala Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp.)	Perubahan (Rp.)	Realisasi Anggaran	Target	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.149.415.083,-	1.340.718.103,-	866.993.957,-	100	64.67
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	152.636.463,-	270.601.215,-	250.488.100,-	100	92.57
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.896.001.348,-	10.770.003.149,-	8.930.508.607,-	100	82.92
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	181.435.850,-	325.668.521,-	297.560.000,-	100	91.37
		Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti						

b. Kendala

Berdasarkan tabel pada analisis, Akuntabilitas Kinerja Kepala Bappeda dapat dilihat dari serapan anggaran dan realisasi fisik kegiatan dari 4 Program yang dilaksanakan target 100 persen yang dimuat dalam perjanjian kinerja.

Namun, apabila dilihat dari realisasi fisik kegiatan maka data realisasi fisik yang dicapai menunjukkan semua program kegiatan mencapai 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target fisik kegiatan dapat tercapai meskipun dana yang terserap hanya berkisar 81,42%. Penyerapan anggaran yang lebih kecil dibanding realisasi fisik ini sebagian besar tidak terserap dari kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan ASN, Makan minum kegiatan, narasumber, tidak dapat direalisasikan. Dengan kata lain, terjadi efisiensi anggaran, dimana biaya yang semestinya dikeluarkan bisa tidak perlu dikeluarkan, namun hasil yang ingin dicapai tetap dapat diperoleh. Dengan demikian, berdasarkan skala yang sudah disampaikan diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bappeda Tanah Laut dilihat dari sisi serapan anggaran dapat dikatakan berkategori TINGGI, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi realisasi fisik kegiatan.

3. Akuntabilitas Kinerja Sekretaris Badan.

a. Analisis

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.

Sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023 yang telah disusun Sekretariat BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja.

Tahun 2023, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan 1 Program, 6 (enam) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni Sebesar 9.896.001.348, APBD Perubahan Rp 10.770.003.149,- dan terealisasi sebesar Rp 8.930.508.607,- atau 82,92 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 19 orang terdiri dari 1 orang eselon III, 3 orang Eselon IV, 7 Orang pelaksana dan 8 orang PTT

Tahun 2022, untuk mencapai sasaran ini telah dilaksanakan dengan beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 7 (tujuh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 7.098.960.974,- APBD perubahan sebesar Rp 8.411.218.290,- dan terealisasi sebesar Rp 7.889.206.077,- atau 93,79 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM Kesekretariatan sebanyak 19 orang terdiri dari 1 orang eselon III, 3 orang Eselon IV, 7 orang pelaksana dan 8 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 9.896.001.348,-. Anggaran perubahan Rp. 10.770.003.149,- Kenaikan sekitar 8.83 %. Bila dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 21,90%.

Dilihat dari capaian kinerja maka secara umum kinerja pada sekretariatan telah tercapai 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp 8.930.508.607,- atau mencapai 82,92 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa target-target kinerja dapat tercapai meskipun anggaran yang direalisasikan atau yang terserap hanya berkisar 82,92 % lebih kecil dibanding capaian kinerja ini sebagian besar disebabkan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan, rician capaian kinerja akan dibahas pada setiap indikator dibawah ini

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan	2020	100	100	Persentase capaian sesuai
			2021	100	100	

		Umum dan Kepegawaian	2022	100	100	dengan target (100)
			2023	100	100	
		Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	100	100	
			2022	100	100	
			2023	100	100	
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	100	100	
			2022	100	100	
			2023	100	100	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	2020	74 (BB)	85,49	Nilai yang ditargetkan sudah secara katagori tercapai
			2021	75 (BB)	80,16	
			2022	76 (BB)	77,2	
			2023	77 (BB)	74,55	

Sasaran eselon III : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD

Indikator 1 : Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% ,untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan , yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 2.110.914.251,- APBD perubahan sebesar Rp 3.275.816.052,- dan terealisasi sebesar Rp 2.979.333.353,- atau 91 %. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana dan 8 orang PTT.

Tahun 2022, indikator ini telah tercapai 100% , untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 5 (lima) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 1.279.807.008,- APBD perubahan 2.111.064.324 dan terealisasi sebesar Rp 1.865.304.834,- atau 88,35 % Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana dan 8 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 2.110.914.251,- Anggaran perubahan Rp. 3.275.816.052,- Kenaikan sekitar 55.19%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 55.17%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan yang berhubungan dengan administrasi umum, dan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan didukung dengan beberapa kegiatan, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, administrasi penatausahaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan, pencatatan, diantaranya administrasi 990 surat masuk , 729 surat keluar, 292 Surat Tugas, 1135 SPPD dan 46 Laporan penatausahaan aset/Barang Milik Daerah dan lain-lain,terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023
- 2) Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, SK PTT, SK PPTK, SK Verifikator, SK Pembantu Pengurus Barang, SK PPK, SK Penatausahaan Keuangan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Cuti Pegawai Usulan PLH, Ujian Dinas, Ujian Kompetensi, Izin Belajar, Usulan Pencantuman Gelar yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa Alat penyimpan Perlengkapan Kantor, Alat Pembersih, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Kursi Kerja Pejabat,

Peralatan Studio Vidio dan Film, System /Power Suply, Personal Komputer yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

- 4) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor. Dilaksanakan secara rutin sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang tercatat di Kartu Inventaris Barang Bappeda Kabupaten Tanah Laut pengadaan sampai dengan 2022
- 5) Kegiatan yang mendukung fasilitasi Rapat-rapat dan koordinasi dengan instansi terkait melalui Sinergitas Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan secara rutin dan sesuai kebutuhan.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut ada beberapa kendala, solusi dan rencana aksi seperti :

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. Kurang cermatnya dalam pengelolaan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.
 2. Masih Kurangnya SDM sesuai Anjab dan peta jabatan pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut
- b. Solusi :
 1. Melaksanakan atau mengikuti pelatihan/sosialisasi/bimtek berkaitan dengan tupoksi pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian lebih cermat lagi dalam pengelolaan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya.
 2. Optimalisasi Koordinasi dengan SKPD terkait agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab

Rencana aksi

1. Secara berkelanjutan mengajukan penganggaran berkaitan dengan Bimtek/pelatihan/sosialisasi selain itu juga akan mengembangkan aplikasi untuk administrasi umum maupun kepegawaian.
2. Meningkatkan upaya koordinasi dalam pengusulan tambahan ASN yang berkompenten sesuai anjab Umum dan Kepegawaian.

Indikator 2 : Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan berkaitan dengan telah tersusunnya 6 Dokumen Perencanaan yaitu RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja dan Renja Perubahan, terealisasikannya semua dokumen perencanaan tersebut dalam satu tahun berjalan dan 5 laporan yang terdiri dari Lakip, LKPJ, LPPD, RB dan SPIP yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember untuk mencapai indikator 2 ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni Rp 19.994.758,- APBD perubahan 34.594.758 dan terealisasi sebesar Rp 29.745.100,- atau 85,98 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Perencanaan sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana.

Tahun 2022, indikator ini juga telah tercapai 100% untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 9.999.501,- dan APBD perubahan sebesar Rp. 9.999.501,- dan terealisasi sebesar Rp 8.991.000,- atau 89,91 % Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Perencanaan sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang staf pelaksana dan 1 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 19.994.758,- dan Anggaran perubahan sebesar Rp. 34.594.758,- sehingga ada peningkatan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 14.600.000,- atau 73.02%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 24.595.257,- sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Perencanaan mengalami pengurangan sebanyak 1 orang PTT

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran 2, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

1. SDM yang ada masih belum memahami kegiatan yang dilaksanakan karena pada Subbag Perencanaan hanya dibantu oleh 1 orang PTT
2. Masih Kurangnya sarana dan praarana pendukung kinerja

b. Solusi :

1. Optimalisasi koordinasi dengan SKPD terkait perihal penambahan ASN di Lingkup Bappeda Kab. Tanah Laut khususnya pada Sub Bag Perencanaan sesuai dengan anjab dan peta jabatan maupun untuk mengajukan usulan penganggaran untuk melaksanakan maupun mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi terkait tupoksi
2. Optimalisasi Koordinasi dengan SKPD maupun Bidang terkait dengan penganggaran untuk upaya melengkapi sarana prasaran pendukung kinerja

c. Rencana aksi

1. Meningkatkan upaya koordinasi berkelanjutan dalam pengusulan tambahan ASN yang berkompenten sesuai anjab Sub Bag Perencanaan
2. Mengajukan usulan penganggaran sarana prasarana pendukung kinerja yang baik dan layak bagi sub bag Perencanaan

Indikator 3 : Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan dengan telah tersusunnya 5 Dokumen Laporan Keuangan yaitu laporan Bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, CALK yang disusun secara berkala sesuai dengan periodiknya, untuk mencapai indikator 3 ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan 1 Program, 1 kegiatan, dan 2 sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 7.765.092.339,- dan anggaran APBD Perubahan sebesar Rp. 7.459.592.339,- dan terealisasi sebesar Rp 5.921.430.154,- atau 79.38 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bag Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Tahun 2022, indikator ini juga telah tercapai 100% untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 5.809.154.465 dan Anggaran APBD Perubahan Rp. 6.290.154.465,- dan terealisasi sebesar Rp 6.014.910.243,- atau 95.62 % Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 7.765.092.339,- dan penurunan pada Anggaran perubahan

sebesar Rp. 7.459.592.339,- sehingga adanya pengurangan pada APBD Perubahan sebesar 3.86%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah realisasi anggaran sebesar 1,55 % sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan tidak mengalami Penambahan maupun pengurangan

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran 3, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Adanya pergantian sistem keuangan
- 2) SDM yang belum banyak mengetahui tentang sistem keuangan yang baru
- 3) Jaringan internet yang lambat

Solusi :

- 1) Optimalisasi Koordinasi dengan SKPD pengampu aplikasi baru untuk melakukan pembelajaran terkait aplikasi keuangan yang baru
- 2) Mengajukan usulan penganggaran untuk melaksanakan maupun mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi terkait pelatihan apabila ada pergantian sistem keuangan
- 3) Bandwith internet perlu ditambah

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak koordinasi kepada SKPD yang mengurus masalah keuangan terkait penggunaan sistem
- 2) Penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi SDM
- 3) Peningkatan atau mengadakan jaringan yang memadai serta koordinasi berkelanjutan dengan SKPD pengampu Jaringan Internet pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Indikator 4 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 2023, Nilai Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2023 adalah 74,55 dengan capaian dibawah nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 77,00 untuk mencapai indikator 4 ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Sekretariat Bappeda Kabupaten Tanah Laut, yaitu dengan 1 (satu) Program dengan 6 (enam) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni Program sebesar Rp 9.896.001.348,- APBD perubahan sebesar 10.770.003.149 dan terealisasi sebesar Rp 8,930,508,607,- atau 82.92%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Perencanaan sebanyak 3 PNS, sub Keuangan 4 PNS, dan Sub Umum dan Kepegawaian 3 PNS dan 8 orang PTT.

Tahun 2022, Nilai Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2022 adalah 77.2 dengan capaian diatas nilai yang ditargetkan yaitu sebesar 76,00 untuk mencapai indikator 4 ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada sekretariat Bappeda Kabupaten Tanah Laut, yaitu dengan 1 (satu) Program dengan 7 (tujuh) kegiatan, dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni Program sebesar Rp 7.098.960.974,- APBD perubahan sebesar 8.411.218.290 dan terealisasi sebesar Rp 7,889,206,077,- atau 93.79 %

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Perencanaan sebanyak 3 PNS, sub Keuangan 4 PNS, dan Sub Umum dan Kepegawaian 3 PNS dan 8 orang PTT.

Bila dibanding tahun 2022 Nilai Akuntabilitas Bappeda Kabupaten Tanah Laut mengalami penurunan dari 77.2 menjadi 74,55 pada tahun 2023 sedangkan jumlah SDM yang mendukung mengalami pengurangan

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran 4, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
			2020	74	85,49	

	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah	2021	75	80.16	Capaian kinerja diatas dari target yang telah ditentukan
			2022	76	77,2	
			2023	77	74.55	

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dalam **pencapaian sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah SKPD Bappeda** antara lain :

1. Pengarsipan data-data pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya belum tertib
2. Keterbatasan SDM yang memiliki kemampuan sesuai dengan penempatan

Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Sosialisasi tata cara pengarsipan data dilingkup Bappeda Kabupaten Tanah Laut
2. Optimalisasi pembinaan dan pendampingan SDM di Sub Bag perencanaan dalam melaksanakan tupoksi

Sedangkan untuk rencana aksi yang akan dilakukan antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pelaksanaan bimtek/pelatihan tata cara pengarsipan data yang baik dan benar.
2. Mengikutsertakan SDM untuk mengikuti sosialisasi /bimtek /workshop sesuai tupoksi masing-masing.

Sekretaris Bappeda mengampu 1 Program untuk mewujudkan sasaran Kinerja Sekretaris Bappeda yaitu Meningkatkan akuntabilitas kinerja SKPD. Adapun program yang diampu oleh Sekretaris Bappeda dan realisasinya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	Fisik (%)	Realisasi (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.770.003.149,-	8.930.508.607,-	100	82.92
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.594.758,-	29.745.100,-	100	85.98

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.995.878,-	9.137.500,-	100	91.41
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.598.880,-	20.607.600,-	100	83.77
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.459.592.339,-	5.921.430.154,-	100	79.38
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.444.592.919,-	5.906.752.254,-	100	79.34
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.999.420,-	14.677.900,-	100	97.86
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118.651.500,-	73.025.000,-	100	61.55
Pengadaan pakaian dinas berserta atribut kelengkapannya	70.651.500,-	63.650.000,-	100	90.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48.000.000,-	9.375.000,-	100	19.53
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.397.533.807,-	2.249.370.945,-	100	93.82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.976.799,-	13.270.200,-	100	88.61
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713.769.906,-	644.565.025,-	100	90.30
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.787.102,-	47.447.200,-	100	85.05
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,-	1.800.000,-	100	60.00
Penyediaan Bahan/Material	10.000.000,-	10.000.000,-	100	100.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.600.000.00,-	1.532.288.520,-	100	95.77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480.630.745,-	459.945.756,-	100	95.70
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119.000.000,-	106.816.866,-	100	89.76
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.630.745,-	353.128.890,-	100	97.65
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	279.000.000,-	196.991.652,-	100	70.61

Pemerintahan Daerah				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.000.000,-	15.102.500,-	100	50.34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135.900.000,-	81.783.600,-	100	60.18
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113.100.000,-	100.105.552,-	100	88.51

b. Kendala

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Sekretaris Bappeda mengampu 1 program yang dilaksanakan jika dirata-ratakan dengan program yang dilaksanakan tersebut maka serapan anggaran dari 1 program tersebut mencapai 82.92% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 93.07 ini maka akuntabilitas kinerja Sekretaris Bappeda berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan berkategori sangat tinggi, dari sisi serapan anggaran, dan berkategori sangat tinggi pula dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan dan kinerja.

Dengan ketersediaan sumber daya manusia yang ada, maka dalam hal ini untuk pencapaian target sekretaris yang dibantu oleh beberapa kasubbag/ eselon IV dan dapat dijabarkan pada penjelasan berikut :

1) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian

a. Analisis

Sub Bag Umum dipimpin oleh seorang Kasub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian

Tahun 2023, Sasaran Strategis Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen

administrasi Umum SKPD dengan target 2587 dokumen telah teralisasi 3192 dan Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD dengan indikator Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD dengan target 69 dokumen telah tercapai sebanyak 69 Dokumen sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah tercapai 100% ,sasaran ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 4 (empat) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 2,110,914,251,- dan APBD Perubahan 3,275,816,052 terealisasi sebesar Rp 2,979,333,353 atau 90.95%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana dan 8 orang PTT.

Tahun 2022, indikator ini telah tercapai 100%, untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 5 (lima) kegiatan, dan 13 (tiga belas) sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 1,279,807,008,- dan APBD Perubahan 2,111,064,324 terealisasi sebesar Rp 1,865,304,834 atau 88.35% Untuk mencapai kegiatan ini didkung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana dan 7 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 2,110,914,251,- Anggaran perubahan Rp. 3,275,816,052,- Kenaikan sekitar 55,18%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan dari jumlah anggaran sebesar 55,17%.

Dari hasil capaian realisasi tersebut ada beberapa kendala, solusi dan rencana aksi seperti :.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 1. Kurang cermatnya dalam pengelolaan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian.

2. Masih Kurangnya SDM sesuai Anjab dan peta jabatan pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut

b. Solusi :

1. Melaksanakan atau mengikuti pelatihan/sosialisasi/bimtek berkaitan dengan tupoksi pengelolaan administrasi urusan umum dan kepegawaian lebih cermat lagi dalam pengelolaan administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian disesuaikan dengan kondisi setiap tahunnya.
2. Optimalisasi Koordinasi dengan SKPD terkait agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab

c. Rencana aksi

1. Secara berkelanjutan mengajukan penganggaran berkaitan dengan Bimtek/pelatihan/sosialisasi selain itu juga akan mengembangkan aplikasi untuk administrasi umum maupun kepegawaian.
2. Meningkatkan upaya koordinasi dalam pengusulan tambahan ASN yang berkompeten sesuai anjab Umum dan Kepegawaian.

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kasubbag Umum dan Kepegawaian Bappeda Tanah Laut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	2587	3192	2587	5628	Persentase capaian sesuai target 100%
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	69	69	69	69	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD
Indikator 1 : Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD

Tahun 2023, Sasaran Strategis Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD dengan target 2587 dokumen telah teralisasi

5628 sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada indikator ini telah tercapai melebihi 100% **Tahun 2022**, Sasaran Strategis Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD dengan target 2587 dokumen telah teralisasi 3192 sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada indikator ini telah tercapai lebih 100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah, yaitu :

- 1) Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, administrasi penatausahaan barang milik daerah, perencanaan kebutuhan, pencatatan, diantaranya administrasi 1055 surat masuk , 714 surat keluar, 445 Surat Tugas, 2010 SPPD dan 1404 Surat Undangan, terkait dengan tugas dan fungsi yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023
- 2) Kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan sarana kantor berupa Alat penyimpan Perlengkapan Kantor, Alat Pembersih, Alat Pendingin, Alat Rumah Tangga Lainnya, Kursi Kerja Pejabat, Peralatan Studio Vidio dan Film, System /Power Suply, Personal Komputer yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- 3) Kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sarana kantor. Dilaksanakan secara rutin sesuai dengan kondisi sarana prasarana yang tercatat di Kartu Inventaris Barang Bappeda Kabupaten Tanah Laut pengadaan sampai dengan 2023

Tabel daftar administrasi Umum Tahun 2023

No	Jenis Dokumen	Jumlah
1	Surat Masuk	1055
2	Surat Keluar	714
3	SPPD	2010
4	Surat Undangan	1404
4	Surat Tugas	445
5	Laporan Dokumen Asset	
	JUMLAH	5628

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	2587	3192	2587	5628	Persentase capaian sesuai target 100%

Indikator 2 : Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD

Tahun 2023, Sasaran Strategis Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD dengan indikator Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD dengan target 69 dokumen telah tercapai sebanyak 69 Dokumen sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah tercapai 100%

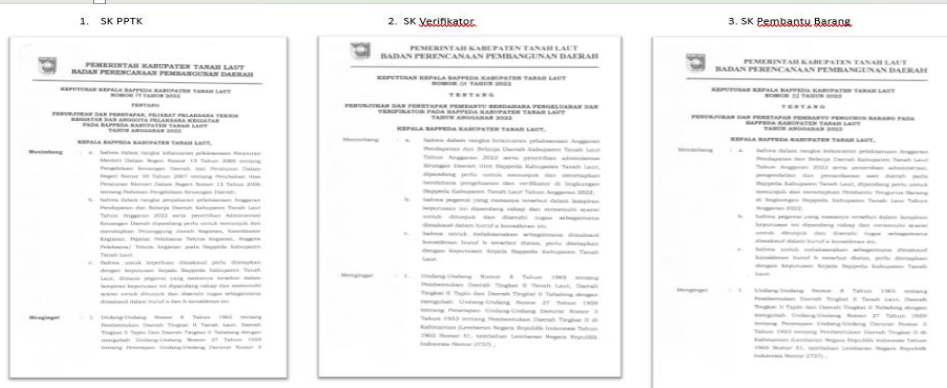
Tahun 2022, Sasaran Strategis Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD dengan indikator Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD dengan target 69 dokumen telah tercapai sebanyak 69 Dokumen sehingga secara keseluruhan capaian kinerja pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian telah tercapai 100%

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator tersebut adalah Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, SK PTT, SK PPTK, SK Verifikator , SK Pembantu Pengurus Barang, SK PPK, SK Penatausahaan Keuangan, SK Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa , Cuti Pegawai Usulan PLH, Ujian Dinas, Ujian Kompetensi, Izin Belajar, Usulan Pencantuman Gelar yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember

Tabel daftar administrasi Kepegawaian Tahun 2023

No	Jenis Dokumen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
1	SK PTT Tahun 2023	14												14
2	SK PPTK 2023	1												1
3	SK Verifikator 2023	1												1
4	SK Pembantu Barang 2023	1												1
5	SK PPK 2022	1												1
6	SK Penatausahaan Keuangan 2023	1												1
7	SK Pejabat Barang Jasa 2023	1												1
8	Kenaikan Gaji Berkala	9	2	3				1					1	16

9	Kenaikan Pangkat					3					1			4
10	Cuti		1		1	1					3		2	8
11	Usulan Plh						1			4				5
12	Ujian Dinas	1												1
13	Ujian Kompetensi JFT							1						1
14	Izin Belajar													0
15	Usulan Pencantuman Gelar													0
16	Daftar Urutan Kepangkatan 2023	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
17	SK PLT											1		1
18	SK Tenaga Ahli											1		1
Jumlah		31	4	4	5	2	2	3	1	5	7	1	4	69



Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	69	69	69	69	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target dan tidak ada kendala yang ditemui karena semua yang dilaksanakan bersifat rutin

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
----	---------	-------------------	-------------------------	---------------	--------------------	------------	---------------

1.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.140.021.316,-	1.020.566.663,-	100%	89,52
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.655.959,-	22.798.000,-	100 11 jenis 1 Jenis	92,46 11 jenis 1 Jenis
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	103.286.519,-	88.532.347,-	100 72 jenis	85,72 72 jenis
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.608.838,-	50.362.928,-	100 6 jenis	90,57 6 Jenis
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.480.000,-	360.000,-	100 1 Jenis	10,34 1 Jenis
			Penyediaan Bahan/Material	13.000.000,-	13.000.000,-	100 2 Event	100 2 Event
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939.990.000,-	845.513.388,-	100 561 Kali 200 Kali	89,95 300 kali 80 kali
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469.277.417,-	434.253.071,-	100%	92,54
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118.352.500,-	84.658.922,-	100 3 jenis	71,53 3 Jenis
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350.924.917,-	349.594.149,-	100 24 jenis 14 Orang	99,62 24 jenis 14 Orang
2.	Melaksanakan Pengelolaan Urusan	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000,-	600.000,-	100	4,00

Kepegawaian SKPD	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000,-	600.000,-	100 3 ASN	4,00 2 ASN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.880.141,-	302.984.000,-	100	93,26
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	324.880.141,-	302.984.000,-	100 25 Jenis	93,26 25 Jenis
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.885.450,-	106.901.100,-	100	66,04
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.048.716,-	13.658.500,-	100 1 Unit	97,22 1 Unit
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.236.734,-	60.720.100,-	100 10 unit 6 unit	59,39 10 unit 6 unit
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45.600.000,-	32.522.500,-	100 7 Jenis	71,32 7 Jenis

Dari tabel analisis dapat diketahui bahwa Kasubbag. Umum dan Kepegawaian mengampu 5 Kegiatan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD dengan

indikator Kinerja Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD, dan Kinerja Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD yang diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian SKPD.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Umum dan Kepegawaian pada tahun 2023 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,397,533,807,-	2,249,370,945,-	100%	93.82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	14,976,799,-	13,270,200,-	100 1 paket	88.61 1 paket
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.	713,769,906,-	644,565,025,-	100 15 paket	90.30 15 paket
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,787,102,-	47,447,200,-	100 2 paket	85.05 2 paket
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000,-	1,800,000,-	100 1 Jenis	60.00 1 Jenis
	Penyediaan Bahan/Material	10,000,000,-	10,000,000,-	100 1 Paket	100 1 Paket
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,600,000,000,-	1,532,288,520,-	100 300 laporan	95,77 300 laporan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	480,630,745,-	459,945,756,-	100%	95,70
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	119,000,000,-	106,816,866,-	100 12 laporan	89,76 12 laporan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361,630,745,-	353,128,890,-	100 12 laporan	97,65 12 laporan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	118,651,500,-	73,025,000,-	100	61,55
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	70,651,500	63,650,000	100 2 paket	90,09 2 paket
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	48,000,000,-	9,375,000,-	100 2 ASN	19,53 2 ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279,000,000,-	196,991,652,-	100	66,04

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000,-	15,102,500,-	100 1 Unit	50,34 1 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135,900,000,-	81,783,600,-	100 15 unit	60,18 15 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	113,100,000,-	100,105,552,-	100 35 unit	88,51 35 unit

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Umum dan kepegawaian berjumlah Rp. 3.275.816.052,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 2.979.333.353,- atau sekitar 90,95 %. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag. Umum dan Kepegawaian dilihat dari serapan anggaran berkatagori tinggi. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkatagori sangat tinggi karena mencapai 100%.

2) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Perencanaan

a. Analisis

Sub Bag Perencanaan dipimpin oleh seorang Kasub Bagian Perencanaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran belanja, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan berkaitan dengan telah tersusunnya 6 Dokumen Perencanaan yaitu RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja dan Renja Perubahan, terealisasikannya semua dokumen perencanaan tersebut dalam satu tahun berjalan dan 5 laporan yang terdiri dari Lakip, LKPJ, LPPD, RB dan SPIP yang dilaksanakan pada bulan Januari s/d Desember untuk mencapai indiaktor 2 ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan 1

(satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 19.994.758,- APBD perubahan sebesar Rp 34.594.758,- dan terealisasi sebesar Rp 29.745.100,- atau 85,98 % Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Perencanaan sebanyak 1 orang Eselon IV, 2 orang pelaksana.

Tahun 2022, indikator ini juga telah tercapai 100% untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan anggaran APBD Murni sebesar Rp 9.999.501,- dan anggaran perubahan APBD Rp. 9.999.501,- dan terealisasi sebesar Rp 8.991.000,- atau 89,91 % Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Perencanaan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 2 orang staf pelaksana dan 1 orang PTT.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 19.994.758,- dan Anggaran perubahan sebesar Rp. 34.594.758,- sehingga ada peningkatan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 14.600.000,- atau 73.02%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami peningkatan dari jumlah anggaran sebesar Rp. 24.595.257,- sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Perencanaan mengalami pengurangan sebanyak 1 orang PTT

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6	6	7	7	Persentase capaian sesuai target 100%
		Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun

Pada Tahun 2022 indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan berkaitan dengan telah tersusunnya 7 Dokumen Perencanaan yaitu Renstra, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja dan Renja Perubahan, terealisikannya semua dokumen perencanaan tersebut dalam satu tahun berjalan

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun juga terealisasi sebesar 100%, dokumen yang dimaksud antara lain Renstar, RKA, RKAP, DPA, DPAP, Renja dan Renja Perubahan, terealisikannya semua dokumen perencanaan tersebut dalam satu tahun berjalan,

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	6	6	7	7	Persentase capaian sesuai target 100%

Peningkatan dari hasil sasaran melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD dalam indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dengan target 7 dokumen terealisasi 7 dokumen dengan hasil capaian 100 %



Dokumen Perencanaan

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Kurangnya pemahaman penyusunan dokumen;
- 2) Perlunya tingkat sepepahaman antara SDM pada sub bagian perencanaan.

Solusi :

- 1) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;
- 2) Perlu adanya SDM yang mumpuni.

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait dokumen dengan bidang-bidang pengampu data;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Indikator 2 : Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 34.594.758,-, target indikator yang dilaksanakan pada bagian perencanaan pada SKPD telah tercapai, karena 5 laporan yang disusun sesuai dengan 5 target yang direncanakan, target indikator yang dilaksanakan pada bagian perencanaan pada SKPD telah tercapai, karena 5 laporan yaitu LAKIP, LKPJ, LPPD, RB dan SPIP yang disusun sesuai dengan 5 target yang direncanakan.

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 9.999.501,-, target indikator yang dilaksanakan pada bagian perencanaan pada SKPD telah tercapai, karena 5 laporan yaitu LAKIP, LKPJ, LPPD, RB dan SPIP yang disusun sesuai dengan 5 target yang direncanakan.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan SKPD yang tersusun	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Peningkatan dari hasil sasaran melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD dalam indikator jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dengan target 5 laporan terealisasi 5 laporan dengan hasil capaian 100 %.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Kurang telitinya dalam penyusunan laporan;
- 2) Kurangnya pemahaman penyusunan laporan;

Solusi :

- 1) Perlu adanya pembagian tugas yang jelas terkait penyusunan laporan;
- 2) Perlu adanya pelatihan atau seminar terkait penyusunan dokumen perencanaan;

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak berkoordinasi terkait penyusunan laporan;
- 2) Adanya pembagian jadwal yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Berdasarkan tabel kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Perencanaan pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Keg	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan	1. Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.501,-	8.991.000,-	100	89,91
		2. Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.999.501,-	4.172.000,-	100 6 Dokumen	100 6 Dokumen

		yang tersusun.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000,-	4.819.000,-	100 5 Laporan	100 5 Laporan
--	--	----------------	-----------------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Perencanaan mengampu 1 Kegiatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan dengan indikator Kinerja Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang tersusun dan Jumlah dokumen Pelaporan kinerja SKPD yang tersusun.

Berdasarkan tabel kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Perencanaan pada tahun 2023 dapat diuraikan ke dalam penjelasan berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.594.758,-	29.745.100,-	100	89,91
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.995.878,-	9.137.500,-	100 6 Dokumen	100 6 Dokumen
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.598.880,-	20.607.600,-	100 5 Laporan	100 5 Laporan

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Perencanaan berjumlah Rp. 34.594.758,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 29.745.100,- atau sekitar 85,98%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Perencanaan dilihat dari serapan anggaran berkategori tinggi. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkategori sangat tinggi karena mencapai 100%.

FOTO 5 laporan perencanaan



3) Akuntabilitas Kinerja Kasubbag Keuangan

a. Analisis

Sub Bag Keuangan dipimpin oleh seorang Kasub Bagian Keuangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana keuangan dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan keuangan

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan dengan telah tersusunnya 5 Dokumen Laporan Keuangan yaitu laporan Bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, CALK yang disusun secara berkala sesuai dengan periodiknya , untuk mencapai indikator 3 ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan , yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 7.765.092.339,- APBD perubahan sebesar Rp 7.459.592.339,- dan terealisasi sebesar Rp 5.921.430.154,- atau 79,38%

Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bag Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Tahun 2022, indikator ini juga telah tercapai 100% untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 5.809.154.465,- APBD perubahan sebesar Rp 6.290.154.465,- dan terealisasi sebesar Rp 6.014.910.243,- atau 95,62%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 7.765.092.339,- dan Penurunan pada Anggaran perubahan sebesar 3,94%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 19 % sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan tidak mengalami Penambahan maupun pengurangan.

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kasubbag keuangan dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Sasaran eselon IV : Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD

Indikator 1 : Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan

Tahun 2023, indikator ini telah tercapai 100% melaksanakan proses kegiatan hingga pelaporan dengan telah tersusunnya 5 Dokumen Laporan Keuangan yaitu laporan Bulanan, Laporan triwulanan, Laporan semesteran, Laporan tahunan, CALK yang

disusun secara berkala sesuai dengan periodiknya , untuk mencapai indikator 3 ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan , yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 7.765.092.339,- APBD perubahan sebesar Rp 7.459.592.339,- dan terealisasi sebesar Rp 5.921.430.154,- atau 79,38% Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bag Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Tahun 2022, indikator ini juga telah tercapai 100% untuk mencapai indikator ini telah dilaksanakan dengan Program ,Kegiatan dan Sub Kegiatan , yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) kegiatan, dengan anggaran APBD murni sebesar Rp 5.809.154.465,- APBD perubahan sebesar Rp 6.290.154.465,- dan terealisasi sebesar Rp 6.014.910.243,- atau 95,62%. Untuk mencapai kegiatan ini didukung dengan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan sebanyak 1 orang Eselon IV dan 3 orang PNS pelaksana.

Dengan anggaran pada APBD murni 2023 sebesar Rp. 7.765.092.339,- dan Penurunan pada Anggaran perubahan sebesar 3,94%. Bila dibanding tahun 2022 mengalami penurunan dari jumlah anggaran sebesar 19 %. Sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan tidak mengalami Penambahan maupun pengurangan. Sedangkan jumlah SDM pada Sub Bagian Keuangan tidak mengalami Penambahan maupun.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	2022		2023		Capaian(%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	5	5	5	5	Persentase capaian sesuai target 100%

Dari hasil sasaran melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pelaporan SKPD dalam indikator jumlah dokumen keuangan SKPD yang tersusun dengan target 5 laporan terealisasi 5 laporan dengan hasil capaian 100 %.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

Kendala :

- 1) Adanya pergantian sistem keuangan
- 2) SDM yang belum banyak mengetahui tentang sistem keuangan yang baru
- 3) Jaringan internet yang lambat

Solusi :

- 1) Optimalisasi Koordinasi dengan SKPD pengampu aplikasi baru untuk melakukan pembelajaran terkait aplikasi keuangan yang baru
- 2) Mengajukan usulan penganggaran untuk melaksanakan maupun mengikuti Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi terkait pelatihan apabila ada pergantian sistem keuangan
- 3) Bandwith internet perlu ditambah

Rencana Aksi :

- 1) Lebih banyak koordinasi kepada SKPD yang mengurus masalah keuangan terkait penggunaan sistem
- 2) Penyediaan pelatihan berkelanjutan bagi SDM
- 3) Peningkatan atau mengadakan jaringan yang memadai serta koordinasi berkelanjutan dengan SKPD pengampu Jaringan Internet pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Keuangan pada tahun 2022 dapat diuraikan ke dalam penjelasan pada tabel berikut:

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Kegiatan & Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.290.154.465,-	6.014.910.243,-	100	95,62
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,-	6.004.281.043,-	100 12 bulan	95,62 12 bulan
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi	10.998.075,-	10.629.200,-	100	96,65 5 dokumen

			Kuangan SKPD			5 dokumen	
--	--	--	-----------------	--	--	--------------	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kasubbag Keuangan mengampu 1 Kegiatan tupoksi jabatan untuk mencapai kinerja berupa Melaksanakan Pengelolaan keuangan SKPD dengan indikator Kinerja Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan kegiatan yang diampu oleh Kasubbag. Keuangan pada tahun 2023 dapat diuraikan ke dalam penjelasan pada tabel berikut:

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.459.592.339,-	5.921.430.154,-	100	79,38
1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.279.156.390,-	6.004.281.043,-	100 36 org/ bln	79,34 31 org/ bln
1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.998.075,-	10.629.200,-	100 5 dokumen	97,86 5 dokumen

Berdasarkan perhitungan pada data tabel diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dikelola oleh Kasubbag Keuangan berjumlah Rp. 7.459.592.339,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.921.430.154,- atau sekitar 79,38%. Adapun realisasi fisik yang dapat dilaksanakan tercapai 100 persen.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kasubbag Keuangan dilihat dari serapan anggaran berkategori sangat tinggi Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan juga berkategori sangat tinggi karena mencapai 100%.

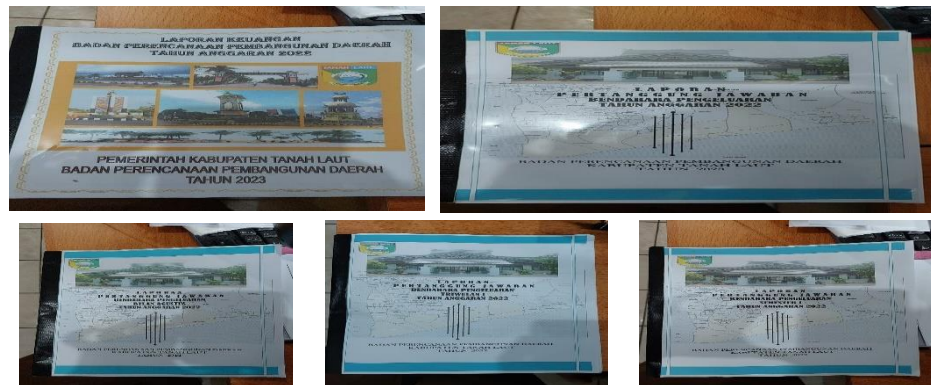


FOTO 5 laporan Keuangan

4. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro.

a. Analisis

Akuntabilitas Kepala Bidang Perencanaan Makro dalam laporan ini diukur pada level pelaksanaan dan realisasi program. Penilaian didasarkan pada serapan anggaran masing-masing program yang kemudian dirata-ratakan untuk memudahkan pengukuran.

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		
		Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Sasaran eselon III : Meningkatkan keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD.

Pencapaian indikator I pada tahun 2022 target Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 650.126.753,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 1 orang eselon 3, 2 orang eselon IV dan 4 orang staf, serta 1 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2023 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar (Rp. 1.340.718.103,-. mencapai indikator ini didukung dengan jumlah

program SKPD sebanyak 129 program dan selaras dengan jumlah Program RPJMD sebanyak 129 Program.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{jumlah program pada RKPD tahun 2023}}{\text{jumlah program RPJMD tahun 2023}} \times 100\% \\
 &= \frac{129}{129} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Selain itu, dalam rangka meningkatkan kinerja bappeda Kabupaten Tanah Laut sebagai pengampu perencanaan, maka dilakukan perbandingan capaian kinerja antar periode (tahun 2022 dan 2023) sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Pada indikator Persentase perencanaan RKPD yang sesuai dengan RPJMD, capaiannya masih stabil di angka 100% baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023. Sebagai data dukung yang menunjukkan angka ini 100% terlampir daftar program yang ada di RKPD maupun RPJMD pada tabel berikut.

Program RPJMD		Program RKPD
No	Program	Program
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
3	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
5	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
7	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
8	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
10	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
11	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
12	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

14	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
16	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
17	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
18	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
19	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
20	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
21	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
22	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
23	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
24	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
25	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
26	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
27	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
28	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
29	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
30	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
31	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
32	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
33	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
34	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
35	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
36	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
37	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
38	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
39	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
40	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

41	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
42	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
43	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
44	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
45	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
46	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
47	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
48	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
49	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
50	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
51	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
52	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
53	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
54	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
55	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
56	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
57	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
58	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
59	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
60	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

61	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
62	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
63	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
64	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
65	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
66	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
67	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
68	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
69	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
70	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
71	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
72	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
73	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
74	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHAAN
75	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
76	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
77	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
78	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
79	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
80	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
81	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
82	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
83	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
84	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
85	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

86	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
87	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
88	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
89	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
90	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
91	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
92	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
93	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
94	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
95	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
96	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
97	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
98	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
99	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
101	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
102	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
103	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
104	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
105	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
106	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
107	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

108	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
109	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
110	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
111	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
112	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
113	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
114	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
115	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
116	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
117	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
118	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
120	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
121	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
122	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
123	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
124	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
125	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

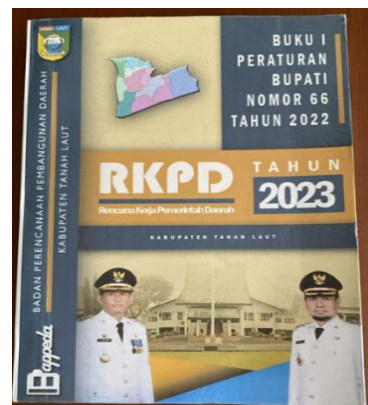
127	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
128	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
129	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sumber : RKPD 2023 dan RPJMD 2018-2023

Secara umum pencapaian kinerja pada tahun 2023 telah mencapai target yang ditentukan, meskipun dalam prosesnya ada berbagai permasalahan yang dihadapi seperti tidak meratanya kapasitas aparatur perencana pada SKPD dan sering terjadi mutasi pada aparatur perencana di masing-masing SKPD , sehingga perlu transfer knowledge yang cepat ke pejabat yang baru. Sedangkan faktor pendukung dari tercapainya target antara lain adanya aplikasi SIPD yang membantu daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan walaupun masih ada kendala dalam implementasinya. Kedepannya diharapkan perlu komitmen pimpinan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur yang menangani perencanaan di SKPD.



Dokumentasi Penetapan RKPD 2024



Sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

- a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:
 - 1) Masih kurangnya pemahaman dari beberapa SKPD mengenai penyusunan perencanaan;
 - 2) Pada SKPD proses perencanaan ini memerlukan waktu sehingga keterlambatan dalam pengumpulan dokumen atau bahan yang diminta Bappeda tidak sesuai jadwal.
- b. Solusi :
 - 1) Selalu melakukan komunikasi secara kontinyu terhadap kasubbag perencanaan SKPD;
 - 2) Perlunya pemahaman SKPD dalam menentukan indikator masing-masing Program yang diusulkan pada Renstra SKPD.
- c. Rencana aksi

agar dapat dipenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan anjab dan penambahan pengetahuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator II : Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target

Pencapaian indikator II pada tahun 2022 target persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD Persentase program yang memenuhi target 100% untuk mencapai indikator ini didukung pada program SKPD yang selaras dengan RPJMD yang sudah disusun lima

Tahun berjalan, kalo keselarasan SKPD dengan RPJMD, maka persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD. Untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 650.126.753,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Sedangkan pada tahun 2023 target pencapaian Persentase keselarasan program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang ada di RPJMD terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung pada program SKPD yang selaras dengan RPJMD yang sudah disusun lima Tahun berjalan, kalo keselarasan SKPD dengan RPJMD, maka persentase perencanaan SKPD yang sesuai dengan RPJMD. Untuk mencapai indicator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.340.718.103,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Hasil Evaluasi SAKIP (Perencanaan dan Pengukuran) Tahun 2022 pada penilaian Tahun 2023 Menyatakan SKPD yang termasuk dalam pokja Perencanaan Makro sejumlah 6 SKPD dan 11 Kecamatan. Dari 17 SKPD tersebut yang mendapat nilai di bawah target tujuan meningkatnya kinerja perencanaan dan pengukuran Pembangunan daerah dengan indikator tujuan nilai perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Kabupaten dengan target nilai 40 pada tahun 2023, terdapat 2 SKPD yang di bawah nilai 40 atau 11.76%, yang bisa dilihat pada table di bawah ini :

NO	SKPD	TAHUN	NILAI		JUMLAH
			PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
1	SEKRETARIAT DAERAH	2020	30,00	23,44	53,44
		2021	28,80	21,88	50,68
		2022	24,99	24,99	49,98
		2023	24,60	24,60	49,20
2	SEKRETARIAT DPRD	2020	26,81	19,38	46,19
		2021	26,93	19,38	46,31
		2022	24,00	24,00	48,00

		2023	24,60	23,10	47,70
3	INSPEKTORAT	2020	28,79	22,19	50,98
		2021	26,62	21,57	48,19
		2022	24,99	24,00	48,99
		2023	25,50	24,00	49,50
4	BPKAD	2020	28,18	21,88	50,06
		2021	28,18	21,88	50,06
		2022	24,99	24,00	48,99
		2023	24,60	24,60	49,20
5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	2020	23,88	16,25	40,13
		2021	19,32	18,44	37,76
		2022	20,01	21,99	42,00
		2023	24,00	23,10	47,10
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2020	28,79	21,88	50,67
		2021	26,30	19,38	45,68
		2022	23,10	23,70	46,80
		2023	23,10	21,60	44,70
7	KEC. PELAIHARI	2020	24,41	16,25	40,66
		2021	20,87	13,75	34,62
		2022	24,00	23,01	47,01
		2023	23,10	22,50	45,60
8	KEC. TAKISUNG	2020	25,06	16,25	41,31
		2021	27,43	18,75	46,18
		2022	24,99	24,00	48,99
		2023	24,60	22,50	47,10
9	KEC. KURAU	2020	22,03	19,38	41,41
		2021	26,23	14,38	40,61
		2022	23,01	21,00	44,01
		2023	22,50	17,70	40,20
10	KEC. BUMI MAKMUR	2020	23,57	13,44	37,01
		2021	24,90	20,31	45,21
		2022	21,60	21,90	43,50
		2023	18,60	16,80	35,40
11	KEC. PANYIPATAN	2020	24,42	19,69	44,11
		2021	21,45	14,38	35,83
		2022	21,99	23,01	45,00
		2023	22,20	24,00	46,20

12	KEC. KINTAP	2020	24,88	19,69	44,57
		2021	19,82	15,31	35,13
		2022	22,50	21,90	44,40
		2023	21,00	13,80	34,80
13	KEC. JORONG	2020	24,36	20,94	45,30
		2021	23,89	21,25	45,14
		2022	20,40	22,50	42,90
		2023	21,60	22,50	44,10
14	KEC. BATU AMPAR	2020	21,36	13,75	35,11
		2021	24,54	15,00	39,54
		2022	21,90	21,60	43,50
		2023	22,50	24,00	46,50
15	KEC. BAJUIN	2020	28,30	19,38	47,68
		2021	28,95	22,19	51,14
		2022	24,99	23,01	48,00
		2023	23,01	21,60	44,61
16	KEC. BATI-BATI	2020	19,08	18,44	37,52
		2021	23,63	15,31	38,94
		2022	22,50	20,01	42,51
		2023	20,10	20,70	40,80
17	KEC. TAMBANG ULANG	2020	22,69	15,63	38,32
		2021	19,00	14,69	33,69
		2022	24,00	21,00	45,00
		2023	23,10	24,00	47,10

Hasil dari Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Tercapainya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	100	100	
			2022	100	100	
			2023	100	100	

Dari hasil capaian realisasi tersebut menunjukkan sesuai capaian terhadap target yang disebabkan beberapa hal.

a. Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain:

- 1) Waktu pelaksanaan yang sering bersamaan dengan kegiatan lain, sehingga perlu mencari waktu yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Data evaluasi yang diminta sering terlambat disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam hal ini SKPD kurang merespon terhadap permintaan tersebut;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perlu koordinasi dengan pimpinan tertinggi sehingga terkadang mengalami kesulitan dalam melakukan koordinasi;
- 4) Banyaknya tugas-tugas tambahan yang dilaksanakan sehingga kurang fokus terhadap tupoksi yang sudah ada.

b. Solusi :

- 1) Perlunya disusun program kerja dan penjadualan kegiatan yang tepat dan saling koordinasi sesama PPTK yang mempunyai kegiatan-kegiatan dan jadwal masing-masing;
- 2) Perlunya penjelasan dan penegasan terhadap SKPD tentang pentingnya data-data yang diminta tersebut oleh pimpinan agar permintaan data lebih diperhatikan;
- 3) Ke depan kegiatan monitoring dan evaluasi yang merupakan tupoksi Bappeda agar lebih diperhatikan lagi oleh pimpinan mengingat kegiatan ini merupakan salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan
- 4) Dapat mengatur ritme pekerjaan sehingga dapat seimbang antara tupoksi dengan tugas-tugas tambahan.

c. Rencana aksi

Perlu sosialisasi dan komunikasi yang intens kepada seluruh SKPD terkait kegiatan ini dan membuka komunikasi maupun pelatihan untuk menambah wawasan dalam pengoperasian aplikasi emonev.

Kepala Bidang Perencanaan Makro mengampu 1 Program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk mewujudkan sasaran Kinerjanya yaitu Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sebesar Rp.

1.340.718.103,-. Terkait realisasi dari program ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pelaksanaan Program RKPd dengan RPJMD.	1. Persentase Keselarasan Program yang dilaksanakan SKPD terhadap Program yang diada RPJMD. 2. Persentase program yang memenuhi Target.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.340.718.103,-	866.993.957,-	100	64.67
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.062.732.737,-	646.533.957,-	100	60.84
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	1.062.732.737,-	646.533.957,-	100	60.84
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	99.010.000,-	100	99.01
			Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	99.010.000,-	100	99.01
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	177.985.366,-	121.450.000,-	100	68.24
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	177.985.366,-	121.450.000,-	100	68.24

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 866.993.957,- atau sekitar 64,67% dari target 100% yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja. Untuk realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Dari angka 64,67% ini maka dapat

dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Perencanaan Makro berdasarkan skala sebagaimana dimuat pada awal pembahasan akuntabilitas kinerja ini dapat dikatakan hanya berkatagori SEDANG dari sisi serapan anggaran, dan berkatagori SANGAT TINGGI dari sisi Realisasi Fisik Kegiatan karena realisasi fisiknya mencapai 100%.

5. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

a. analisis

Terkait dengan capaian kinerja atau akuntabilitas kinerja dan untuk pengukuran penilaian Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	100	100	
			2022	100	100	
			2023	100	100	
		Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2020	80	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	80	100	
			2022	90	100	
			2023	90	100	

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 100% dan Terealisasi diakhir tahunnya sebesar 100% sedangkan untuk mencapai indikator ini didukung 3 SKPD dengan 35 Program, ini selaras dengan hasil verifikasi awal dengan Bidang

Infrastruktur. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.949.752,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terealisasi sebesar 100% dan terealisasi diakhir tahun sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung 3 SKPD dengan 35 Program, ini selaras dengan hasil verifikasi awal dengan Bidang Infrastruktur yang diawali dengan verifikasi usulan desa atau kelurahan oleh pokja. Untuk pokja bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah melakukan verifikasi renja awal SKPD dan penyusunan rancangan RKPD yang ditetapkan pagu masing-masing SKPD sesuai dengan Pokja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai dengan 35 Program. dengan program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.018.731,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf serta 1 orang PTT.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup tinggi peranannya,

karena dari hasil verifikasi renja SKPD cukup menyita waktu untuk menentukan indikator-indikator yang selaras atau sesuai .

- 2) Kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD pokja infrastruktur dan pengembangan wilayah

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas diinternal bidang, agar keselarasan Renja SKPD dapat terpenuhi.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan verifikasi dan evaluasi SKPD lingkup Bidang Infrastruktur dan Pembanguna Wilayah.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal verifikasi ke SKPD



Kegiatan Verifikasi Renja Awal

Indikator II : Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 90% dan terealisasi 100% sedangkan untuk mencapai indikator ini dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik di 5 SKPD (DPUPRP, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, Diskominfo, dan BPBD) Pada Pokja bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Didukung dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 56.949.752,- sedangkan SDM yang mendukung

kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 3 orang staf, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah target sebesar 80% dan terealisasi 100% sedangkan untuk mencapai indikator ini dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap pekerjaan-pekerjaan fisik di 5 SKPD (DPUPRP, DPRKPLH, Dinas Perhubungan, Diskominfo, dan BPBD) Pada Pokja bidang infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Adapun pola evaluasi dan monitoring dilakukan sample pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh 5 SKPD pada Pokja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah dan untuk evaluasinya semua SKPD Pokja infrastuktur dan pengembangan wilayah menyampaikan pada waktu kegiatan Rapat Evaluasi. Didukung dengan Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 37.018.731,- mendukung kegiatan ini sebanyak 2 Orang pejabat Fungsional perencana muda dan 2 orang staf, serta 1 orang PTT.

Hasil Evaluasi SAKIP (Perencanaan dan Pengukuran) Tahun 2022 pada penilaian Tahun 2023 Menyatakan SKPD yang termasuk dalam pokja Infrastruktur dan kewilayahan sejumlah 5 SKPD. Dari 5 SKPD tersebut yang mendapat nilai di bawah target tujuan meningkatnya kinerja perencanaan dan pengukuran Pembangunan daerah dengan indikator tujuan nilai perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Kabupaten dengan target nilai 40 pada tahun 2023, terdapat 1 SKPD yang di bawah nilai 40 atau 20 %, yang bisa dilihat pada table di bawah ini :

NO	SKPD	TAHUN	NILAI		JUMLAH
			PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	2020	28,30	16,88	45,18
		2021	24,16	19,06	43,22
		2022	24,00	22,50	46,50
		2023	23,70	21,30	45,00
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN	2020	24,73	14,38	39,11
		2021	28,35	21,88	50,23
		2022	24,99	24,00	48,99

	PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2023	24,60	22,50	47,10
3	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2020	23,95	16,25	40,20
		2021	25,23	20,00	45,23
		2022	24,00	23,01	47,01
		2023	24,60	23,10	47,70
4	DINAS PERHUBUNGAN	2020	24,10	18,75	42,85
		2021	28,65	20,94	49,59
		2022	23,10	21,60	44,70
		2023	24,00	22,50	46,50
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2020	23,45	18,75	42,20
		2021	25,73	15,63	41,36
		2022	24,00	23,01	47,01
		2023	20,10	19,80	39,90

Hasil dari Evaluasi Inspektorat Kabupaten Tanah Laut

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	2020	80	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	80	100	
			2022	90	100	
			2023	90	100	

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala-kendala dalam mencapai target indikator ini antara lain :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi dan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini sering kali tidak dapat maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh SKPD mengingat banyaknya kegiatan dan tersebar di 11 kecamatan.

- 2) Perbedaan/tidak sesuainya jadwal/waktu pelaksanaan monev dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas monev di internal bidang infrastuktur dan pengembangan wilayah sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilaksanakan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik/intens dengan SKPD terkait.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev ke SKPD terkait



Paket Pekerjaan rehabilitasi jalan Sambangan - Datu Insad (ruas no. 14) Kecamatan Bati-Bati Desa Sambangan Datu Insad dengan volume panjang penanganan 122 m'



Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Bati-Bati Ujung (SDN) (Ruas No. 217) dengan volume rencana 122 M'

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Fisik (%)	Realisasi (%)
		Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	56.949.752,-	52.036.000,-	100	91.37
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	5.644.876,-	5.582.000,-	100	98.89
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	10.764.876,-	10.594.000,-	100	98.41
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	31.420.000,-	26.740.000,-	100	85.11
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	9.120.000,-	9.120.000,-	100	100.00

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mengampu 1 program yaitu program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah

Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Untuk kegiatan Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan ini dialokasikan anggaran sebesar 56.949.752,- dan berhasil direalisasikan sebesar 52.036.000,- atau sekitar 85,15%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja.

6. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		
		Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	2020	80	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			90	100		
2022			90	100		
2023			90	100		

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD 100% untuk mencapai indikator ini didukung

keselarasan Renja SKPD dengan 9 SKPD dalam 54 Program dan itu selaras dengan Program yang ada Pada RKPD pada binaan lingkup Bidang Ekonomi dan SDA. Didukung dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 164.469.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung keselarasan Renja SKPD dengan 9 SKPD dalam 54 Program dan itu selaras dengan Program yang ada Pada RKPD pada binaan lingkup Bidang Ekonomi dan SDA Didukung dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan jumlah anggaran sebesar sebesar Rp. 80.373.231,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang jabatan fungsional perencana muda dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT.



Pelaksanaan Desk SKPD dengan Pokja Bidang Ekonomi dan SDA

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		

		Alam dengan RKPD	2023	100	100	
--	--	---------------------	------	-----	-----	--

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Dalam penyampaian bahan penyusunan perencanaan SKPD lingkup koordinasi koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA masih sering terlambat dari jadwal yang ditentukan sehingga memperlambat penyusunan dokumen RKPD lingkup bidang ekonomi dan SDA dan masih terdapat ke kurang selarasan antara renja SKPD dengan RKPD sehingga memakan waktu kembali untuk menyelaraskannya.
- 2) Penyelerasan Renja SKPD dengan RKPD masih perlu pendampingan diluar jadwal asistensi / verifikasi dengan SKPD beberapa kali sehingga menyita banyak waktu

Solusi :

- 1) Membuat jadwal yang teratur terkait penyusunan renja SKPD dengan rentang waktu lebih lama dengan konsekwensi penyampaian bahan penyusunan perencanaan (Renja SKPD) tepat waktu
- 2) Melakukan pembagian tugas internal bidang dalam pendampingan penyusunan Renja SKPD diluar jadwal asistensi / verifikasi
- 3) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal dan menceck list keselarasan Renja SKPD dengan RKPD.
- 2) Menyusun pembagian tugas pendampingan SKPD dilingkup bidang ekonomi.
- 3) Melakukan koordinasi baik melalui rapat, maupun whatshap group perencanaan lingkup bidng ekonomi dan SDA.

Indikator II : Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam

Pencapaian indikator II pada tahun 2023 target Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

teralisasi 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) dengan total anggaran Rp. 164.469.000,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang eselon IV dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam teralisasi 100% didukung dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), dengan total jumlah anggaran sebesar Rp. 80.373.231,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini 2 orang fungsional perencana muda dan 1 orang ASN, serta 1 orang PTT.

Hasil Evaluasi SAKIP (Perencanaan dan Pengukuran) Tahun 2022 pada penilaian Tahun 2023 Menyatakan SKPD yang termasuk dalam pokja Ekonomi dan SDA sejumlah 8 SKPD. Dari 8 SKPD tersebut yang mendapat nilai di bawah target tujuan meningkatnya kinerja perencanaan dan pengukuran Pembangunan daerah dengan indikator tujuan nilai perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Kabupaten dengan target nilai 40 pada tahun 2023, terdapat 2 SKPD yang di bawah nilai 40 atau 25 %, yang bisa dilihat pada table di bawah ini :

NO	SKPD	TAHUN	NILAI		JUMLAH
			PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	2020	22,80	15,94	38,74
		2021	26,60	16,25	42,85
		2022	24,00	24,99	48,99
		2023	24,60	24,60	49,20
2	DINAS PARIWISATA	2020	28,24	20,63	48,87
		2021	25,60	20,94	46,54
		2022	24,00	24,99	48,99
		2023	23,70	25,50	49,20
3	DPMPTSP	2020	27,58	20,00	47,58
		2021	26,48	15,00	41,48
		2022	24,00	21,99	45,99
		2023	24,00	24,00	48,00

4	DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN	2020	27,37	20,00	47,37
		2021	24,19	14,38	38,57
		2022	24,99	23,01	48,00
		2023	21,60	20,10	41,70
5	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2020	27,16	18,13	45,29
		2021	26,32	18,44	44,76
		2022	23,40	23,40	46,80
		2023	16,50	4,80	21,30
6	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	2020	27,20	17,81	45,01
		2021	19,58	15,63	35,21
		2022	19,50	23,40	42,90
		2023	24,00	24,00	48,00
7	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2020	22,76	16,25	39,01
		2021	28,05	21,38	49,43
		2022	21,60	21,90	43,50
		2023	7,50	3,60	11,10
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	2020	23,87	20,31	44,18
		2021	25,80	21,25	47,05
		2022	26,01	23,01	49,02
		2023	24,00	24,00	48,00

Dukungan kegiatan dan sub kegiatan tersebut berupa :

1. pelaksanaan rapat monitoring evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup subkor pertaindagkop dilaksanakan pada TW I untuk mengetahui capai kinerja pembangunan SKPD, kendala dan permasalahannya





2. perjalanan dinas dalam daerah ke kecamatan dalam rangka monitoring dan evaluasi capaian pembangunan SKPD lingkup subkor pertaindagkop dilaksanakan pada TW II, TW III dan TW IV



Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap indikator sasaran kinerja II, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	2020	80	100	Persentase capaian PK 100 %
2021			90	100		
2022			90	100		
2023			90	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Banyaknya tugas koordinasi di bidang Ekonomi dan SDA sebagai koordinator SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA cukup menyita waktu sehingga kegiatan monev ini seringkali tidak maksimal dalam mencakup seluruh kegiatan pembangunan yang dilakukan SKPD.
- 2) SKPD terkait sendiri sangat jarang bertepatan waktu monevnya sehingga saat dilapangan hanya bertemu dengan para tukang yang melaksanakan pembangunan.

Solusi :

- 1) Melakukan pembagian tugas di internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi yang lebih baik dengan SKPD terkait pelaksanaan monev.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev.
- 2) Mengirim surat permintaan jadwal monev bersama ke SKPD.

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	fisik (%)	Realisasi (%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	164.469.000,-	152.114.000,-	100	92.49

			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	78.524.000,-	76.949.000,-	100	97.99
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang perekonomian	24.500.000,-	16.570.000,-	100	67.63
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	56.950.000,-	54.475.000,-	100	95.65
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4.495.000,-	4.120.000,-	100	91.66

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Ekonomi dan SDA mengampu 1 Program 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan alokasikan anggaran sebesar Rp. 164.469.000,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 152.114.000,- atau sekitar 92,49%. Adapun realisasi Kinerjanya tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja 2 orang Sub koordinasi Bidang di bawahnya yang akan diuraikan sebagai berikut. Pada kegiatan yang diampu oleh bidang ekonomi lebih mengakomodir fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan SKPD pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) yaitu pada SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian , Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pariwisata, Dinas

Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah. Serta Melaksanakan monitoring evaluasi capaian pembangunan SKPD pada bidang perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Ekonomi dan SDA dilihat dari serapan anggaran berkatagori Sedang. Sedangkan untuk realisasi kinerja berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

7. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya.

a. Analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		
		Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	2020	80	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			90	100		
2022			90	100		
2023			90	100		

Sasaran eselon III : Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD

Indikator 1 : Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini didukung keselarasan Renja SKPD.

SKPD yang di ampu Bidang Sosial Budaya :

No	SKPD	Jumlah Program
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8
2	Dinas Kesehatan	5
3	Dinas Sosial	6
4	DP2KBP3A	8
5	Badan Kesbangpol	3
6	Satpolppdamkar	3
7	Dinas PMD	4
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	3
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4
10	BKPSDM	3
Jumlah Program		47

Pada tabel diatas beberapa SKPD yang di ampu Bidang Sosial Budaya Yaitu : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan 8 Program, Dinas Kesehatan dengan 5 Program, Dinas Sosial dengan 6 program, DP2KBP3A dengan 8 Program, Badan Kesbangpol dengan 3 Program, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Satpolppdamkar dengan 3 program, Dinas PMD dengan 4 Program, BKPSDM dengan 3 program, 10 SKPD dalam 47 Program itu selaras dengan Program yang ada Pada RKPD kabupaten Tanah Laut pada binaan lingkup Bidang Sosial Budaya. Didukung dengan kegiatan Perencanaan Sosial dan Budaya dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.182.463,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang Subkoordinator dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung keselarasan Renja SKPD dengan 10 SKPD dalam 47 Program dan diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 dengan Program yang ada Pada RKPD. Didukung dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.085.036,- .

Untuk mencapai indikator Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dilakukan dengan metode Koordinasi, Verifikasi dan asistensi dari tahap penyusunan rancangan awal Renja SKPD sampai pada Tahap Rancangan Ahir Renja SKPD, semua indikator dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 yang di Ampu oleh SKPD harus masuk dalam Renstra dan Renja SKPD sehingga selaras dalam penyusunan semua Dokumen Perencanaan.

Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	2020	100	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
2021			100	100		
2022			100	100		
2023			100	100		



Dokumentasi Kegiatan Desk Renja Awal 2024 dan Perubahan 2023

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Belum semua personel di SKPD memahami pentingnya capaian indikator dalam Dokumen Perencanaan Daerah seperti RPJMD, RKPD , Renstra dan Renja SKPD masing-masing SKPD di lingkup pokja Sosial dan Budaya sehingga dalam penyusunan Rancangan

awal Renja SKPD belum menetapkan target indikator kinerja dengan tepat.

Solusi :

- 1) Koordinasi dan pendampingan penyusunan dokumen Perencanaan sesuai dengan nomenklatur Kepmendagri 050-5889 tahun 2021 SKPD , sehingga target Indikator dalam RPJMD, Renstra dan RKPD serta Renja SKPD dapat dilaksanakan dan mencapai target serta berkeselarasan .

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal secara berkala dengan SKPD untuk dapat menentukan Indikator Renja SKPD selaras dengan RKPD.

Indikator II : Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya

Pencapaian indikator II pada tahun 2022 target Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup bidang Sosial Budaya 100% untuk mencapai indikator ini. Didukung dengan Kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 29.085.036,- sedangkan SDM yang mendukung kegiatan ini sebanyak 2 orang Subkoordinator dan 2 orang ASN, serta 1 orang PTT

Sedangkan pada tahun 2023 target pencapaian Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya terlealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 49.182.463,- ,

Hasil Evaluasi SAKIP (Perencanaan dan Pengukuran) Tahun 2022 pada penilaian Tahun 2023 Menyatakan SKPD yang termasuk dalam pokja Sosial dan Budaya sejumlah 10 SKPD. Dari 10 SKPD tersebut Semuanya Mendapat nilai Sesuai target tujuan meningkatnya kinerja perencanaan dan pengukuran Pembangunan daerah dengan indikator tujuan nilai perencanaan dan pengukuran pada SAKIP Kabupaten

dengan target nilai 40 pada tahun 2023 atau tercapai 100 %, yang bisa dilihat pada table di bawah ini :

NO	SKPD	TAHUN	NILAI		JUMLAH
			PERENCANAAN KINERJA	PENGUKURAN KINERJA	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2020	27,58	18,75	46,33
		2021	25,48	18,13	43,61
		2022	24,99	23,01	48,00
		2023	24,60	24,00	48,60
2	DINAS KESEHATAN	2020	28,24	18,44	46,68
		2021	29,75	23,13	52,88
		2022	24,99	24,00	48,99
		2023	24,60	26,10	50,70
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2020	22,90	15,63	38,53
		2021	15,10	15,94	31,04
		2022	23,10	21,00	44,10
		2023	22,20	22,50	44,70
4	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2020	20,97	19,38	40,35
		2021	23,82	13,75	37,57
		2022	22,20	21,00	43,20
		2023	19,80	21,30	41,10
5	BKPSDM	2020	25,13	19,69	44,82
		2021	25,18	19,69	44,87
		2022	23,01	21,99	45,00
		2023	22,20	22,20	44,40
6	DINAS SOSIAL	2020	25,18	18,75	43,93
		2021	23,80	16,25	40,05
		2022	23,01	23,01	46,02
		2023	21,60	23,10	44,70
7	DP2KBP3KA	2020	23,95	15,63	39,58
		2021	27,55	20,31	47,86
		2022	23,01	23,01	46,02
		2023	23,10	21,90	45,00
8	SATPOL PP DAMKAR	2020	26,14	16,25	42,39
		2021	25,23	18,13	43,36
		2022	21,60	21,00	42,60
		2023	19,80	20,40	40,20

9	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2020	24,82	19,69	44,51
		2021	24,15	18,19	42,34
		2022	24,00	21,00	45,00
		2023	24,00	22,50	46,50
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2020	23,77	19,06	42,83
		2021	26,23	17,19	43,42
		2022	24,99	23,01	48,00
		2023	27,00	24,00	51,00

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode monev Nonfisik dan Fisik , monev nonfisik dilaksanakan melalui rapat dengan SKPD lingkup Bidang Sosial Budaya secara berkala, di Triwulan I sampai dengan Triwulan IV tahun 2023.

TUJUAN MONITORING DAN EVALUASI

Tujuan Monitoring

Kegiatan monitoring memiliki tujuan :

- Menjaga kegiatan yang sedang dilaksanakan agar berjalan sesuai tujuan dan sasaran.
- Untuk menemukan suatu kesalahan sedini mungkin agar resiko besar yang akan terjadi kedepannya dapat diantisipasi.
- Untuk mendukung upaya penyempurnaan perencanaan berikutnya melalui hasil monitoring.
- Untuk mendapatkan informasi terkait perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan.

Tujuan Evaluasi

Kegiatan evaluasi memiliki beberapa tujuan, di antaranya yaitu:

- Untuk memberikan informasi valid terkait kinerja kegiatan yang telah dicapai
- Untuk memberikan kritik serta saran terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target
- Untuk memberikan *feedback* atau umpan balik terhadap suatu kegiatan atau program
- Untuk mengetahui efektivitas serta efisiensi metode yang telah diterapkan

- Untuk membantu memecahkan suatu permasalahan atau kesulitan yang dialami saat dilakukannya suatu kegiatan
- Untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan .

Hasil Monitoring Dan Evaluasi :

dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan beberapa dokumentasi sebagai berikut :



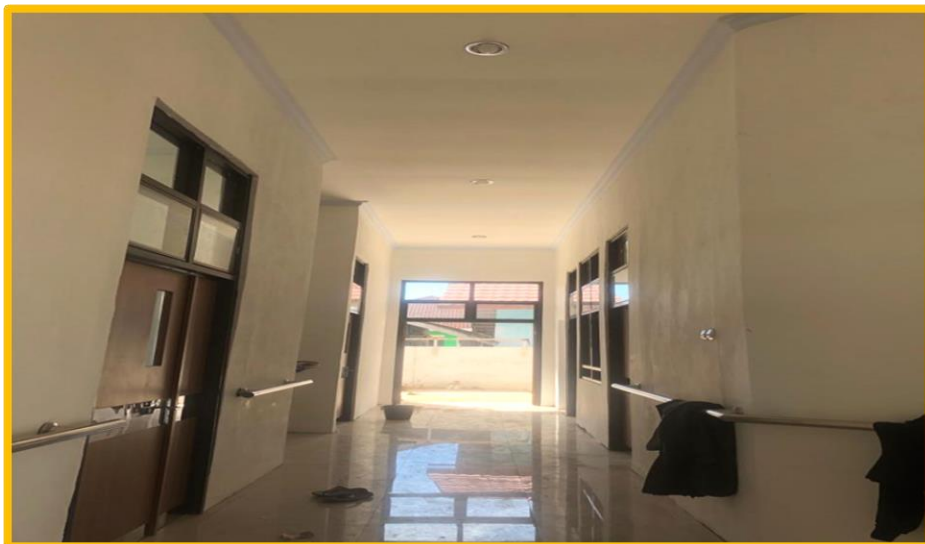
- Rehabilitasi Sedang /Berat pagar sekolah UPTD SDN 2 Panggung, Lokasi Jl. Anggrek RT.48 RW 3, volume 90 m², pagu anggaran Rp. 177.705.000,- dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut , telah terealisasi 100 % .



- Pembangunan Mushola UPTD SDN Galam , volume 44 m² pagu anggaran Rp. 167.706.000,- , pagu kontrak Rp. 150.432.000, Sumber Dana : APBD dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut , realisasi fisik 100 % .



- Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas Tajau Pecah volume 1 paket pagu anggaran sebesar Rp. 1.476.200.000,-, pagu kontrak Rp. 1.410.021.000,- sumber dana : Dana Alokasi Khusus ,pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut , realisasi sampai dengan tanggal 10 November 2023 ±50 %.



- Renovasi/Penambahan ruang Puskesmas Kurau volume 1 paket pagu Anggaran Rp. 1.476.200.000,- sumber Dana : Dana Alokasi Khusus tahun 2023, di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut , realisasi Fisik 100 %.



- Penyediaan alat antropometri Puskesmas Padang Luas , 1 paket Pagu Anggaran Rp. 6.609.000,- sumber dana : Dana Alokasi Khusus Tahun 2023, pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, pada saat Monitoring alat antropometri belum di distribusikan ke Puskesmas Padang Luas .

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan , saran yang dapat di sampaikan di antaranya:

1. Perlunya kebijakan dari SKPD Teknis pengampu kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang sedang direncanakan sehingga seluruh target pekerjaan dapat selesai tepat waktu dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik perlu di monitor Kembali oleh SKPD Teknis, sehingga kegunaannya dapat sesuai dengan rencana semula, karena ada beberapa pembangunan fisik dikerjakan belum sesuai dengan yang diharapkan .

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	2020	80	100	Persentase capaian 100
2021			80	100		
2022			90	100		
2023			90	100		

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) Belum maksimalnya monev pada bidang Sosial Budaya terhadap SKPD yang dibina karena banyaknya objek monev dan terbatasnya personel serta waktu yang berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan lain yang di ampu oleh Bidang Sosial Budaya yang merupakan Program Pusat, kementerian atau Provinsi seperti Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting, penurunan Angka Kemiskinan, Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Kota sehat dan Germas, dimana Bappeda dalam hal ini Bidang Sosial Budaya berperan sebagai Koordinator, Ketua atau Pembina di tingkat Kabupaten .
- 2) Data monev yang tersedia belum dilengkapi dengan Lokasi akurat sehingga pada saat pelaksanaan monev hanya mengandalkan Maps Goole atau informasi dari warga sekitar , sehingga membutuhkan waktu untuk mencari titik lokasi objek yang akan di monev.

Solusi :

- 1) Menyusun Jadwal dan Melakukan pembagian tugas kembali secara lebih detail pada internal bidang sehingga dapat memperluas cakupan area monev yang dilakukan.
- 2) Mengupayakan koordinasi dan komunikasi dengan SKPD sehingga didapatkan data dengan lokasi akurat pada objek monev yang akan dilaksanakan oleh SKPD.

Rencana Aksi :

- 1) Menyusun jadwal pelaksanaan monev agar tidak ada bentur jadwal dengan kegiatan yang lain

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	Fisik (%)	Realisasi (%)
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Pembangunan Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Buaya dengan RKPD	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
		Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya.	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	49.182.463,-	46.338.100,-	100	94.22
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	7.786.731,-	7.108.000,-	100	91.28
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	10.185.650,-	9.563.500,-	100	93.89
			Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	8.012.333,-	7.742.500,-	100	96.63
			Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang	23.197.749,-	21.924.100,-	100	94.51

			pembangunan manusia				
--	--	--	---------------------	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Sosial Budaya mengampu 1 program yaitu Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan indikator Kinerja persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya dengan RKPD, dan Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya. Pada Bidang Sosial Budaya yang didalamnya terdapat kegiatan yang mengakomodir fasilitasi perencanaan SKPD sub bidang Politik, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia serta kegiatan Monitoring dan Evaluasi SKPD yang tergabung dalam sub bidang tersebut, di Bidang Sosial Budaya juga menjadi koordinator Kabupaten pada Program Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan Program dari Pemerintah Pusat.

Untuk kegiatan Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 49.182.463,- dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 46.338.100,- atau sekitar 94,22%. Adapun realisasi fisik program ini tercapai 100 persen yang dapat dilihat pada kinerja.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Sosial Budaya dilihat dari serapan anggaran berkatagori SEDANG dikarenakan ada kegiatan yang dilakukan melalui media virtual. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori TINGGI karena mencapai 100%.

8. Akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - a. analisis

Penilaian dan pengukuran akuntabilitas Kinerja Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya penelitian pembangunan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan	2020	6	11	Persentase capaian sesuai dengan target
			2021	7	30	
			2022	8	33	
			2023	9	9	
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan	2020	70	100	
			2021	80	100	
			2022	90	100	
			2023	100	100	

Sasaran eselon III : Meningkatnya penelitian pembangunan Daerah

Indikator 1 : Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan 4 (empat) untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah anggaran APBD Murni sebesar Rp. 181.435.850,- dan pada APBD Perubahan sebesar Rp. 325.668.521,- dan Terialisasi sebesar Rp. 297.560.000,- atau 91.37%,

Dari hasil realisasi keuangan sebesar 91.37 dengan tercapainya jumlah kajian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sejumlah 9 kajian yang mana kajian tersebut pada beberapa SKPD yang dapat menjalankan dan menindaklanjuti kajian tersebut, bisa dilihat pada table dibawah;

NO	URAIAN	NAMA PELAKSANA	TAHUN
1	KAJIAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI PEMANFAATAN POTENSI UMKM, PARIWISATA, PERTANIAN, dan PERIKANAN di DESA PANDAHAN dan BANYU IRANG KECAMATAN BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023	LPPM UNISKA	2023
2	KAJIAN PERMASALAHAN IRIGASI DAN SAWAH DI LOKSERAPANG PELAIHARI	LPPM UNISKA	2023

	KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023		
3	KAJIAN POTENSI KAWASAN HUTAN DI WILAYAH KABUPATEN TANAH LAUT	LPPM ULM	2023
4	KAJIAN RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI KABUPATEN TANAH LAUT	POLITALA	2023
5	DOKUMEN KLHS RDTR WP TAMBANG ULANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2023
6	RANCANAGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) REVISI RTRW KABUPATEN TANAH LAUT	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2023
7	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KAB. TANAH LAUT TENTANG KERJASAMA DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BIRO HUKUM PROV. KALSEL	2023
8	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KAB. TANAH LAUT TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL	BIRO HUKUM PROV. KALSEL	2023
9	DOKUMEN KAJIAN RENCANA KONTIJENSI BENCANA BANJIR KABUPATEN TANAH LAUT	LPPM ULM BANJARMASIN	2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	181,435,850,-	325,668,521,-	297,560,000,-	91.37	100
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	56,744,900,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100
	1. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan	28,372,450,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100

dan aset daerah, reformasi birokrasi					
2. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	28,372,450,-	0,-	0,-	0	0
2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100
1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100
3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100
1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekrasan di Bidang Teknologi dan Inovasi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.236.413,-. Adapun tentang hasil kajian yang dicapai sejumlah 33 kajian dengan target kajian pada tahun 2022 berjumlah 8 kajian. Didalam hasil rencana aksi masing-masing kajian dapat berjalan untuk tindaklanjut tahun berikutnya untuk SKPD terkait, nisa dilihat pada table dibawah ;

NO	SKPD	URAIAN	NAMA PELAKSANA	TAHUN
1	DISNAKERIND	PERENCANAAN DELINIASI KAWASAN INDUSTRI JORONG	CV. Waigama Konsultan /Disnakerind	2022
2	BAPENDA	UPDATING DAN EVALUASI NILAI OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI KABUPATEN TANAH LAUT	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNLAM	2022

3	BPKAD	LAPORAN KAJIAN INVESTASI NON PERMANEN PENGELOLAAN KAPAL	BPKAD TANAH LAUT DAN PUSAT KAJIAN EKONOMI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN LPPM UNLAM	2022
4	DPUPRP	SID PANTAI ASAM-ASAM/ SURVEY INVESTIGASI DAN DESAIN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI DESA MUARA ASAM-ASAM KECAMATAN JORONG	PT. GUMILANG SAJATI	2022
5	DPUPRP	SID PANTAI PAGATAN BESAR/SURVEY INVESTIGASI DAN DESAIN BANGUNAN PELINDUNG PANTAI DESA PAGATAN BESAR KECAMATAN TAKISUNG	PT. GUMILANG SAJATI	2022
6	DPUPRP	LAPORAN AKHIR KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
7	DPUPRP	LAPORAN PENDOKUMENTASIAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STARATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
8	DPUPRP	EXECUTIVE SUMMARY KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STARATEGIS (KLHS) RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
9	DPUPRP	DOKUMEN KLHS RDTR WP JORONG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
10	DPUPRP	DOKUMEN KLHS RDTR WP PANYIPATAN	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022

11	DPUPRP	LAPORAN GCP ICP BUMI MAKMUR	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
12	DPUPRP	LAPORAN ORTHOREKTIFIKASI CITRA SATELIT) / PELAKSANAAN GCP DAN PEMBUATAN DATA DAN PETA DASAR KECAMATAN KURAU	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
13	DPUPRP	LAPORAN PEMBUATAN UNSUR PETA DASAR / PELAKSANAAN GCP DAN PEMBUATAN DATA DAN PETA DASAR KECAMATAN KURAU	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
14	DPUPRP	LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANCANGAN KEPALA DAERAH RENCANA DETAIL TATA RUANG ARAHAN PRIORITAS NASIONAL DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
15	DPUPRP	BUKU FAKTA DAN ANALISA RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
16	DPUPRP	BUKU FAKTA DAN ANALISIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANPERKADA RDTR ARAHAN PRIORITAS NASIONAL DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
17	DPUPRP	BUKU RENCANA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANPERKADA RDTR ARAHAN PRIORITAS NASIONAL DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
18	DPUPRP	ALBUM PETA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DAN RANPERKADA RDTR ARAHAN PRIORITAS NASIONAL DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022

19	DPUPRP	KAJIAN KEBIJAKAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KI JORONG	PT. PASYA MIITRA UTAMA	2022
20	DPUPRP	LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUNAG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI WILAYAH PERENCANAAN (WP) KEC.JORONG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
21	DPUPRP	ALBUM PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN JORONG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
22	DPUPRP	LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUNAG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI WILAYAH PERENCANAAN (WP) KEC. PANYIPATAN	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
23	DPUPRP	ALBUM PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN PANYIPATAN	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
24	DPUPRP	LAPORAN AKHIR PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUNAG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI WILAYAH PERENCANAAN (WP) KEC. TAMBANG ULANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022
25	DPUPRP	ALBUM PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN KEC. TAMBANG ULANG	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BJM FAKULTAS TEKNIK	2022

26	DPUPRP	LAPORAN AKHR KAJIAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TENTANG RETRIBUSI DAN PERHITUNGAN PELAYANAN JASA DI UPTD PERALATAN DAN PENGUJIAN MATERIAL KONSTRUKSI DPUPRP KAB. TALA	PT SETIATAMA MEGA KONSULTAN	2022
27	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	LAPORAN PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN /FSVA (FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS) KAB. TANAH LAUT	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	2022
30	SETDA KAB. TANAH LAUT	BELANJA JASA KONSULTASI PENYUSUNAN KAJIAN EVALUASI PROGRAM GAPURA KAROMAH TAHUN 2022	LPPM STIE INDONESIA BANJARMASIN	2022
31	SETDA KAB. TANAH LAUT	PEMBAYARAN JASA KONSULTASI PENYUSUNAN KAJIAN/ANALISA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KEPADA PT. BPR TANAH LAUT TAHUN 2022	FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	2022
32	SETDA KAB. TANAH LAUT	NASKAH AKADEMIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN DI DAERAH	KANTOR KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALSEL	2022
33	SETDA KAB. TANAH LAUT	NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERDA KAB. TANAH LAUT TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. TANAH LAUT	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	2022

Dengan SDM untuk mengejar kegiatan ini sebanyak 1 orang kabid dan 4 orang staf. Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
-----	-------------------	-------------------	-------	--------	-----------	------------

	Meningkatnya hasil penelitian pembangunan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan	2020	6	11	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	7	30	
			2022	8	33	
			2023	9	9	

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

- 1) kurangnya kerjasama dari SKPD terkait pemberian data sesuai dengan kajian yang dikerjakan.
- 2) Kurang SDM dibidang penelitian dan pengembangan terkait dengan tugasnya.

Solusi :

- 1) Lebih instensif dalam berkoodinasi dengan SKPD dalam hal permintaan data dukung
- 2) memberikan pelatihan kepada SDM terkait tugasnya.

Rencana Aksi :

- 1) penyediaan SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan pemberian pelatihan ataupun workshop
- 2) membuka rapat koordinasi dengan SKPD terkait sebelum melaksanakan kegiatan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mengampu 1 program yaitu Program Penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan.

Sasaran eselon III : Meningkatkan Inovasi Daerah

Indikator 1 : Persentase Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan

Pencapaian indikator I pada tahun 2023 target Persentase Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan Program Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah anggaran APBD Murni sebesar Rp. 181.435.850,- sedangkan

pada APBD Perubahan Rp. 325.668.521,- terealisasi sebesar Rp. 297.560.000,- atau 91.37%, dengan realisasi fisik 100%, karena sebuah kegiatan berjalan selesai dan mendapatkan target kinerja tercapai dengan persentase inovasi yang dikembangkan/ diterapkan 100%, dengan adanya lomba inovasi antar SKPD pada Tahun 2023. Bisa dilihat pada tabel dibawah ;

NO	SKPD	NAMA INOVASI
1	DPUPRP	KIJANG MAS TALA (Kolaborasi Layanan Penunjang Penyelesaian Masalah Bidang Tanah Ekstranmigrasi)
2	DPUPRP	LAYANAN BINA MARGA ON CALL (BOC)
3	DISDUKCAPIL	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)
4	DISDUKCAPIL	PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)
5	DISDUKCAPIL	SI CAPUNG (Sistem Informasi Cerai di Pengadilan Agama, Dokumen Kependudukan Berubah Langsung)
7	DISDUKCAPIL	MANYASAH (Mambari Layanan ke Sekolah)
8	DISDUKCAPIL	PELANGI - Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi
9	DISDUKCAPIL	SIKECE- sistem Informasi pengarsipan Dokumen Kependudukan secara elektronik
10	DISDUKCAPIL	DETAK- Desa Tertib administrasi Kependudukan
11	DISDUKCAPIL	SILAKAS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via smartphone)
12	DPMD	SI BAHIMAT (Sistem Informasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat)
13	Disnakerin	SOSS (Smart Office Smart Service)
14	Disnakerin	SALAM (Sahabat Layanan Masyarakat)
15	BKPSDM	SI-IBA (Sistem Informasi Layanan Kenaikan Gaji Berkala)
16	BKPSDM	SIDIKA (Sistem Informasi Dokumentasi Kepegawaian)
17	BKPSDM	SIMFONI (Sistem Informasi Layanan Online)
18	DPRKPLH	Menabung Sampah Menjadi Emas

19	DPRKPLH	Pelayanan Pengaduan Lingkungan Hidup Melalui Nomor WA Pos Pengaduan DPRKPLH
20	DPRKPLH	Layanan Masyarakat Pengaduan lampu Penerangan jalan Umum (LAMPU PJU)
21	DPMPTSP	GEMA SAPU (Gerakan Menanam Satu Pohon Oleh Perusahaan)
22	DPMPTSP	SI PERI CANTIK (sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Terintegrasi Cepat dan Simpatik)
23	DPMPTSP	Pembebasan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan Yang Dikaitkan dengan SKB selama Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut
24	DPMPTSP	Pemberian Penghargaan dan Sanksi (Reward And Punishment) Untuk Pemohon Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
25	DPMPTSP	(RACAP) Reaksi Cepat Pemberian Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Penyandang Disabilitas Netra
26	DPMPTSP	Pelayanan Keliling Perizinan dan Nonperizinan
27	DPMPTSP	Pelayanan Drive Thru Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut
28	Diskominfo	Porogram Talkshow/Obrolan Seputar Tupoksi dan Panggilan Perkara Ghaib maupun Perkara Itsbat
29	Diskominfo	PORTAL SATU DATA TANAH LAUT
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Si Pelopor (Proses Seleksi dan Pendampingan serta Pengembangan pemuda Pelopor Kabupaten Tanah Laut)
31	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Simple Bulan PSP3 (Sistem Pelaporan Bulanan dan Pendampingan PSP3 di Masyarakat
32	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	PPLPD Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar Daerah (PPLPD) Kabupaten Tanah Laut
33	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Pendataan masyarakat dan pemuda (PMP)
34	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	SIPK (Sistem informasi dan pelayanan kepemudaan)
35	P2KBBP3A	Layanan Konseling Kepada Anak Bawah Umur Ingin Nikah (LAYAK KAWIN)

36	P2KBBP3A	Pencegahan Perkawinan Usia anak dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Tanah Laut (2021)
37	DISDIK	Sistem informasi Geografis Anak Berkebutuhan Khusus (SIGABSUS)
38	Dinas Pariwisata	Radio Fantastic Tanah laut 2020 Radio Dalam bentuk aplikasi bukan frekuensi memberikan info-info kepariwisataan
39	Dinas Sosial	Rumah Singgah " AYANGJUKI" (Memberikan pelayanan dasar bagi SPM (anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas terlantar, gepeng dan pengemis serta korban bencana alam)
40	Dinas Sosial	TRC (Tim Reaksi Cepat) Tim yang bergerak secara cepat dan tepat untuk memberikan pelayanan bantuan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
41	Dishub	LANGKAR (Layanan Angkutan Pelajar)
42	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Pelayanan Terpadu Sahabat Peternakan dan Kesehatan Hewan (Yandu Sanak kawan)
43	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	CALL ME 24J (Hubungi kapan saja untuk mendapatkan Pelayanan Peternakan dan Kesehatan Hewan)
44	DISPUSIP	Penerbit DISPUSIP Tanah Laut
45	DISPUSIP	Rumah Produksi Audia Visual Perpustakaan
46	DISPUSIP	Jurnal Ilmiah Literaria
47	DISPUSIP	Majalah Aksara
48	Bapenda	Aplikasi Rekapitulasi Pembayaran PBB - P2
49	Kecamatan Bumi Makmur	Terbaik (Transparan, Efektif & Efesien, Ramah, Bebas Biaya, Amanah, Ikhlas, Kompeten)
50	Kecamatan Kurau	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Yang Cepat)
51	Dinas Kesehatan	Survei indikator PHBS Online oleh Kader (SIP OK)
52	RS H. BOEJASIN	Sistem Informasi ElektronikBoejasin Infoermasi Sistem Aplikasi (BISA)

53	Setda Tala	SOSIALITA - Sistem Order Semua Instansi Lingkup Tanah Laut
54	Setda Tala	PROGRAM INVESTASI DAERAH MELALUI GERAKAN PENINGKATAN USAHA RAKYAT MELALUI KREDIT TANPA BUNGA DAN RENTE BAGI EKONOMI LEMAH (GAPURA KAROMAH)
55	DISTANHORTIBUN	POMPERA (Pupuk Organik Mandiri Petani Sejahtera)
56	DISTANHORTIBUN	GASTPOL (Gerakan Tanam, Petik, Olah dan Jual)
57	BPKAD	SIM PKB (sistem informasi manajemen pajak kendaraan bermotor)
58	Diskopdag	Dasar Terang (Datangi sasaran tera/tera ulang)

Tabel Anggaran APBD Murni dan Perubahan Tahun 2023

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	181,435,850,-	325,668,521,-	297,560,000,-	91.37	100
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	56,744,900,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100
	3. Fasilitas, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	28,372,450,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100
	4. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	28,372,450,-	0,-	0,-	0	0
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100
	2. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100

3	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100
	2. Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100

Sedangkan pada tahun 2022 target pencapaian Persentase Hasil Kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan terealisasi sebesar 100% untuk mencapai indikator ini didukung dengan 1 program dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.236.413,-. Adapun tentang hasil kajian yang dicapai yaitu Rencana Aksi Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut yang berpedoman dan berkesesuaian dengan Masteplan Pendidikan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 - 2025. Didalam hasil rencana aksi pendidikan ini memuat Rencana aksi jangka pendek dimana masalah atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan sebagai leading sektor pendidikan di tingkat Kabupaten dapat segera terselesaikan, seperti untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibidang Pendidikan, angka lama harapan sekolah dan angka melek huruf. Dengan SDM untuk mengejar kegiatan ini sebanyak 1 orang kabid dan 4 orang staf. Nilai capaian sasaran tersebut dicapai dengan penilaian terhadap 1 indikator sasaran, yaitu ;

No.	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Capaian(%)
	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase inovasi yang dikembangkan/ diterapkan	2020	70	100	Persentase capaian sesuai dengan target (100)
			2021	80	100	
			2022	90	100	
			2023	100	100	

Dari hasil capaian realisasi tersebut sesuai dengan capaian target tetapi ada beberapa hal kendala.

Kendala :

1. kurangnya kerjasama dari SKPD terkait pemberian data sesuai dengan inovasi yang dikerjakan.

2. Kurang SDM dibidang penelitian dan pengembangan terkait dengan tugasnya.

Solusi :

1. Lebih instensif dalam berkoodinasi dengan SKPD dalam hal permintaan data dukung
2. memberikan pelatihan kepada SDM terkait tugasnya.

Rencana Aksi :

1. penyediaan SDM yang sesuai dengan kualifikasi dan pemberian pelatihan ataupun workshop
2. membuka rapat koordinasi dengan SKPD terkait sebelum melaksanakan kegiatan.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mengampu 1 program yaitu Program Penelitian dan pengembangan untuk mencapai sasaran kinerja berupa Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan indikator Kinerja Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan.

Berdasarkan data diatas maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan dilihat dari serapan anggaran berkatagori TINGGI dikarenakan adanya perhitungan ulang yang mengakibatkan pengurangan anggaran dalam penyusunan Dokumen Analisis Standar Belanja dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan gagal di lelangkan atau dilaksanakan. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan berkatagori SANGAT TINGGI karena mencapai 100%.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023.

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di tahun 2023, Bappeda melaksanakan 4 Program, 15 Kegiatan dan 43 Sub Kegiatan . Pada tabel berikut akan digambarkan tentang anggaran dan realisasi APBD Bappeda Tahun 2023.

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		
				Keuangan	Keuangan (%)	Fisik (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9,896,001,348,-	10,770,003,149,-	8,930,508,607,-	82.92	100.00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,994,758,-	34,594,758,-	29,745,100,-	85.98	100
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9,995,878,-	9,995,878,-	9,137,500,-	91.41	100
	2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,998,880,-	24,598,880,-	20,607,600,-	83.77	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,765,092,339,-	7,459,592,339,-	5,921,430,154,-	79.38	100
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,750,092,919,-	7,444,592,919,-	5,906,752,254,-	79.34	100
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14,999,420,-	14,999,420,-	14,677,900,-	97.86	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63,189,000,-	118,651,500,-	73,025,000,-	61.55	100
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	33,189,000	70,651,500	63,650,000,-	90.09	100
	2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	30,000,000,-	48,000,000,-	9,375,000,-	19.53	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,331,214,040,-	2,397,533,807,-	2,249,370,945,-	93.82	100
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,976,799,-	14,976,799,-	13,270,200,-	88.61	100
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	307,450,139,-	713,769,906,-	644,565,025,-	90.30	100
	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,787,102,-	55,787,102,-	47,447,200,-	85.05	100

4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000,-	3,000,000,-	1,800,000,-	60.00	100
5.	Penyediaan Bahan/Material	0,-	10,000,000,-	10,000,000,-	100	100
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	950,000,000,-	1,600,000,000,-	1,532,288,520,-	95.77	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	447,261,211,-	480,630,745,-	459,945,756,-	95.70	100
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	123,000,000,-	119,000,000,-	106,816,866,-	89.76	100
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	324,261,211,-	361,630,745,-	353,128,890,-	97.65	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	269,250,000,-	279,000,000,-	196,991,652,-	70.61	100
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30,000,000,-	30,000,000,-	15,102,500,-	50.34	100
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	135,900,000,-	135,900,000,-	81,783,600,-	60.18	100
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	103,350,000,-	113,100,000,-	100,105,552,-	88.51	100
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1,149,415,083,-	1,340,718,103,-	866,993,957,-	64.67	100
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	941,659,717,-	1,062,732,737,-	646,533,957,-	60.84	100

1.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	941,659,717,-	1,062,732,737,-	646,533,957,-	60.84	100
2	Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100.000.000,-	100.000.000,-	99,010,000,-	99.01	100
1.	Analisis data dan informasi perencanaan pembangunan daerah	100,000,000,-	100,000,000,-	99,010,000,-	99.01	100
3	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	107,755,366,-	177,985,366,-	121,450,000,-	68.24	100
1.	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	107,755,366,-	177,985,366,-	121,450,000,-	68.24	100
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	152,636,463,-	270,601,215,-	250,488,100,-	92.57	100
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	59,907,463,-	49,182,463,-	46,338,100,-	94.22	100
1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	11,386,731,-	7,786,731,-	7,108,000,-	91.28	100
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	17,310,650,-	10,185,650,-	9,563,500,-	93.89	100

Bidang Pemerintahan					
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	8,012,333,-	8,012,333,-	7,742,500,-	96.63	100
4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	23,197,749,-	23,197,749,-	21,924,100,-	94.51	100
Koordinasi Perencanaan Bidang 2 Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	38,249,000,-	164,469,000,-	152,114,000,-	92.49	100
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6,674,000,-	78,524,000,-	76,949,000,-	97.99	100
2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	14,060,000,-	24,500,000,-	16,570,000,-	67.63	100
3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	6,900,000,-	56,950,000,-	54,475,000,-	95.65	100
4. Pelaksanaan Monitoring dan	10,615,000,-	4,495,000,-	4,120,000,-	91.66	100

	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	54,480,000,-	56,949,752,-	52,036,000,-	91.37	100
	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	9,740,000,-	5,644,876,-	5,582,000,-	98.89	100
	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10,920,000,-	10,764,876,-	10,594,000,-	98.41	100
	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	24,700,000,-	31,420,000,-	26,740,000,-	85.11	100
	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	9,120,000,-	9,120,000,-	9,120,000,-	100.00	100
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	181,435,850,-	325,668,521,-	297,560,000,-	91.37	100
1	Penelitian dan Pengembangan	56,744,900,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
5. Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	28,372,450,-	124,612,048,-	109,275,000,-	87.69	100
6. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	28,372,450,-	0,-	0,-	0	0
2 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100
3. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	26,260,000,-	89,965,523,-	84,050,000,-	93.42	100
3 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100
3. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	98,430,950,-	111,090,950,-	104,235,000,-	93.83	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, Bappeda mengelola anggaran sebesar Rp. 12,706,990,988,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 10,345,550,664,- atau sekitar 81.42%. Dengan menggunakan skala penilaian sebagaimana telah dicantumkan diatas dapat dikatakan bahwa capaian realisasi Bappeda masih bernilai TINGGI, meskipun sebenarnya diharapkan dapat lebih baik lagi. Besaran capaian ini banyak terpengaruh oleh situasi dan kondisi Pandemi sehingga tupoksi Bappeda yang lebih banyak melakukan koordinasi dalam bentuk rapat-rapat secara tatap muka dan sebagian yang lain melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga yang didalamnya ada dana narasumber menjadi terkendala dengan berbagai pembatasan untuk menghindari memburuknya situasi akibat pandemi. Dengan minimnya

pertemuan tatap muka dan kerjasama tersebut berpengaruh pada serapan anggaran yang bisa direalisasikan.

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program.

Telah disampaikan sebelumnya bahwa pada tahun 2023 Bappeda mengampu 4 Program sebagai alat untuk mencapai sasaran strategis Bappeda. Sasaran Strategis Bappeda meliputi 5 Sasaran yaitu :

- 1) Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah
- 2) Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD
- 3) Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- 4) Meningkatnya Inovasi Daerah
- 5) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja SKPD.

Sedangkan 4 program tersebut meliputi :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
- 3) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- 4) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Terkait dengan anggaran dan realisasi dari masing-masing sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	
				Keuangan	Fisik
1.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10,770,003,149,-	82.92	100
	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.				
2.	Meningkatnya Kesesuaian	Program Penelitian dan	325,668,521,-	91.37	100

	Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Pengembangan Daerah			
	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah				
	Meningkatnya Inovasi Daerah				
3.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,340,718,103,-	64.67	100
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD				
4.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	49,182,463,-	94.22	100
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD				
5.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	164,469,000,-	92.49	100
	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD				
6.	Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	56,949,752,-	91.37	100
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan				

	Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD				
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui anggaran dan realisasi masing-masing sasaran dan programnya yaitu :

- 1) Sasaran I : Meningkatnya Kesesuaian Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan Daerah.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan 4 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 12,706,990,988,- dan terealisasi sebesar 81.42 %.
- 2) Sasaran II : Meningkatnya akuntabilitas Kinerja SKPD.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan 1 program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 10,770,003,149,- dan terealisasi sebesar 82.92%.
- 3) Sasaran III : Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Penelitian dan Pengembangan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 325,668,521,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 91.37%.
- 4) Sasaran IV : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 1,340,718,103,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 64.67%.
- 5) Sasaran V : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.
Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan

Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 49,182,463,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 94.22%.

- 6) Sasaran VI : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 164,469,000,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 92.49 %.

- 7) Sasaran VII : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD.

Sasaran ini dicoba untuk diwujudkan dengan menggunakan program Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah. Dana yang dianggarkan untuk Program ini sebesar Rp. 56,949,752,-. Realisasi dari anggaran terkait program ini adalah sebesar 91.37 %.

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023.

Berikut akan digambarkan perbandingan antara kegiatan-kegiatan yang ada di tahun 2022 dan Tahun 2023. Perbandingan yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat dilakukan secara paralel per program, kegiatan dan Sub Kegiatan karena ada sebagian program atau kegiatan yang ada di tahun 2022 tetapi tidak ada lagi di tahun 2023. Demikian pula sebaliknya, ada program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada di tahun 2021 tetap sama di tahun 2022.

Mengingat bahwa perbandingan ditujukan untuk melihat efisiensi capaian anggaran maka semua Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mengandung kode NA akan diabaikan kecuali kalau hanya terjadi perubahan numenklatur saja, bukan karena memang tidak ada program atau kegiatan dan Sub Keegiatannya di kedua tahun yang diperbandingkan. Untuk melihat perbandingan program, kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Program, Kegiatan & Sub Kegiatan		Anggaran (Pagu)		Realisasi (%)	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8,411,218,290,-	10,770,003,149,-	93.79	82.92
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,999,501,-	34,594,758,-	89.91	85.98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,999,501,-	9,995,878,-	83.45	91.41
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000,-	24,598,880,-	96.38	83.77
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.086.951.510,-	7,459,592,339,-	95.62	79.38
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,279,156,390,-	7,444,592,919,-	95.62	79.34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,998,075,-	14,999,420,-	96.65	97.86
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15,000,000,-	118,651,500,-	4.00	61.55
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15,000,000,-	48,000,000,-	4.00	19.53
	NA	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	NA	70,651,500,-	NA	90.09
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,140,021,316,-	2,397,533,807,-	89.52	93.82
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24,655,959,-	14,976,799,-	92.46	88.61
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103,286,519,-	713,769,906,-	85.72	90.30
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55,608,838,-	55,787,102,-	90.57	85.05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,480,000,-	3,000,000,-	10.34	60.00
	Penyediaan Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	13,000,000,-	10,000,000,-	100	100.00

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	939,990,000,-	1,600,000,000,-	89.95	95.77
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	NA	324,880,141,-	NA	93.26	NA
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	NA	324,880,141,-	NA	93.26	NA
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	469,277,417,-	469.277.417,-	92.54	92,54
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,352,500,-	119,000,000,-	71.53	89.76
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	350,924,917,-	361,630,745,-	99.62	97.65
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,885,450,-	279,000,000,-	66.04	70.61
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14,048,716,-	30,000,000,-	97.22	50.34
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	102,236,734,-	135,900,000,-	59.39	60.18
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,600,000,-	113,100,000,-	71.32	88.51
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	650,126,753,-	1,340,718,103,-	65.20	64.67
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	476,606,753,-	1,062,732,737,-	57.69	60.84
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	476,606,753,-	1,062,732,737,-	57.69	60.84
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	100,000,000,-	100.000.000,-	98.65	99.01

	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100,000,000,-	100.000.000,-	98.65	99.01
	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	73,520,000,-	177,985,366,-	68.39	68.24
	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	Monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	73,520,000,-	177,985,366,-	68.39	68.24
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	146,476,998,-	270,601,215,-	67.52	92.57
	Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	29,085,036,-	49,182,463,-	70.85	94.22
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJM dan RKPD)	4,121,889,-	7,786,731,-	82.09	91.28
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan	7,439,775,-	10,185,650 -	67.03	93.89
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia (RPJPD, RPJM dan RKPD)	4,999,954,-	8,012,333,-	78.47	96.63
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	12,523,418,-	23,197,749,-	66.39	94.51
	Koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	80,373,231,-	164,469,000,-	58.20	92.49
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (RPJPD, RPJMD & RKPD)	52,711,600,-	78,524,000,-	70.35	97.99

	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	8,905,813,-	24,500,000,-	78.66	67.63
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD & RKPD)	3,764,611,-	56,950,000,-	53.79	95.65
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14,991,207,-	4,495,000,-	4.40	91.66
	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan	37,018,731,-	56,949,752,-	85.15	91.37
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD & RKPD)	1,999,472,-	5,644,876,-	90.02	98.89
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	13,879,472,-	10,764,876,-	67.83	98.41
	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (RPJPD, RPJMD & RKPD)	16,389,647,-	31,420,000,-	96.91	85.11
	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	4,750,140,-	9,120,000,-	93.14	100.00
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	44,236,413,-	325,668,521,-	72.81	91.37
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	0	124,612,048,-	0	87.69
	NA	Fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan	NA	124,612,048,-	NA	87.69

		aset daerah, reformasi birokrasi				
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	0	0	0	0
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	15,010,000,-	15.010.000,-	35.22	35,22
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	NA	15,010,000,-	NA	35.22	NA
	NA	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	NA	89,965,523,-	NA	93.42
	NA	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	NA	89,965,523,-	NA	93.42
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	29,226,413,-	111,090,950,-	92.12,-	93.83
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	29,226,413,-	111,090,950,-	92.12,-	93.83

Bab IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pada Bab-Bab dari Laporan Kinerja ini diketahui bahwa :

1. Pada Anggaran Murni tahun 2023, Bappeda mengelola Anggaran sebesar Rp. 11.379.488.744,- dan Anggaran tersebut kemudian terkoreksi kembali meningkat pada APBD Perubahan 2023 menjadi menjadi Rp 12.706.990.988,-.
2. Hasil serapan keuangan pada anggaran tahun 2023 adalah sebesar 81,42% yang jika dibandingkan dengan serapan tahun sebelumnya yaitu 2022 sebesar 91,27% .
3. Hasil realisasi fisik pada anggaran tahun 2023 adalah sebesar 100%, ini berarti Bappeda dapat mempertahankan realisasi fisik dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 100 %.
4. Pada laporan kinerja tahun 2023 ini penyampaian kinerja disampaikan dari level eselon II, Eselon III, hingga level eselon IV pada sekretariat, sehingga penggambaran akuntabilitas kinerja diharapkan dapat tergambar secara lebih jelas per individu pejabatnya sebagai wujud pencapaian Perjanjian Kinerja tiap individu.

B. Strategi Peningkatan Kinerja.

Berdasarkan penelaahan terhadap kinerja SKPD yang diuraikan diatas dapat disampaikan beberapa strategi peningkatan Kinerja pada Bappeda Tanah Laut yaitu :

1. Penyusunan anggaran yang lebih efisien dan efektif lagi terutama pada bidang-bidang yang serapan anggarannya belum maksimal. Penyusunan anggaran harus lebih hemat dan menghindari penyusunan anggaran pada zona nyaman dan cenderung sama dan rutin setiap tahun.
2. Koordinasi dengan SKPD harus terus ditingkatkan sehingga peningkatan keselarasan perencanaan pembangunan SKPD semakin

dapat diwujudkan dan kinerja Bappeda dan SKPD dapat lebih meningkat.

3. Mengingat perencanaan yang dihasilkan sangat tergantung dengan kualitas SDM Perencananya maka kualitas SDM perencana ini harus terus dilakukan. Perlu dilakukan bimtek kepada SDM perencana karena sistem perencanaan yang berlaku sekarang yaitu SIPD belum dikuasai dengan optimal oleh SDM Perencana se Kabupaten.

-o0o-

Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten : TANAH LAUT

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tugas : Melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan.

Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan dan penelitian pengembangan;
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan penelitian pengembangan;
 d. Pelaksanaan administrasi Badan;
 e. Pembinaan UPT Badan;
 f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung Jawab / Sumber Dana
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan kelitbangan daerah.	Persentase kesesuaian perencanaan RKPD dengan RPJMD.	$\frac{\text{Jumlah Program pada RKPD Tahun } n}{\text{Jumlah Seluruh Program pada RPJMD di Tahun } n} \times 100\%$	Seluruh Bidang
		Persentase Hasil Kajian Bidang perencanaan yang diwujudkan	$\frac{\text{Jumlah Hasil Kajian yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah Seluruh Hasil Kajian yang dihasilkan}} \times 100\%$	Bidang Penelitian dan Pengembangan

Kepala Bapeda
Kabupaten Tanah Laut,

Ismail Fahmi, S.E, M.T

Pembina TK. I/ IV b

NIP. 19731128 199803 1 008

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP SKPD Tahun 2023

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
1	Agar dapat dilakukan evaluasi secara berkala terhadap indikator kinerja yang masih belum spesifik sehingga memudahkan pengukuran dan pencapaian atas target kinerja	Telah di lakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang berdasarkan PK, dan dalam pengembangannya Kabupaten melalui Aplikasi Si Monev yang merupakan pengembangan dari E-Monev, pengukuran kinerja sampai kepada individu terendah yakni pelaksana. Pengukuran kinerja didasarkan pada kinerja SKP	https://drive.google.com/drive/folders/1u4xaAKiqifJvemMDCw-TvE6jKpEe7FjV?usp=sharing	
2	Agar Pelaksanaan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja dilaksanakan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Telah di lakukan monitoring evaluasi pencapaian target kinerja berjenjang dibawahnya sehingga diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1DSj0uuY18m4Qaf6Z7-wipAPklyR58JMW?usp=sharing	
3	Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian target kinerja dari	Telah di buat SK Tim Penilai Pemberian Penghargaan Kepada ASN Teladan / Berprestasi Bappeda tahun 2023 dan	https://drive.google.com/drive/folders/1Mh3IHslQgOZHbk2DGld87940mwkA2lom?usp=sharing	

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status/Progres Penyelesaian	Keterangan
	perjanjian kinerja yang telah disepakati	penyampaian usulan asn teladan lingkup Bappeda ke bkpsdm		
4	Agar laporan atas pencapaian kinerja dapat menyajikan data dan analisa yang andal dan memadai, dapat ditelusuri penyajian sumber datanya, diperoleh dari dasar perhitungan yang valid (sah) dan sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya	Telah di lakukan perbaikan terhadap Dokumen Lakip 2023	https://drive.google.com/drive/folders/1kHRXyIEwh4EaaxJ3OjEDfZjKAGdw6r_1?usp=sharing	
5	Agar dapat meningkatkan kompetensi tim AKIP internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui bimbingan teknis atau pendidikan pelatihan, sebagai sarana dalam meningkatkan nilai SAKIP	Mengikuti Bimtek Peningkatan Implementasi Sakip dan RB	https://drive.google.com/drive/folders/1CWG2NatsV3Zq2_KZqdTwWF6LmN9pkMru?usp=sharing	



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : SYAMSIR RAHMAN
Jabatan : Pj. Bupati Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 13 Oktober 2023

Pj. Bupati Tanah Laut

SYAMSIR RAHMAN

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,

ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD)	100%
		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang diwujudkan	100%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.594.758,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.995.878,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.598.880,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.459.592.339,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.444.592.919,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 14.999.420,-
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 118.651.500,-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 70.651.500,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 48.000.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.397.533.807,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Rp. 14.976.799,-	

	Kantor		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	713.769.906,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	55.787.102,-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.000.000,-
	Penyediaan Bahan/Material	Rp.	10.000.000,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	1.600.000.000,-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	480.630.745,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	119.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	361.630.745,-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	279.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	30.000.000,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.	135.900.000,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	113.100.000,-
2.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	1.062.732.737,-
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	1.062.732.737,-

	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	100.000.000,-
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	100.000.000,-
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	177.985.366,-
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp.	177.985.366,-
3.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp.	49.182.463,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	7.786.731,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp.	10.185.650,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	8.012.333,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp.	23.197.749,-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp.	164.469.000,-
	Koordinasi Penyusunan	Rp.	78.524.000,-

	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp.	24.500.000,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	56.950.000,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp.	4.495.000,-
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp.	56.949.752,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	5.644.876,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp.	10.764.876,-
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp.	31.420.000,-
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp.	9.120.000,-
4.	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	124.612.048,-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan		

**Pemerintahan dan Pengkajian
Peraturan**

Fasilitasi, Pelaksanaan dan
Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Keuangan dan Aset Daerah,
Reformasi Birokrasi Rp. 124.612.048,-

**Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Ekonomi dan Pembangunan** Rp. 89.965.523,-

Penelitian dan Pengembangan
Pertanian, Perkebunan
dan Pangan Rp. 89.965.523,-

**Pengembangan Inovasi dan
Teknologi** Rp. 111.090.950,-

Penelitian, Pengembangan, dan
Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi Rp. 111.090.950,-

Pj. Bupati Tanah Laut



SYAMSIR RAHMAN

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,

Sekretaris Bappeda,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008


Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%
		Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang tersusun	100%
		Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	77

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.594.758,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.995.878,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.598.880,-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.459.592.339,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.444.592.919,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 14.999.420,-
		Administrasi Kepegawaian	Rp. 118.651.500,-

Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	70.651.500,-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp.	48.000.000,-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	2.397.533.807,-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp.	14.976.799,-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp.	713.769.906,-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp.	55.787.102,-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp.	3.000.000,-
Penyediaan Bahan/Material	Rp.	10.000.000,-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp.	1.600.000.000,-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	480.630.745,-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp.	119.000.000,-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.	361.630.745,-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	279.000.000,-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp.	30.000.000,-

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Rp. 135.900.000,-

Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Rp. 113.100.000,-

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,



Ismail Fahmi, S.E., M.T

Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Sekretaris Bappeda,



Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK

Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Noviansyah, S. Pi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Bappeda,

Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

Pelaihari, Oktober 2023
Kasubbag Perencanaan,

Muhammad Noviansyah, S.Pi
Penata TK. I / III d
NIP. 19771126 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Melaksanakan Pengelolaan Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan SKPD yang tersusun	7 Dokumen
		Jumlah pelaporan SKPD yang tersusun	5 Laporan


No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.594.758,-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 9.995.878,-
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 24.598.880,-

Pelaihari, Oktober 2023

Sekretaris Bappeda,

Kepala Sub Bagian Perencanaan,


Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
 Pembina TK. I / IV b
 NIP. 19770921 200312 2 005


Muhammad Noviansyah, S.Pi
 Penata TK.I / III d
 NIP. 19771126 201101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari Saparina, S.Psi
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Bappeda,

Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

Pelaihari, Oktober 2023
Kasubbag Keuangan,

Sari Saparina, S.Psi
Penata TK. I/III d
NIP. 19790119 200501 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	Kinerja Utama		
1	Melaksanakan Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	6 Laporan

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 7.459.592.339,-
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 7.444.592.919,-
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 14.999.420,-

Pelaihari, Oktober 2023

Sekretaris Bappeda,



Septy Rina Kumala Sari, S.E., M.E.,Ak
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

Kasubbag Keuangan,



Sari Saparina, S.Psi
Penata TK. I/III d
NIP. 19790119 200501 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harirawati, A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Jabatan : Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekretaris Bappeda,

Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

Pelaihari, Oktober 2023

Kasubbag Umum & Kepegawaian,

Harirawati, A.Md
Penata TK. I / III d
NIP. 19690612 199203 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	Kinerja Utama		
1	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum SKPD	Jumlah Dokumen administrasi Umum SKPD	2587 dokumen
2	Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian SKPD	Jumlah dokumen administrasi Kepegawaian SKPD	69 dokumen

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 118.651.500,-
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 70.651.500,-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 48.000.000,-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2.397.533.807,-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14.976.799,-
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 713.769.906,-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 55.787.102,-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 3.000.000,-
		Penyediaan Bahan/Material	Rp. 10.000.000,-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp. 1.600.000.000,-

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. **480.630.745,-**

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 119.000.000,-

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 361.630.745,-

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. **279.000.000,-**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 30.000.000,-

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 135.900.000,-

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 113.100.000,-

Pelaihari, Oktober 2023

Sekretaris Bappeda,

Kasubbag Umum & Kepegawaian,

Septy Rina Kumala Sari, SE., M.E., AK

Pembina TK. I / IV b
NIP. 19770921 200312 2 005

Harirawati, A.Md

Penata TK. I / III d
NIP. 19690612 199203 2 015



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afrizal Akbar, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Makro

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Pelaihari, Oktober 2023

Kabid. Perencanaan Makro,


Afrizal Akbar, SH
Pembina / IVa
NIP. 19810403 200212 1 008

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	KINERJA UTAMA		
1	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program RKPd dengan RPJMD	Persentase keselarasan program yang dilaksanakan di RKPd terhadap Program yang RPJMD	100%
		Persentase program yang memenuhi target	100%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp. 1.062.732.737,-
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.062.732.737,-
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 100.000.000,-
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 100.000.000,-
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 177.985.366,-
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 177.985.366,-

Pelaihari, Oktober 2023

**Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,**

Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b

NIP. 19731128 199803 1 008

Kabid. Perencanaan Makro,

Afrizal Akbar, SH
Pembina / IV a

NIP. 19810403 200212 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Karim Susastro, S.Si., M.Ec.Dev
Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Afrizal Akbar, SH
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Makro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Perencanaan Makro,

Afrizal Akbar, SH
Pembina / IV a
NIP. 19810403 200212 1 008

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,

Abdul Karim Susastro, S.Si., M.Ec.Dev
Penata / III c
NIP. 19860428 201101 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

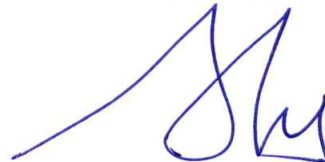
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen
2	Tersusunnya Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah	4 Dokumen

Kepala Bidang Perencanaan Makro,



Afrizal Akbar, SH
Pembina / IV a
NIP. 19810403 200212 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
Perencana Muda,



Abdul Karim Susastro, S.Si, M.Ec.Dev
Penata / III c
NIP. 19860428 201101 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudi Sri Wantoro,SP
Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

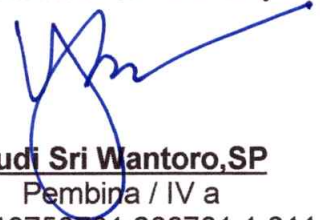
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Kabid. Ekonomi & Sumber Daya Alam,


Yudi Sri Wantoro,SP
Pembina / IV a
NIP. 19750731 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

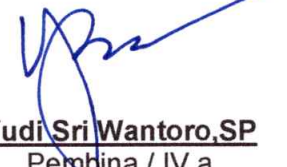
No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPD	100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Rp. 164.469.000,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian(RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 78.524.000,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanPerangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 24.500.000,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 56.950.000,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Rp. 4.495.000,-

**Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,**


Ismail Fahmi, S.E., M.T
 Pembina TK I / IV b
 NIP. 19731128 199803 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
Kabid. Ekonomi & Sumber Daya Alam,


Yudi Sri Wantoro, SP
 Pembina / IV a
 NIP. 19750731 200701 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Dahliyani, SP

Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Yudi Sri Wantoro, SP

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya
Alam,

Yudi Sri Wantoro, SP

Pembina / IV a

NIP. 19750731 200701 1 011

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,

Hj. Dahliyani, SP

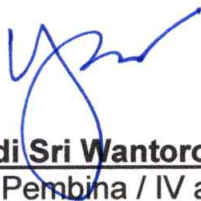
Penata TK. I / III d

NIP. 19770128 200901 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	KINERJA UTAMA		
1	Fasilitasi penyelarasan perencanaan SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA	Dokumen perencanaan SKPD lingkup bidang Ekonomi dan SDA	5 Dokumen
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD bidang Ekonomi dan SDA	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja SKPD bidang Ekonomi dan SDA	1 Laporan

Kepala Bidang Ekonomi & Sumber
Daya Alam,



Yudi Sri Wantoro, SP

Pembina / IV a

NIP. 19750731 200701 1 011

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,



Hj. Dahliyani, SP

Penata TK. I / III d

NIP. 19770128 200901 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Guntoro, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T

Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

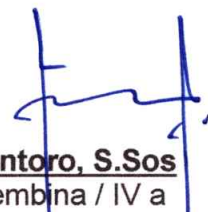
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,

Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008


Guntoro, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 19760917 200604 1 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A.	KINERJA UTAMA		
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPD	100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%


No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 56.949.752,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 5.644.876,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 10.764.876,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 31.420.000,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Rp. 9.120.000,-

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,

Kabid. Infrastruktur dan
Pengembangan Wilayah,


Ismail Fahmi, S.E., M.T
 Pembina TK I / IV b
 NIP. 19731128 199803 1 008


Guntoro, S.Sos
 Pembina / IV a
 NIP. 19760917 200604 1 018



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Andriani, ST

Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Guntoro, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Infrastruktur & Pengembangan
Wilayah,

Guntoro, S.Sos
Pembina / IV/a

NIP. 19760917 200604 1 018

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,

Dewi Andriani, ST
Penata / III c

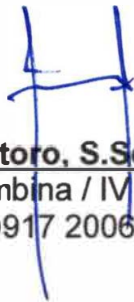
NIP. 19860914 201502 2 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1.	Fasilitasi penyalarsan perencanaan SKPD lingkup bidang pengembangan wilayah	Dokumen perencanaan SKPD lingkup bidang pengembangan wilayah	3 Dokumen
2.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD lingkup bidang pengembangan wilayah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja SKPD lingkup bidang pengembangan wilayah	1 Laporan

Pelaihari, Oktober 2023

**Kabid Infrastruktur &
Pengembangan Wilayah,**



Guntoro, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 19760917 200604 1 018

Perencana Ahli Muda,



Dewi Andriani, ST
Penata / III c
NIP. 19860914 201502 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mei Sugiyono,ST

Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Guntoro, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Infrastruktur & Pengembangan
Wilayah,

Guntoro, S.Sos

Pembina / IV a

NIP. 19760917 200604 1 018

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,

Mei Sugiyono,ST

Penata Muda Tk. I/III b

NIP. 19670502 201406 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1.	Fasilitasi penyelarasan perencanaan SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Dokumen perencanaan SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	2 Dokumen
2.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kinerja SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	1 Laporan

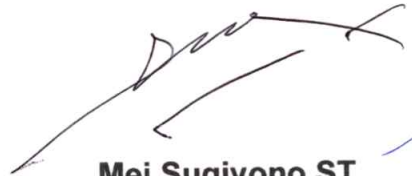
Pelaihari, Oktober 2023

**Kabid Infrastruktur & Pengembangan
Wilayah,**



Guntoro, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 19760917 200604 1 018

Perencana Muda,



Mei Sugiyono, ST
Penata Muda TK. I / III b
NIP. 19670502 201406 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kasnu, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
Kabid. Sosial dan Budaya,


Kasnu, S.Sos
Pembina / IV a
NIP. 19680622 199002 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100%
		Persentase Meningkatnya capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90%

No	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 49.182.463,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 7.786.731,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 10.185.650,-
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 8.012.333,-
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 23.197.749,-

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,

Ismail Fahmi, S.E., M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Kabid. Sosial dan Budaya,

Kasnu S Sos
Pembina IV a
NIP. 19680622 199002 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Witri Widayati, S.Sos

Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Kasnu, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kabid Sosial dan Budaya,


Kasnu, S.Sos
Pembina / IV a

NIP. 19680622 199002 1 001

Pelaihari, Oktober 2023

Perencana Muda,


Witri Widayati, S.Sos
Penata TK. I / III d

NIP. 19760814 199503 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1	Membantu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sosial dan budaya	Dokumen Renja SKPD Bidang Sosial dan Budaya Tahun 2024	6 Dokumen
		Dokumen Renja Perubahan SKPD Bidang Sosial dan Budaya	6 Dokumen
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	1 Laporan

Pelaihari, Oktober 2023

Kabid Sosial dan Budaya,

Perencana Ahli Muda,




Kasnu, S.Sos
Pembina /IV a

Witri Widayati, S.Sos
Penata TK. I / III d

NIP. 19680622 199002 1 001

NIP. 19760814 199503 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Bayu Wilianto, ST
Jabatan : Perencana Muda

Selanjutnya disebut **pihak pertama**


Nama : Kasnu, S.Sos
Jabatan : Kepala Bidang Sosial dan Budaya

Selaku atasan **pihak pertama**, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kepala Bidang Sosial dan Budaya,


Kasnu, S.Sos
Pembina/ IV a

NIP. 19680622 199002 1 001

Pelaihari, Oktober 2023
Perencana Muda


M. Bayu Wilianto, ST
Penata /III c

NIP. 19860212 201101 1 006


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
A. KINERJA UTAMA			
1	Membantu meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang sosial dan budaya	Dokumen Renja SKPD Bidang Sosial dan Budaya Tahun 2024	6 Dokumen
		Dokumen Renja Perubahan SKPD Bidang Sosial dan Budaya	6 dokumen
		Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan SKPD Lingkup Bidang Sosial dan Budaya	1 Laporan

Pelaihari, Oktober 2023

Kabid Sosial dan Budaya,

Perencana Muda,


Kasnu, S.Sos
Pembina /IV a

NIP. 19680622 199002 1 001


M.Bayu Wilianto, ST
Penata / III c

NIP. 19860212 201101 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sri Hadi, S.ST, MT
Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi, S.E, M.T
Jabatan : Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,


Ismail Fahmi, S.E, M.T
Pembina TK I / IV b
NIP. 19731128 199803 1 008

Kabid. Penelitian dan Pengembangan,


Sri Hadi, S.ST, MT
Pembina / IV a
NIP. 19740910 199903 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

No	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
A	Kinerja Utama		
1	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan yang dilaksanakan	9
2	Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan/ diterapkan	100

Program	Kegiatan / Sub. Kegiatan	Anggaran (Rp)
1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Rp. 124.612.048,-
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp. 124.612.048,-
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Rp. 89.965.523,-
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Rp. 89.965.523,-
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Rp. 111.090.950,-
	Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp. 111.090.950,-

Pelaihari, Oktober 2023


Kepala Bappeda
Kabupaten Tanah Laut,


Ismail Fahmi, S.E., M.T

Pembina TK I / IV b

NIP. 19731128 199803 1 008

Kabid. Penelitian dan Pengembangan,


Sri Hadi, S.ST. MT

Pembina / IV a

NIP. 19740910 199903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bahdar Johan, S.Sos

Jabatan : Analis Tata Laksana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Harirawati, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN**

HARIRAWATI, A.Md
NIP. 19690612 199203 2 015

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS TATA LAKSANA

BAHDAR JOHAN, S.SOS
NIP. 19740529 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah data ketatalaksanaan SKPD yang dikumpulkan	20 bahan
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan tata laksana dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data ketatalaksanaan yang dianalisa dan telaahan	20 bahan
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan tata laksana dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen hasil penelitian permasalahan ketatalaksanaan	5 dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	12 laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah dokumen saran yang disampaikan kepada pimpinan	5 laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	100 laporan

**KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN**

HARIRAWATI, A.Md
NIP. 19760827 200501 1 013

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS TATA LAKSANA

BAHDAR JOHAN, S.SOS
NIP. 19740529 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rumaidi, S.E.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran & Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muhammad Noviansyah, S. Pi

Jabatan : Kasubbag Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KASUBBAG PERENCANAAN

MUHAMMAD NOVIANSYAH, S. Pi
NIP. 19771126 201101 1 001

Pelaihari, Oktober 2023
PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN & PELAPORAN

RUMAI, S.E.
NIP. 19900910 202203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Membantu Melaksanakan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Program Anggaran SKPD yang Tersusun	7 Dokumen
		Jumlah laporan SKPD yang Tersusun	5 Laporan

Pelaihari, Oktober 2023

KASUBBAG PERENCANAAN

MUHAMMAD NOVIANSYAH, S. Pi
NIP. 19771126 201101 1 001

**PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN & PELAPORAN**

RUMAIDI, S.E.
NIP. 19900910 202203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Norlita Diana Sari, S.M.

Jabatan : Penyusun Program Anggaran & Pelaporan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Muhammad Noviansyah, S. Pi

Jabatan : Kasubbag Perencanaan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KASUBBAG PERENCANAAN

MUHAMMAD NOVIANSYAH, S. Pi
NIP. 19771126 201101 1 001

Pelaihari, Oktober 2023
PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN & PELAPORAN

EVI NORLITA DIANA SARI, S.M.
NIP. 19940508 202203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Membantu Melaksanakan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Program Anggaran SKPD yang Tersusun	7 Dokumen
		Jumlah laporan SKPD yang Tersusun	5 Laporan

Pelaihari, Oktober 2023

KASUBBAG PERENCANAAN

MUHAMMAD NOVIANSYAH, S. Pi
NIP. 19771126 201101 1 001

**PENYUSUN PROGRAM
ANGGARAN & PELAPORAN**

EVI NORLITA DIANA SARI, S.M.
NIP. 19940508 202203 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yanti Anisa

Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sari Saparina, S.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SARI SAPARINA, S.PSI
NIP. 19790119 200501 2 014

Pelaihari, Oktober 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

YANTI ANISA
NIP. 19780514 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat, dan menyortir administrasi keuangan masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat keuangan yang masuk	50 surat
2	Memberi lembar pengantar pada administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar keuangan yang dilampirkan	50 lembar
3	Mengelompokkan administrasi keuangan atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah dokumen keuangan yang tersortir	800 kwitansi
4	Mendokumentasikan administrasi keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat keuangan yang terdokumentasikan	800 kwitansi
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada atasan langsung	12 laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	50 laporan

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SARI SAPARINA, S.PSI
NIP. 19790119 200501 2 014

Pelaihari, Oktober 2023
PENGADMINISTRASI KEUANGAN

YANTI ANISA
NIP. 19780514 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kesria Nurilam Putri DS, A.Md, Pjk

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sari Saparina, S.Psi

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SARI SAPARINA, S.PSI
NIP. 19790119 200501 2 014

Pelaihari, Oktober 2023

BENDAHARA

KESRIA NURILAM P.DS, A.MD, PJK
NIP. 19780514 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengelola uang/surat berharga/barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban	Jumlah berkas yang dikelola	500 berkas
2	Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang	Jumlah surat perintah membayar uang SPM Giro	42 surat
3	Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah terbayarnya tagihan-tagihan	1100 kwitansi
4	Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas	Jumlah terpenuhinya permintaan uang muka	1 kali
5	Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan	Jumlah tersusunya dokumen penerimaan dan pengeluaran uang Badan	1100 kwitansi
6	Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada atasan langsung	12 laporan
7	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	24 laporan

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

SARI SAPARINA, S.PSI
NIP. 19790119 200501 2 014

Pelaihari, Oktober 2023

BENDAHARA

KESRIA NURILAM P.DS, A.MD, PJK
NIP. 19780514 200701 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eris Eriyani, A.Md

Jabatan : Pranata Komputer Terampil

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi S.E, M.T

Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BAPPEDA

Pelaihari, Oktober 2023
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL


ISMAIL FAHMI S.E, M.T
NIP. 19731128 199803 1 008


ERIS ERIYANI, A.MD
NIP. 19891025 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Melakukan penggandaan data	Jumlah data yang tergandakan	576 file
2	Melakukan perekaman data tanpa validasi	Jumlah data terekam	4.000.000 karakter
3	Melakukan validasi hasil perekaman data	Jumlah data tervalidasi	3.000.000 karakter
4	Melakukan perekaman data dengan pemindaian	Jumlah dokumen perekaman data dengan pemindaian	500 Dokumen
5	Membuat perekaman data dengan validasi	Jumlah data yang terekam dengan validasi	1.000.000 karakter
6	Melakukan konversi data	Jumlah dokumen yang terkonversi	50 Dokumen
7	Melakukan kompilasi data pengolahan	Jumlah dokumen yang terkompilasi	70 Dokumen
8	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan (Verifikator)	Jumlah kwitansi yang terverifikasi	800 Kwitansi

KEPALA BAPPEDA

Pelaihari, Oktober 2023
PRANATA KOMPUTER TERAMPIL


ISMAIL FAHMI S.E, M.T
NIP. 19731128 199803 1 008


ERIS ERIYANI, A.MD
NIP. 19891025 201101 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosida Wati

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Harirawati, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

HARIRAWATI, A.Md
NIP. 19690612 199203 2 015

Pelaihari, Oktober 2023
**PENGADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

ROSIDA WATI
NIP. 19840512 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian	Jumlah surat yang diterima	60 surat
2	Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian	Jumlah lembar pengantar keuangan yang dilampirkan	60 surat
3	Mengelompokkan administrasi kepegawaian atau dokumen Kepegawaian menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian	Jumlah dokumen yang tersortir	25 dokumen
4	Mendokumentasikan administrasi kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi	Jumlah surat yang terdokumentasikan	60 surat
5	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada atasan langsung	12 laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	10 laporan

**KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN**

HARIRAWATI, A.Md
NIP. 19690612 199203 2 015

Pelaihari, Oktober 2023
**PENGADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN**

ROSIDA WATI
NIP. 19840512 200801 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muswantinah, A.Md

Jabatan : Pranata Komputer Mahir

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ismail Fahmi S.E, M.T

Jabatan : Kepala Bappeda

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BAPPEDA

Pelaihari, Oktober 2023
PRANATA KOMPUTER MAHIR


ISMAIL FAHMI S.E, M.T
NIP. 19731128 199803 1 008


MUSWANTINAH, A.MD
NIP. 19871218 201101 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Melakukan penggandaan data	Jumlah data yang tergandakan	576 file
2	Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem jaringan lokal (<i>local area network</i>)	Jumlah permasalahan jaringan yang terdeteksi	2 jaringan
3	Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi informasi <i>end user</i>	Jumlah permasalahan perangkat TI yang terdeteksi	3 perangkat
4	Melakukan perekaman data tanpa validasi	Jumlah data terekam	4.000.000 karakter
5	Melakukan validasi hasil perekaman data	Jumlah data tervalidasi	1.000.000 karakter
6	Melakukan perekaman data dengan pemindaian	Jumlah dokumen perekaman data dengan pemindaian	384 Dokumen
7	Membuat perekaman data dengan validasi	Jumlah data yang terekam dengan validasi	2.000.000 karakter
9	Melakukan konversi data	Jumlah dokumen yang terkonversi	50 Dokumen
10	Melakukan kompilasi data pengolahan	Jumlah dokumen yang terkompilasi	10 Dokumen
11	Melakukan uji coba program multimedia interaktif	Jumlah pelaksanaan uji coba program multimedia interaktif	4 Kegiatan
12	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	120 Kegiatan

KEPALA BAPPEDA


ISMAIL FAHMI S.E., M.T
NIP. 19731128 199803 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
PRANATA KOMPUTER MAHIR


MUSWANTINAH, A.MD
NIP. 19871218 201101 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggi Pusvita Rini, SE

Jabatan : Analis Perencanaan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Afrizal Akbar, SH

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Makro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO**

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP. 19810403 200212 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS PERENCANAAN

ANGGI PUSVITA RINI, SE
NIP. 19951014 201903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Tanah laut	Jumlah dokumen perencanaan Kabupaten Tanah Laut	4 dokumen
2	Menyusun laporan evaluasi pembangunan Kabupaten Tanah Laut	Jumlah laporan evaluasi pembangunan Kabupaten Tanah laut	4 laporan
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	12 laporan

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO**

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP. 19680622 199002 1 001

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS PERENCANAAN

ANGGI PUSVITA RINI, SE
NIP. 19951014 201903 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagah Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fajar Ramadhan, S.A.P.

Jabatan : Analis Perencanaan Anggaran

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Afrizal Akbar, SH

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan Makro

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO**

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP. 19810403 200212 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN

MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, S.A.P.
NIP. 19981219 202203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Menyusun dokumen perencanaan Kabupaten Tanah Laut	Jumlah dokumen perencanaan Kabupaten Tanah Laut	4 dokumen
2	Menyusun laporan evaluasi pembangunan Kabupaten Tanah Laut	Jumlah laporan evaluasi pembangunan Kabupaten Tanah Laut	4 laporan
3	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	12 Laporan

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
MAKRO**

AFRIZAL AKBAR, SH
NIP. 19810403 200212 1 008

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN

MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN, S.A.P.
NIP. 19981219 202203 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Habibah Yuliana S.E.

Jabatan : Analis Data Ekonomi Makro

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Yudi Sri Wantoro, SP

Jabatan : Kepala Bidang Ekonomi & Sumber Daya Alam

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, Oktober 2023

ANALIS DATA EKONOMI MAKRO

SITI HABIBAH YULIANA S.E

NIP. 19760705 200701 2 020

**KEPALA BIDANG EKONOMI &
SUMBER DAYA ALAM**

YUDI SRI WANTORO, SP

NIP. 19750731 200701 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah data ekonomi makro yang dikumpulkan	4 Laporan
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan data ekonomi makro dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data ekonomi makro yang dianalisa dan telaahan	4 Laporan
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data ekonomi makro dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen hasil penelitian permasalahan data ekonomi makro	1 Dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	3 SKPD
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pemimpin unit	Jumlah laporan saran yang disampaikan kepada pimpinan	1 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	1 Laporan

**KEPALA BIDANG EKONOMI &
SUMBER DAYA ALAM**



YUDI SRI WANTORO, SP
NIP. 19750731 200701 1 011

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS DATA EKONOMI MAKRO



SITI HABIBAH YULIANA
NIP. 19760705 200701 2 020



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nova Mulianita, S. Pd. M. Si

Jabatan : Analis Tata Ruang

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Guntoro, S.Sos

Jabatan : Kepala Bidang Infrastruktur & Pengembangan Wilayah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**KABID INFRASTRUKTUR &
PENGEMBANGAN WILAYAH**


GUNTORO, S.Sos
NIP. 19760917 200604 1 018

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS TATA RUANG


NOVA MULIANITA, S. PD. M. SI
NIP. 19841112 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah data yang dikumpulkan untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	30 data
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan Tata Ruang dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data Tata Ruang yang dianalisa dan telaahan	4 data
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan Tata Ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah laporan hasil penelitian permasalahan Tata Ruang	1 laporan
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	10 laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan saran yang disampaikan kepada pimpinan	8 laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah kegiatan kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan	24 kegiatan

**KABID INFRASTRUKTUR &
PENGEMBANGAN WILAYAH**

GUNTORO, S.Sos
NIP. 19760917 200604 1 018

Pelaihari, Oktober 2023
ANALIS TATA RUANG

NOVA MULIANITA, S. PD. M. SI
NIP. 19841112 201001 2 024



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rinawati, SKM, M.M

Jabatan : Analis Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sri Hadi, S.ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BIDANG LITBANG

SRI HADI, S.ST, MT
NIP. 19740910 199903 1 005

Pelaihari, Oktober 2023
**ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Rinawati, SKM, M.M
NIP. 19780815 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah data Penelitian dan Pengembangan yang dikumpulkan	5 dokumen
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan penelitian dan pengembangan dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data Penelitian dan Pengembangan yang dianalisa dan telaahan	5 dokumen
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan penelitian dan pengembangan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen hasil penelitian permasalahan Penelitian dan Pengembangan	1 dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	5 laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk disampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan saran yang disampaikan kepada pimpinan	3 laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	30 laporan

KEPALA BIDANG LITBANG

SRI HADI, S.ST, MT
NIP. 19740910 199903 1 005

Pelaihari, Oktober 2023
**ANALIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN**

Rinawati, SKM, M.M
NIP. 19780815 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedy Waluyo, A.Md

Jabatan : Analis Data di Bidang Evaluasi dan Kerjasama Penelitian

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sri Hadi, S.ST, MT

Jabatan : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak **PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak **KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

KEPALA BIDANG LITBANG

SRI HADI, S.ST, MT
NIP. 19740910 199903 1 005

Pelaihari, Oktober 2023
**ANALIS DATA DI BIDANG EVALUASI
DAN KERJASAMA PENELITIAN**

DEDY WALUYO, A.Md
NIP. 19780815 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari Telp. (0512) 21036 Fax. 21782
Website : www.bappeda.tanahlautkab.go.id e-mail : talabappeda@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

No.	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target
	1	2	3
1	Mengumpulkan bahan-bahan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan	Jumlah data di bidang evaluasi dan kerjasama penelitian yang dikumpulkan	10 Data
2	Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan data di bidang evaluasi dan kerjasama penelitian agar memperlancar pelaksanaan tugas	Jumlah data di bidang evaluasi dan kerjasama penelitian yang di analisa dan telaahan	10 Data
3	Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan data di bidang evaluasi dan kerjasama penelitian dalam rangka menyelesaikan pekerjaan	Jumlah dokumen hasil penelitian permasalahan data di bidang evaluasi dan kerjasama penelitian	2 Dokumen
4	Membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	Jumlah laporan hasil kerja yang disampaikan kepada pimpinan unit agar hasil telaahan dapat bermanfaat	2 Laporan
5	Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya untuk di sampaikan kepada pimpinan unit	Jumlah laporan saran yang disampaikan kepada pimpinan	2 Laporan
6	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan	Jumlah laporan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya	20 Laporan

KEPALA BIDANG LITBANG

SRI HADI, S.ST, MT

NIP. 19740910 199903 1 005

Pelaihari, Oktober 2023
**ANALIS DATA DI BIDANG EVALUASI
DAN KERJASAMA PENELITIAN**

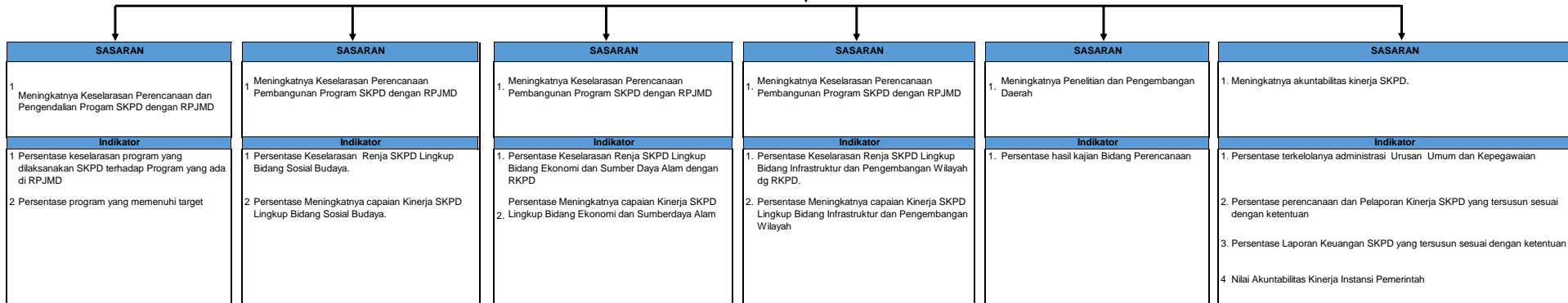
DEDY WALUYO A.Md

NIP. 19780815 200501 2 016

POHON KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT

ESELO
N II

SASARAN
1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah
INDIKATOR
1. Persentase kesesuaian Perencanaan RKPD dengan RPJMD 2. Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti



ESELO
N IV



Kepala Bappeda

ISMAL FAHMI, SE, MT
NIP. 19731128 199803 1 008


Evaluasi Hasil Renja Tahun 2023
TRIWULAN IV
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

P

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra sampai dengan Renja Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan Renstra Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra s/d tahun 2023 (%)	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Semua Bidang																									
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.770.003.149		1.478.975.954		2.572.633.365		1.846.413.208		3.032.486.080		8.930.508.607		82,92%		8.930.508.607		0,00%	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34.594.758		3.415.400		2.487.600		7.008.700		16.833.400		29.745.100		85,98%		29.745.100		0,00%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ()	0,00	-	0,00	-	7	9.995.878	1	1.665.000	5	1.042.000	6	4.215.500	7	2.215.000	7	9.137.500	100,00%	91,41%	7,00	9.137.500	0,00%	0,00%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	5	24.598.880	2	1.750.400	4	1.445.600	4	2.793.200	5	14.618.400	5	20.607.600	100,00%	83,77%	5,00	20.607.600	0,00%	0,00%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.459.592.339		1.020.728.373		2.084.465.079		1.171.574.439		1.644.662.263		5.921.430.154		79,38%		5.921.430.154		0,00%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	12	7.444.592.919	3	1.017.907.773	6	2.083.464.279	9	1.165.402.939	12	1.639.977.263	12	5.906.752.254	100,00%	79,34%	12,00	5.906.752.254	0,00%	0,00%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	5	14.999.420	2	2.820.600	5	1.000.800	5	6.171.500	5	4.685.000	5	14.677.900	100,00%	97,86%	5,00	14.677.900	0,00%	0,00%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						118.651.500		750.000		29.900.000		8.625.000		33.750.000		73.025.000		61,55%		73.025.000		0,00%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	70.651.500	-	-	1	29.900.000	1	-	2	33.750.000	2	63.650.000	100,00%	90,09%	2,00	63.650.000	0,00%	0,00%
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0,00	-	0,00	-	8	48.000.000	2	750.000	2	-	5	8.625.000	8	-	8	9.375.000	100,00%	19,53%	8,00	9.375.000	0,00%	0,00%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.397.533.807		322.844.007		319.750.954		522.478.203		1.084.297.781		2.249.370.945		93,82%		2.249.370.945		0,00%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	14.976.799	-	-	-	5.241.750	-	5.399.000	1	2.629.450	1	13.270.200	100,00%	88,61%	1,00	13.270.200	0,00%	0,00%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	15	713.769.906	1	29.424.600	1	46.570.000	1	169.076.250	15	399.494.175	15	644.565.025	100,00%	90,30%	15,00	644.565.025	0,00%	0,00%
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	2	55.787.102	2	8.640.000	2	7.918.800	2	16.978.800	2	13.909.600	2	47.447.200	100,00%	85,05%	2,00	47.447.200	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	3.000.000	1	300.000	-	300.000	-	450.000	-	750.000	1	1.800.000	100,00%	60,00%	1,00	1.800.000	0,00%	0,00%
		Penyediaan Bahan/Material	*Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0,00	-	0,00	-	1	10.000.000	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	1	10.000.000	100,00%	100,00%	1,00	10.000.000	0,00%	0,00%

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	0,00	-	0,00	300	1.600.000.000	82	284.479.407	118	259.720.404	200	330.574.153	300	657.514.556	300	1.532.288.520	100,00%	95,77%	300,00	1.532.288.520	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						480.630.745		114.251.697		109.838.984		112.528.866		123.326.209		459.945.756		95,70%		459.945.756	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	12	119.000.000	3	26.006.277	6	24.509.264	9	27.059.160	12	29.242.165	12	106.816.866	100,00%	89,76%	12,00	106.816.866	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	0,00	-	0,00	12	361.630.745	3	88.245.420	6	85.329.720	9	85.469.706	12	94.084.044	12	353.128.890	100,00%	97,65%	12,00	353.128.890	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						279.000.000		16.986.477		26.190.748		24.198.000		129.616.427		196.991.652		70,61%		196.991.652	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	0,00	-	0,00	1	30.000.000	1	2.610.000	1	3.387.500	1	3.520.000	1	5.585.000	1	15.102.500	100,00%	50,34%	1,00	15.102.500	0,00%	0,00%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0,00	-	0,00	15	135.900.000	6	11.296.750	15	16.303.250	15	19.678.000	15	34.505.600	15	81.783.600	100,00%	60,18%	15,00	81.783.600	0,00%	0,00%	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0,00	-	0,00	35	113.100.000	3	3.079.727	6	6.499.998	6	1.000.000	35	89.525.827	35	100.105.552	100,00%	88,51%	35,00	100.105.552	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	82,92%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Tinggi				
		PERENCANAAN																							
		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						1.340.718.103		116.306.400		207.387.421		102.053.820		441.246.316		866.993.957		64,67%		866.993.957	0,00%	0,00%	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						1.062.732.737		106.306.400		98.507.421		82.933.820		358.786.316		646.533.957		60,84%		646.533.957	0,00%	0,00%	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	0,00	-	0,00	3	1.062.732.737	1	106.306.400	2	98.507.421	3	82.933.820	3	358.786.316	3	646.533.957	100,00%	60,84%	3,00	646.533.957	0,00%	0,00%	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						100.000.000		-		99.010.000		-		-		99.010.000		99,01%		99.010.000	0,00%	0,00%	
		Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Standar Belanja (Dokumen)	0,00	-	0,00	1	100.000.000	-	-	1	99.010.000	1	-	1	-	1	99.010.000	100,00%	99,01%	1,00	99.010.000	0,00%	0,00%	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						177.985.366		10.000.000		9.870.000		19.120.000		82.460.000		121.450.000		68,24%		121.450.000	0,00%	0,00%	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	*Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	8	177.985.366	-	10.000.000	4	9.870.000	6	19.120.000	8	82.460.000	8	121.450.000	100,00%	68,24%	8,00	121.450.000	0,00%	0,00%	
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	64,67%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Rendah				

		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	*Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	111.090.950	-	1.500.000	-	5.445.000	-	5.070.000	1	92.220.000	1	104.235.000	100,00%	93,83%	1,00	104.235.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	100,00%	91,37%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
									12.706.990.988										TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		100,00%	81,42%			
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sangat Tinggi	Tinggi			

Faktor pendorong keberhasilan pencapaian kinerja :		
Faktor penghambat pencapaian kinerja :		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):		
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya**):		

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

TABEL KESELARASAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO	LAKIP 2023					RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)					PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023					Cascading 2023					
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan RKPd dengan RPJMD	100%	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	100%	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan RKPd dengan RPJMD	100%	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	100%	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan RKPd dengan RPJMD	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD	100%	Meningkatnya kesesuaian perencanaan pembangunan dan Kelitbangan Daerah	Persentase kesesuaian Perencanaan RKPd dengan RPJMD	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase keselarasan program SKPD terhadap Program di RPJMD
		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target	100%		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti	100%		Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target	100%		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti		Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target	100%		Persentase hasil kajian Bidang Perencanaan yang ditindaklanjuti		Persentase Kinerja SKPD yang memenuhi target
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100%				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90%					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Sosial Budaya
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPd	100%				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPd	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPd	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dengan RKPd
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90%					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam
				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Wilayah dg RKPd	100%				Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPd	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPd	100%			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan dan Pengendalian Program SKPD dengan RPJMD	Persentase Keselarasan Renja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dg RKPd

NO	LAKIP 2023						RENSTRA 2018 - 2023 (BAB IV)						PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023						Cascading 2023			
	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Target	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	sasaran	Indikator	Target	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	
					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%					Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	90%				Persentase capaian Kinerja SKPD Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	
				Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%					Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%			Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian	100%			Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase terkelolanya administrasi Urusan Umum dan Kepegawaian
					Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%					Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%				Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	100%				Persentase perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD sesuai ketentuan	
					Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%					Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%				Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	100%				Persentase Laporan Keuangan SKPD yang tersusun sesuai dengan ketentuan	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	77 (BB)					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	77 (BB)				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	77 (BB)				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan Yang Dilaksanakan	9					Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan Yang Dilaksanakan	9			Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan Yang Dilaksanakan	9			Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah hasil kajian Bidang Perencanaan Yang Dilaksanakan
				Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan / diterapkan	100%					Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan / diterapkan	100%			Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan / diterapkan	100%			Meningkatnya Inovasi Daerah	Persentase Inovasi yang dikembangkan / diterapkan